

CYBERDEMOKRASI, WACANA KORUPSI

KASUS CICAQ & BUAYA

Oleh :

Widjajanti M Santoso

Nina Widyawati

Katubi

Henny Warsilah

Sutamat Aribowo

Rusdi Muchtar

Editor :

Widjajanti M Santoso



Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

eyb

© 2011 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan*

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Cyberdemokrasi, Wacana Korupsi Kasus Cicak dan Buaya/Widjajanti M. Santoso, Nina Widyawati, Katubi, Henny Warsilah, Sutamat Arybowo, Rusdi Muchtar – Jakarta, 2011.

iv hlm + 157 hlm.; 14,8 x 21 cm

ISBN : 978-602-221-140-2

1. Korupsi
2. Cyberdemokrasi

364. 132

Diterbitkan atas kerjasama:

PMB-LIPI dengan PT. Gading Inti Prima

Penerbit:

PT. Gading Inti Prima (anggota IKAPI)

Jl. Hibrida Raya Blok PD 14 No. 7

Kelapa Gading

Jakarta 14250

Telp: (021) 4508142



LIPI

*Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Widya Graha Lt. VI dan IX,
Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 10
Jakarta, 12710
Telp.: 021-5701232
Faks.: 021-5701232

PRAKATA

Kajian cyberdemokrasi pada tahun 2011 ini mengangkat kasus Cicak dan Buaya untuk menggambarkan ekspresi dan pandangan masyarakat awam terhadap kasus politik. Ekspresi dan pandangan ini diperoleh melalui jejaring sosial seperti *Face Book* yang sekarang ini sedang marak di Indonesia. Kajian ini merupakan rangkaian penelitian tentang cyberdemokrasi yang berusaha mengangkat isu sosial politik serta teknologi secara bersamaan.

Kajian ini adalah kajian yang relatif baru yang menggambarkan upaya proaktif dari PMB-LIPI di dalam mengantisipasi perkembangan yang sangat cepat yang terjadi di masyarakat. PMB-LIPI dan tim peneliti merasa bersyukur bahwa Kemenristek memberikan porsi penelitian sosial yang menjadi bagian dari tugas dan fungsi dari Kemenristek (Kementerian Riset dan Teknologi). Sekaligus merupakan upaya kontribusi ilmu sosial terhadap perkembangan teknologi.

Cicak dan Buaya merupakan kasus politik yang tampil menggugat kebiasaan yang 'ada' di Indonesia. Kasus ini memperlihatkan kuatnya pengaruh politik di dalam kasus hukum di

mana KPK menjadi bagian yang tidak lepas dari masalah di Indonesia. Kasus ini mempertanyakan hal yang dahulu tidak bisa dipermasalahkan dan dianggap biasa saja. Kali ini situasi sosial memungkinkan adanya tindakan menggugat struktur yang dilihat agak mapan. Dalam hal ini struktur yang mapan tersebut adalah struktur yang memiliki kekuatan baik formal maupun informal. Pada dekade lalu, kasus seperti ini akan menjadi sisi yang masuk kotak dan tidak berani diungkapkan. Saat ini tidak hanya kasus ini menjadi perbincangan dan pergunjungan akan tetapi menjadi bahan menarik di dalam diskusi melalui *Face Book*.

Jakarta, Desember 2011

Kepala Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan
Kebudayaan-LIPI

Ttd.

Drs. Abdul Rachman Patji, MA

DAFTAR ISI

PRAKATA	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I CYBERDEMOKRASI DI INDONESIA.....	1
• Pendahuluan	1
• Situs Jejaring Sosial	1
• Partisipasi di Ruang Maya	3
• Ekspresi Berpendapat	9
• Simpulan	11
BAB II CYBERDEMOKRASI DAN MEDIA SOSIAL.....	13
• Pendahuluan	13
• Kekuatan <i>People's Power</i>	15
• Media Sosial, Ruang Ekspresi Sosial	19
• Demokrasi <i>Online</i> dan <i>Offline</i>	24
• Penelitian Internet Bukan Hal Baru	26
• Teks Internet	28
• Wacana, Analisa Teks	31
• Keterbatasan Kajian	38
• Simpulan	40
BAB III CICAQ DAN BUAYA SERTA PERSETURUANNYA..	41
• Pendahuluan	41
• Kesejarahan Kasus Cicaq versus Buaya	41
• Publik Bereaksi	44
• Lembaga Lain Bereaksi	45
• Teks Cicaq dan Buaya	48
• Perseteruan Institusi	51
• Hasil Pembahasan Narasumber IP	55

- Konteks Sosial Teks 65
- Pemaparan Demokrasi Offline Kasus Cicak dan Buaya..... 80
- Kriminalisasi Kasus Bibit – Chandra 85
- Upaya Dukung Anti Korupsi 86
- Gerakan Sosial Melawan Korupsi Melalui Media Baru:
Dari Optimisme Cicak VS Buaya ke Pesimisme Sinetron
Nazarudin 96
- Visualisasi Korupsi 97
- Dukungan Terhadap KPK 101
- Dukungan Terhadap Pemberantasan Korupsi 109
- Rendahnya Dukungan dari Institusi Lain 110
- Pesimisme Sinetron Nazarudin 112
- Nazaruddin, Sinetron Terbaru TV Indonesia 114
- Wacana Korupsi dalam Kasus Nazaruddin 128
- Simpulan 134

BAB IV INTERNET DAN KAJIAN CYBERDEMOKRASI... 135

- Pendahuluan 135
- Lapangan Nyata 135
- Kajian tentang Internet 138
- Lapangan Maya 140
- Simpulan 143

BAB V FB DALAM KONTEKS CYBERDEMOKRASI DAN SUARA MASYARAKAT SIPIL 145

- Pendahuluan 145
- Jejaring Sosial dalam Konteks Perubahan Masyarakat..... 146

DAFTAR PUSTAKA 149

BAB I

CYBERDEMOKRASI DI INDONESIA

Pendahuluan

Cyberdemokrasi adalah isu kontemporer pada penelitian ilmu sosial, karena beberapa hal. Yang pertama adalah karena penggunaan internet untuk kebutuhan masyarakat madani digunakan terutama oleh orang muda. Dengan demikian, ada 'generation gap' dalam memahami hal ini sebagai sebuah tema penelitian. Yang kedua penggunaan internet dalam hal ini *facebook* (selanjutnya FB) terperangkap oleh pemahaman bahwa dia adalah media untuk kebutuhan interaksi sosial berbentuk *interface* (bukan *face to face*). Sehingga ketika FB dipergunakan untuk memberdayakan, menyatukan pendapat, mengeluarkan pendapat, banyak orang terperangah. Yang ketiga sebagai sebuah isu penelitian tentang hal ini tentu masih terbatas. Yang keempat ada kebutuhan untuk memahami hal ini sebagai bagian yang tidak terlepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan dampaknya.

Tulisan ini bertujuan untuk memperlihatkan interaksi, dalam konteks pengaruh TIK terhadap masyarakat dalam proses demokratisasi dengan memfokuskan diri pada peran media baru. Internet dalam hal ini adalah media baru yang berbeda dari media pada umumnya seperti yang kita ketahui yaitu media cetak, audio dan audio visual. Dalam hal ini penelitian ini melihat penggunaan media baru dan pengaruhnya pada masyarakat Indonesia. Sebagai sumbangan dari kajian ilmu sosial yang sensitif terhadap perkembangan teknologi khususnya TIK. Paparannya adalah tentang penggunaan situs jejaring sosial seperti FB dalam perkembangan demokrasi di Indonesia.

Situs Jejaring Sosial

Penggunaan FB dalam konteks perkembangan demokratisasi di Indonesia adalah penelitian yang sangat penting untuk mengungkapkan

peran ruang maya. Perkembangan ini tentu saja spesifik untuk Indonesia di dalam konteks kuatnya media massa menyangkut kepentingan pasar dan politik. Hal ini merupakan asumsi dasar dari mereka yang melakukan penelitian tentang media di Indonesia. Salah satu pakar dalam hal ini adalah Krisna Sen dan David T Hill seperti yang dikemukakan oleh Joshua Barker,¹ yang menggambarkan bahwa media massa di Indonesia dikuasai oleh kekuasaan seperti politik dan pasar. Sehingga menentang kekuasaan seperti itu masih berlangsung di Indonesia, mereka yang tidak direpresentasikan oleh media, menggunakan internet dan jejaring sosial untuk kebutuhan ekspresi (politik) mereka.

Dua penelitian sebelumnya yang menggarap Pemilu 2009 (Widyawati, 2009; Widyawati 2011), memperlihatkan penggunaan internet dan media interaksi tempat diskusi isu sosial dan politik. Penelitian tentang isu Cicak dan Buaya merupakan upaya untuk melihat interaksi masyarakat pada isu-isu penting di Indonesia. Penelitian ini menggunakan kerangka cyberdemokrasi, yang mendefinisikannya secara umum sebagai;

*Democracy enhanced by the Internet and other ICTs. Cyber Democracy typically encompasses more direct forms of government, stressing different aspects of political participation, particularly discussion and political activity through communal forms of participation.*²

Akan tetapi definisi mengacu pada pengalaman dari negara maju, di mana proses demokrasi sudah berjalan beratus tahun. Pada banyak Negara di Dunia Ketiga, demokrasi sendiri merupakan kata yang

¹Joshua Barker, Indonesian Techno-Politics: From Interkom to Internet, University of Toronto. Dalam <http://kambing.ui.ac.id/onnopurbo/library/library-ref-eng/ref-eng-3/application/policy/Barker%20Techno-Politics%20Paper.doc>. Diakses 21 februari 2011

²Cyber Democracy 2001: A Global Scan August 2001 For VIVENDI UNIVERSAL PROSPECTIVE, By Alternative Futures Associates 100 North Pitt Street, Suite 235 Alexandria, VA 22314, www.altfutures.com.

cenderung jargon politik, antara lain karena pengalaman pemerintahan yang otoritarian.

Dalam pola pemerintahan yang (dahulu) otoritarian, masyarakat cenderung tidak memiliki akses terhadap proses politik. Akan tetapi ketika rejim tersebut berubah tidak serta merta situasi sosial mengikuti perubahan yang terjadi dengan cepat. Perkembangan politik di Indonesia pasca 1998 menunjukkan bahwa “kebebasan” dapat dilihat dari perkembangan partai politik, media massa, pertemuan massa termasuk demonstrasi. Akan tetapi perkembangan tersebut tidak serta merta membuat kita lebih demokratis dalam pengertian adanya keterlibatan pada proses politik dan mendapatkan akses partisipatif yang lebih luas. Terutama bagi masyarakat umum, meski situasinya lebih luwes dan menunjukkan harapan, namun konflik politik dan perdebatan pada tingkat nasional dan lokal seringkali membuat situasi kurang menyenangkan.

Selain itu, proses demokrasi pada negara maju dalam konteks TIK, ditunjang oleh akses terhadap media ini, sehingga elemen ini adalah bagian yang tidak terlepas dari proses demokrasi yang ada. Namun situasi di Negara Dunia Ketiga pada umumnya berbeda, seperti adanya *digital divide* yaitu, sebuah situasi di mana akses terhadap TIK saja masih merupakan masalah besar. Sehingga bisa dibayangkan kegagapan ketika proses politik masuk menggunakan akses ini. Di lain pihak teknologi terus berkembang sehingga TIK, dalam hal ini akses internet yang menjadi dasar dari FB, lebih mudah diperoleh. Saat ini FB dapat diakses dengan lebih murah dan mudah dengan menggunakan telepon seluler. Perkembangan seperti inilah yang kemudian memungkinkan lebih banyak orang menjadi pengguna FB, dan dalam beberapa segi menggunakannya dengan kreatif.

Partisipasi di Ruang Maya

Menyadari perkembangan TIK di Indonesia dan maraknya penggunaan jaringan sosial seperti FB, memungkinkan penggunaan FB dalam proses politik. Namun perlu disadari bahwa hal ini masih

merupakan domain orang muda, yang lebih cepat menerima teknologi baru maupun cara berinteraksi yang ‘baru’ pula. Mereka menjadi penduduk di dunia maya yang memiliki pandangan sosial politik yang khas dunia ini.

Dalam terminologi cyberdemokrasi, TIK dipergunakan bukan oleh elit politik melainkan oleh masyarakat umum dalam proses politik. Terminologi *swarm activity* seperti di bawah ini merupakan proses politik yang terjadi di masyarakat tanpa ikatan dengan partai politik tertentu;

*Among the most innovative and unexpected efforts to influence policy agendas is the so-called “Swarm Activism,” a term used to describe loose networks of activists who coordinate efforts without any formal leadership.*³

Kegiatan ‘sosial’ ini memiliki kemungkinan untuk mempengaruhi agenda politik. Akan tetapi yang penting untuk diperhatikan dari konsep seperti ini adalah adanya aktivitas dari masyarakat umum yang membahas masalah politik.

Kecenderungan ini sudah diperlihatkan oleh dua penelitian sebelumnya, di mana penelitian tahun ini masih merupakan penelitian lanjutannya. Kelanjutan dari penelitian tahun ini adalah melihat isu kontemporer yang ada di Indonesia, salah satunya melalui kasus Cicak Versus Buaya. Pembahasan di dalam konteks seperti ini, sangat penting bagi kaum muda Indonesia dan masyarakat Indonesia pada umumnya karena beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa kelas menengah di Indonesia pada masa Orde Baru dianggap sebagai kelompok yang apolitis. Dampaknya sampai saat ini masih terasa ketika orang membicarakan Golongan Putih (Golput), sebagai kelompok yang tidak ingin memilih partai politik tertentu. Kecenderungan tersebut berubah karena ada ruang-ruang tertentu yang menampung ekspresi mereka seperti halnya FB ini. Yang kedua, seperti yang diangkat oleh kutipan di atas bahwa, penggunaan TIK merupakan perkembangan yang tidak

³ *Ibid* Cyber Democracy, 2001, hlm. 6.

disangka yang membahas dan (mudah-mudahan) mempengaruhi agenda politik yang berkembang di Indonesia. Artinya para politikus perlu mensikapi perkembangan ini dengan lapang dada sebagai bentuk partisipasi politik yang ‘baru’. Yang ketiga, dalam konteks perubahan sosial hal ini merupakan upaya untuk memotret perkembangan yang tumbuh di Indonesia, dan merupakan ‘kekayaan’ proses sosial politik di Indonesia.

Ekspresi politik melalui internet ini dapat dilihat sebagai perkembangan “baru”, dari partisipasi di dalam proses demokrasi. Kemajuan teknologi memberikan ruang dan dampak terhadap perkembangan politik. Hanya saja teknologi ternyata memainkan peran yang sangat besar di dalam proses mendesiminasikan ide, maupun di dalam penggarapan ide. Sehingga barangkali penting untuk mensitir pendapat dari Douglas Kellner yang mengatakan bahwa:

“As we enter a new millennium, public intellectuals and activists are going to need to accordingly perceive the new public spheres of political struggle and gain new skills and literacies in order to participate in the intellectual and people battles of the contemporary era”⁴

Pandangan Kellner menunjukkan TIK berkembang dengan sangat cepat dan semakin dapat dijangkau oleh masyarakat, sehingga membuka akses partisipatif yang lebih besar. Untuk menggambarkan bentuk masyarakat yang secara visioner perlu dipertimbangan keberadaannya, maka dibutuhkan bantuan dari pandangan posmodernisme terhadap kondisi ini. Pandangan posmodernisme ini dipergunakan untuk melihat bentuk ‘ideal’ dari masyarakat, sehingga mendapatkan gambaran tentang bentuk masyarakat yang akan dihadapi kelak. Peminjaman konteks posmodernisme ini perlu dilakukan dan

⁴Douglas Kellner, 2009. *Globalization and Technopolitics*, <http://www.gseis.ucla.edu/faculty/kellner/kellner.html>. Diakses 25-3-2009.

dapat dilakukan demi kepentingan membangun konteks akademis dari perubahan masyarakat.⁵

Pandangan Yasraf A. Piliang tentang Posdemokrasi, Bersatunya Demokrasi dan Anarki,⁶ memberikan pemahaman awal tentang bentuk masyarakat yang dipengaruhi oleh TIK. Di dalam bagian tersebut, Piliang memulai dengan mengemukakan perbedaan antara realitas demokrasi dan citra demokrasi. Perbedaannya, adalah pada realitas demokrasi kita melihat proses demokrasi yang terjadi di masyarakat, sedangkan citra demokrasi adalah demokrasi yang tertangkap oleh media massa. Keduanya saling berhubungan dan dengan demikian demokrasi dapat dibagi atas; demokrasi sempurna di mana realitas demokrasi dan citra demokrasi berjalan berdampingan. Kemudian ada yang disebutnya sebagai demokrasi tidak sempurna, di mana “citra demokrasi tidak sesuai dengan realitas demokrasi” dan yang terakhir adalah posdemokrasi. Posdemokrasi adalah adanya keterputusan antara realitas demokrasi dengan citra demokrasi dan keterputusan dengan prinsip demokrasi itu sendiri. Ciri posdemokrasi lainnya adalah adanya bentuk-bentuk anarkisme baik di dalam realitas demokrasi maupun pada citra demokrasi.

Berdasarkan pemahaman Piliang, inti demokrasi adalah adanya pengaturan dan pengendalian, tanpa keduanya masyarakat akan berada pada kondisi ketidakberaturan, keacakkan dan ketidakpastian.⁷ Oleh karena itu, seringkali kondisi ini disebut sebagai matinya sosial. Jika pandangan ini diartikan sebagai cermin dari keberadaan demokrasi, maka demokrasi yang kita hadapi adalah posdemokrasi yang dipenuhi

⁵Lihat Ben Ager, dalam *Virtual Self*. Dalam bagian pendahuluan dari buku tersebut, Ager menggambarkan dirinya bukan posmodernis, akan tetapi tantangan posmodernisme perlu diperhatikan sebagai upaya untuk menggambarkan signifikansi dari kajian yang dilakukan.

⁶Lihat, Yasraf A. Piliang. 2004. *Posrealitas, Realitas Kebudayaan dalam Era Posmetafisika*. Yogyakarta: Jalasutra, 253-271.

⁷Yasraf A. Piliang. 2004, hlm 254.

oleh tindakan-tindakan anarkis. Selain itu, bentuk masyarakatnya adalah masyarakat yang kehilangan bentuk-bentuk aturan sosial.

Terlepas dari konsep-konsep yang abstrak tersebut, Piliang yang cenderung menterjemahkan teori di dalam pemahaman yang lebih sederhana, mengkaitkan hal ini dengan perubahan sosial yang disebutnya dengan turbulensi sosial. Turbulensi sosial adalah kondisi "...antara keadaan kacau dan teratur, antara kepastian dan ketidakpastian, antara keadaan teramalkan dan tak teramalkan."⁸ Kontek seperti turbulensi dapat digunakan sebagai analogi untuk melihat kondisi masyarakat Indonesia. Sehingga kita bisa menyadari tentang Indonesia yang berada pada kondisi turbulensi sosial. Kita perlu menyadari kondisi turbulensi yang melanda masyarakat.

Pada kenyataannya orang yang sangat percaya tentang dunia cyber, justru tidak suka dengan konsep demokrasi karena dianggap mengikat kebebasan individual dengan adanya hukum, aturan main, kepatuhan, otoritas dan konsensus.⁹ Karena mereka berpendapat bahwa "...mengekspresikan diri secara total dan menavigasi (mengarahkan) diri sendiri secara mandiri, di dalam dunia yang tak terbatas..." adalah tujuan mereka. Pandangan mereka bukan tidak beralasan karena mereka melihat bahwa tidak mungkin mengawasi ruang maya, jaringannya saja sudah merantasi dunia global. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara mereka yang membahas tentang posdemokrasi dengan e-anti-demokrasi.

Visi tentang demokrasi di dunia maya ini merupakan sebuah gambaran dan tantangan perubahan masyarakat yang sedikit atau banyak akan mempengaruhi masyarakat, dalam hal ini khususnya Indonesia. Untuk melihat tantangan dunia maya ini ada beberapa kritik yang dikemukakan oleh Piliang yaitu:¹⁰ adanya 1) komodifikasi *cyberspace* di mana kapitalisme juga berpengaruh pada dunia maya. Sehingga kebebasan yang digambarkan oleh para *cyber* ini adalah

⁸Yasraf A. Piliang, 2004, hlm 257.

⁹Yasraf A. Piliang, 2004, hlm 263.

¹⁰Yasraf A. Piliang, 2004, hlm 264.

sebuah kebebasan semu belaka.; 2) adanya kecenderungan *surveillance* dan *disinformation*. Di mana otoritas menggunakan saluran ini untuk memantau masyarakat. Selain itu, di dalam ruang ini, informasi yang dikembangkan juga diarahkan pada bentuk-bentuk atau pola tertentu. Misalnya konsumerisme tidak hilang bahkan mendapatkan bentuk pengembangannya yang baru. 3) Terdapat hiperealitas komunikasi di mana realitas berkelindan dengan rekayasa realitas. Perkembangan teknologi memungkinkan perkembangan citra yang lebih luas sehingga terciptalah realitas yang baru. Sebagai ilustrasi di dalam pemahaman gender, citra perempuan yang subordinat, tiba-tiba mendapatkan bentuk baru di mana perempuan diperlihatkan memiliki kemampuan sama dengan laki-laki seperti berotot, mampu mengangkat senjata dan sebagainya. Situasi ini dapat disebutkan sebagai bentuk disinformasi. 4) munculnya pertanyaan tentang moral dan etika, karena para *cyber* yang sangat mengagungkan pembebasan, ternyata dilihat tidak memiliki empati terhadap hubungan dengan masalah sosial dan budaya. Sehingga kemudian masyarakat mempertanyakan pikiran mereka tentang moral dan etika di dalam berhubungan sosial dalam bentuk *interface*.

Setelah pemaparan yang abstrak ini, Piliang tidak lupa menggambarkan bentuk masyarakat Indonesia jika dilihat dari kacamata ini. Pandangan tentang masyarakat ini menjadi penting untuk memperlihatkan kondisi nyata yang dihadapi pada tingkat keseharian. Karakter masyarakat Indonesia adalah:

- (1) Masyarakat memiliki daya kritis yang terbatas, di mana tidak terdapat dialog dan bahkan para elit-lah yang menguasai ruang maya ini sehingga masyarakat menjadi *silent majorities*.¹¹ Masyarakat menjadi objek dari informasi, mereka bersifat reaktif terhadap informasi yang ada dan kurang proaktif untuk mempertanyakan dan mengecek kebenaran dari informasi itu sendiri.

¹¹Yasraf A. Piliang. 2004, hlm. 266-267.

- (2) Masyarakat belum terbiasa berdialog dengan rasional yang berjarak dengan emotivisme, tekanan, penipuan pemaksaan baik suku, agama, kedaerahan, kelompok. Yang terjadi justru timbulnya *mass tyrani* dan *micro facism*.
- (3) Masyarakat belum berbentuk masyarakat informasi di mana orang mengetahui bagaimana mencari informasi, menganalisisnya untuk membantunya membuat keputusan yang rasional.
- (4) Masyarakat cenderung menjadi konsumen informasi. Masyarakat menjadi objek informasi di mana mereka dikelilingi oleh citra, ideologi, kebutuhan dan sebagainya.
- (5) Masyarakat memiliki Pemahaman yang terbatas terhadap prinsip demokrasi. Demokrasi dipahami secara terbatas sebagai perilaku yang membolehkan melakukan tindakan apapun, tanpa memperhitungkan adanya aturan dan pengendalian. Sehingga yang terjadi adalah kecenderungan anarkisme.

Kelima butir ini memperlihatkan elemen-elemen yang perlu diperhatikan di dalam membahas tentang cyberdemokrasi. Meskipun terlihat seperti paradoks, akan tetapi gambaran seperti ini mempermudah melihat benang merah antara penelitian dengan kebutuhan untuk memahami tema seperti ini.

Ekspresi Berpendapat

Ekspresi berpendapat adalah kemampuan individu atau kelompok untuk menyuarakan pandangannya. Ekspresi berpendapat merupakan salah satu bentuk partisipasi di ruang publik yang memberikan kemungkinan bagi individu atau masyarakat untuk berpendapat. Ruang ini merupakan ruang yang penting bagi masyarakat sipil dan demokrasi itu sendiri. Konteks ini menjadi sangat penting di Indonesia saat ini dengan beberapa fakta yang perlu kita sadari bersama. Fakta ini adalah indeks Kebebasan Pers dari *Reporteur sans Frontier* yang dikemas dengan sangat baik oleh R Kristiawan.¹² Indeks

¹²R. Kristawan, 2011, *Jerat Negara an Pasar dalam Ruang Publik*. Dalam Prisma Vol. 30, No. 1, 2011. Hlm. 56. pada 2001–Paling bebas, 2002–

kebebasan pers di Indonesia memperlihatkan gejala semakin lama kebebasan pers menjadi semakin buruk. Padahal kita menyadari bahwa kebebasan pers adalah bagian yang tidak lepas dari reformasi yang kita canangkan setelah jatuhnya rejim Orde Baru pada 1998.

Kristiawan memperlihatkan dua elemen besar yang membuat kebebasan pers cenderung memburuk; yang pertama adalah pasar dan yang kedua adalah negara. Dengan adanya kebebasan pers setelah reformasi 1998 membuat media berkembang sangat pesat terutama media penyiaran. Sebagai akibatnya kepemilikan dari media penyiaran berkisar pada beberapa orang saja. Di media sendiri, sudah terkenal adanya *agenda setting* yang digarap oleh pekerja media, sehingga isu yang dikembangkan di media merupakan isu yang dianggap penting oleh pemilik media dan kelompok kepentingannya. Oleh sebab itu di dalam konteks ruang publik, pertanyaan tentang peran media saat ini menjadi pertanyaan yang signifikan, karena mereka mengontrol ruang publik tersebut.

Sedangkan Kristiawan melihat peran negara memiliki keinginan yang besar untuk mengontrol media. Salah satu yang diangkat sebagai ilustrasi adalah penggunaan defamasi. Defamasi atau pencemaran nama baik adalah kasus yang sering kali dilontarkan oleh institusi terhadap individu, dengan alasan bahwa penjelasan individual tersebut merugikan institusi. Oleh pihak pers, melalui UU Pers, defamasi tidak masukkan dalam kategori hukum pidana di mana hal yang sama menjadi delik hukum pidana dengan penggunaan KUHP. Salah satu ilustrasinya adalah perkembangan UU yang berhubungan dengan media seperti film memperlihatkan keinginan negara untuk melakukan kontrol terhadap perfilman yang ada, termasuk mengatur para insan perfilman yang membutuhkan ruang kreatifitas.

peringkat 57 dari 139 negara, 2003–111 dari 166, 2004–117 dari 167, 2005–105 dari 167, 2006–103 dari 168, 2007–100 dari 169, 2008–111 dari 173, 2009–101 dari 178, dan 2010–117 dari 178 (<http://en.rsrf.org/>).

Simpulan

Kajian cyberdemokrasi adalah kajian yang sangat luas. Oleh karena itu, pembatasannya menjadi penting. Kajian ini mengarah pada penggunaan jejaring sosial sebagai alat ekspresi. Salah satu dasar untuk melihatnya sebagai alat ekspresi sosial adalah secara teoritis mekanisme ini disebut sebagai media sosial, karena menjadi alternatif terhadap hegemoni *mainstream* media.

Selain itu, kajian ini melihat bagaimana mekanisme jejaring sosial seperti FB yang awalnya cenderung melihat hal ini sebagai mekanisme hubungan sosial ternyata dipergunakan untuk ekspresi sosial politik. Kecenderungan ini bukan yang pertama kali terjadi, karena FB dipergunakan sesuai dengan kreatifitas yang tumbuh.

Ketertarikan ini kemudian dipaparkan dengan lebih mendalam pada tulisan lain yang salah satunya menyajikan masalah Bibit-Chandra baik dalam paparan kasusnya dan juga perkembangan di dalam FB. Sehingga ada dua informasi penting yang akan digarap oleh kajian ini yang pertama informasi yang berkaitan dengan kasus Bibit-Chandra yang berkembang di masyarakat. Perkembangan ini di dalam kajian ini disebut sebagai demokrasi *offline*. Sedangkan informasi yang kedua adalah informasi tentang Bibit-Chandra yang berkembang di ruang maya, dan perkembangan ini disebut sebagai demokrasi *online*.

BAB II

CYBERDEMOKRASI DAN MEDIA SOSIAL

Pendahuluan

Demokrasi sudah dikenal oleh masyarakat sejak lama. Kata demokrasi menjadi ikon untuk negara-negara yang melaksanakan pemerintahan dengan memberikan kebebasan untuk rakyatnya menyampaikan pendapat secara bebas melalui berbagai media. Kata demokrasi berarti pemerintahan oleh demos, atau rakyat biasa yang menjadi pandangan mayoritas penduduk. (Azra, 2009). Mengutip Beitz, Azra mengatakan bahwa demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang menghormati kesamaan dan kedaulatan warganya.

Kebebasan yang diekspresikan melalui media merupakan suatu hal yang wajar di negara-negara yang menganut paham demokrasi. Pada negara yang dianggap tidak demokratis, maka kebebasan berpendapat itu tidak ada. Salah satunya caranya adalah melalui kontrol oleh negara, melalui media massa. Pada kondisi tersebut menyampaikan pendapat atau pandangan tidak bebas, bahkan dilarang.

Pada masa kedua `Orde` tersebut, sensor media massa sangat ketat, semua acara media massa diarahkan oleh penguasa dan harus mengikuti acuan-acuan pemerintah yang diterjemahkan melalui Departemen Penerangan. Selain tentu saja media massa masih terbatas jumlahnya. Orang atau kelompok tidak boleh mengadakan kegiatan yang menghimpun banyak orang tanpa ada izin dari otoritas penguasa. Penyiaran berita harus terpusat, media massa seperti radio secara teratur *merelay* berita yang besumber dari RRI (Radio Republik Indonesia) sebagai radio pemerintah.

Ketika pemerintahan Suharto, televisi di Indonesia terdiri dari satu *channel*, TVRI (Televisi Republik Indonesia). Rakyat Indonesia waktu itu menggantungkan kebutuhan informasi dan hiburan melalui

media itu. Disamping TVRI, dan RRI juga ada radio2 swasta yang dibolehkan mengudara, tetapi untuk siaran informasi atau berita, semua stasiun radio swasta harus *merelay* berita yang diproduksi oleh media pemerintah. Dengan media massa seperti itu pemerintah menyampaikan berbagai informasi program pemerintah dan sekaligus juga hiburan untuk masyarakat.

Media massa dan teknologi informasi ternyata berperan dalam menyebarkan 'virus' demokrasi dalam masyarakat. Media massa merupakan media yang tepat untuk menyebarluaskan konsep demokrasi kepada masyarakat. Pertama, media massa dapat menjangkau sasaran yang luas dalam waktu bersamaan. Yang kedua, mereka yang mengikuti media tidak mengenal satu sama lain, sehingga memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengikuti pemikiran yang berkembang dimedia tanpa diawasi oleh orang lain. Pengetahuan yang diperoleh dari berbagai media yang berbeda memberikan nilai hak berpendapat. Armando (2011: hlm 5) mengatakan bahwa media massa membawa muatan isi yang penting bagi masyarakat, yaitu sebagai penegakkan masyarakat demokrasi. Media massa berperan sebagai ruang publik yang memungkinkan berbagai informasi dan opini dipertukarkan dalam masyarakat. Media massa juga diharapkan dapat menyajikan beragam informasi yang dapat memberdayakan publik untuk berpartisipasi aktif dalam demokrasi. Konsekuensinya adalah bahwa negara harus menjaga agar keberagaman kepemilikan media dapat dipelihara.

Pawito (2001) dalam disertasi doktor di di University of New Castle, Australia mensinyalir perkembangan demokratisasi. Demokratisasi adalah proses yang berkembang semenjak munculnya berbagai stasiun TV swasta di Indonesia sekitar tahun 1989, yang telah menumbuhkan rasa demokrasi pada penduduk Indonesia. Jika sebelum muncul televisi swasta, penduduk Indonesia hanya menikmati siaran dari satu *channel* saja yaitu TVRI, maka dengan perkembangan teknologi *channel* televisi bertambah.

Munculnya televisi swasta menyumbang pada perkembangan demokrasi yang tidak terpikirkan sebelumnya. Mereka yang membangun televisi swasta ketika itu adalah anak-anak Suharto dan kroninya, dengan pertimbangan bisnis yang menjanjikan. Ketika itu usaha mereka sebenarnya mendobrak aturan yang mengatakan bahwa televisi di Indonesia hanya disiarkan oleh TVRI. Televisi swasta, yang pertama adalah RCTI pada tahun 1988, kemudian disusul oleh SCTV dan, pada tahun 1990an bermunculan berbagai stasiun televisi swasta lainnya. Dalam jangka 10 tahun semenjak televisi swasta pertama mengudara, munculah suasana baru dalam masyarakat Indonesia tumbanganya Orde Baru 1998. Selama 10 tahun masyarakat Indonesia disuguhi dengan berbagai acara yang bukan hanya TVRI saja, tapi juga dari stasiun swasta lainnya. Suguhan tersebut memberikan dampak yang luar biasa pada masyarakat, terutama pada kesempatan untuk memilih program yang mereka sukai dan tentunya suguhan informasi dan beritanya.

Secara tidak disadari, oleh anak-anak dan kroni Suharto, kemunculan berbagai media merupakan katalisator terhadap tumbanganya rezim Suharto. Adanya berbagai siaran televisi swasta secara tidak langsung memberikan angin demokratisasi dalam masyarakat Indonesia. Tampaknya sejalan dengan pribahasa tradisional Indonesia: `seperti memelihara anak harimau`, atau `seperti senjata makan tuan`.

Kekuatan *People's Power*

Di dalam perkembangan politik di Dunia Ketiga khususnya yang terjadi di Asia Tenggara, ada dua negara yang umumnya dilansir memiliki apa yang dinamakan *people's power*, yaitu Philipina dan Thailand. Di Philipina gerakan ini mampu menumbangkan Marcos dan digantikan oleh presiden perempuan Corazon Aquino. Di Thailand gerakan ini masih bergerak dengan menggoyang pemerintahan yang menghasikan drama pendudukan bandara international berkedudukan di Bangkok. Ini hanyalah dua contoh saja dari perkembangan isu kontemporer di dalam masalah politik yang muncul dari masyarakat.

Kasus *People Power* di Indonesia yang menyeruak pada situasi sosial politik muncul ketika perubahan rejim terjadi pada 1998. Menurut Merlyna Lim terjadi proses pembentukan identitas dalam proses demokratisasi. Dengan menyitir pendapat Manuel Castells tentang adanya tiga bentuk identitas yang muncul; pertama identitas yang melegitimasi pandangan dari institusi yang dominan dan merasionalisasi kepentingannya. Kemudian identitas resistan yang dikemukakan oleh kelompok marginal dan mendapatkan stigmatisasi dari pandangan yang dominan. Ketiga identitas baru yang berkembang secara kolektif melalui redefinisi posisi di dalam masyarakat dan memiliki keinginan untuk melakukan transformasi sosial dan politik.¹³

Perubahan rejim terjadi dan memperlihatkan bagaimana media baru dipergunakan untuk menggarap isu dan pandangan baru terhadap masa depan. Media baru adalah media yang menggunakan internet dengan berbagai lamannya. Pandangan seperti ini muncul sebagai upaya untuk mengembangkan identitas baru dan memberikan posisi terhadap pandangan yang dominan. “Apa Kabar” adalah salah satu laman yang memberikan informasi dan pengetahuan pada masyarakat. Melalui laman seperti ini informasi terdiseminasi dengan baik dan turut mengembangkan identitas baru.

Di Indonesia saat ini, kasus Cicak dan Buaya yang menggalang dukungan melalui FB, mendapatkan repons yang sangat tinggi. Sehingga keberadaan kasus ini, tidak hanya populer di ruang maya akan tetapi juga diangkat sebagai berita pada media terutama media televisi. Penggalangan Cicak dan Buaya mampu meraup banyak pendukung, dan karena isunya sesuai dengan perkembangan masalah kontemporer di Indonesia, gerakan akhirnya mampu mendukung Chandra dan Bibit. Dukungan masyarakat terhadap Bibit dan Chandra, mampu mengeluarkan mereka dari ‘pengamanan’ Polisi dan secara

¹³Merlyna Lim, 2003, *From Real to Virtual and Back Again, Civil Society, Public Sphere and the Internet in Indonesia*, dalam K.C Ho, Randolph Kluver, Kenneth CC Yang, Asia.Com, Asia Encounters the Internet. New York: Routledge Curzon, 2003, hlm 115.

fenomenal membuat ‘*press release*’ di lobi gedung KPK. Gerakan seperti ini dapat dianggap sebuah hasil yang ‘baru’ dari proses politik yang tidak lazim terjadi di Indonesia. Masyarakat ‘biasa’ mampu mempengaruhi keputusan politik.

Sehingga ketika FB berhasil dipergunakan untuk sebuah konteks politik, maka pertanyaan yang muncul apakah hal ini adalah bentuk ekspresi politik yang ‘baru’ di Indonesia. Ekspresi politik ini menjadi sangat penting bagi masyarakat Indonesia karena dunia politik sangat menentukan keberaturan sosial yang berkembang atau yang tidak berkembang. Barangkali menarik untuk melihat kutipan dari Yasraf A Piliang yang membahas tentang politik virtualitas. Yasraf A Piliang melihat kecenderungan bahwa

“Ketika politik mengintervensi hukum, prinsip-prinsip keadilan, kejujuran dan kebersihan hukum diambil alih oleh prinsip-prinsip kelicikan, kelicinan dan kekotoran politik: *ketika paradigma citra (imagology) menguasai hukum, maka prinsip-prinsip kesemuan kepalsuan dan kedustaan cirtra menggantikan prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan hukum*: ketika politik menjajah ekonomi prinsip persaingan bebas, sportivitas dan legalitas ekonomi digantikan oleh prinsip-prinsip intrik, teror dan mafia-mafia politik: ketika ekonomi mengendalikan agama, maka prinsip kebenaran, kezuhudan dan kesucian agama diambil alih oleh prinsip-prinsip ilusi, gemerlap dan profanitas komoditi”¹⁴ (cetak miring dari penulis).

Kutipan ini menggambarkan kekuatan politik yang disebut-sebut sebagai panglima perang di Indonesia, yang menentukan kehidupan sosial ekonomi dan tentunya juga politik. Penggunaan FB sebagai ekspresi politik merupakan ungkapan resistensi terhadap perkembangan atau kecenderungan politik di ruang publik. Agen politik memainkan peran yang sangat menentukan, padahal masyarakat memiliki pandangan yang berbeda.

¹⁴Yasraf A. Piliang. 2005. *Transpolitika, Dinamika Politik di dalam Era Virtualitas*. Yogyakarta: Jalasutra. Hlm. 36.

Masyarakat yang sudah mengalami kebebasan sebagai bagian dari proses reformasi, akan merasa terganggu. Namun sekaligus masyarakat juga merasa tidak berdaya terhadap kondisi seperti ini, mengingat akses ke ruang politik juga masih terbatas. Sehingga ruang maya seperti FB menjadi akses yang memungkinkan untuk mempengaruhi situasi politik yang ada.

Dalam hal ini perkembangan penggunaan FB untuk ekspresi politik seperti telah disebut sebelumnya merupakan permunculan kreatif di dalam kehidupan dan keberadaan dari perangkat seperti TIK. Penggunaan kreatif ini juga menjadi salah satu perhatian yang muncul di dalam sebuah *blog* dengan mengatakan bahwa:

“Zuckerberg juga mungkin tak berpikir *facebook* adalah senjata ampuh untuk politikus dan hukum. Di Indonesia, dengan 20 juta pengguna *facebook*, situs ini bisa menjadi alat apa pun tergantung siapa yang memegang dan seberapa kuat mengendalikan massa. Orang menyebut *facebook* sebagai bukti adanya kekuatan massa atau *people’s power*”.¹⁵

Zuckerberg adalah pembuat situs FB yang dimaksudkan untuk memudahkan orang berkomunikasi. *Facebook* diluncurkan pertama kali tahun 2004, tepatnya 4 Februari, sebagai media untuk saling mengenal bagi mahasiswa Harvard University. Dengan cepat jaringan itu menjadi populer di antara mahasiswa dari berbagai kampus lain. Dalam waktu empat bulan sejak diluncurkan, FB telah menghubungkan 30 kampus. Penggunaan FB untuk kebutuhan penggalangan pendukung ataupun kegiatan lainnya adalah kegiatan yang tidak terbayangkan akan terjadi ketika situs FB dibuat.

Menurut Andini, sejarah SJS sudah mulai sejak tahun 1997 dengan dihadirkan *SixDegrees.com*. Pada akhir tahun 1990an dan di awal milenium ketiga, berkembang teknologi komunikasi/informasi baru yang memungkinkan masyarakat menyemarakkan suasana

¹⁵<http://asrul.blogdetik.com/perkembang-facebook-di-indonesia-semakin-mencengangkan-amerika-akankah-foursquare-berikutnya/>. Diakses 8 November 2010.

demokratisasi. Internet dengan segala variasinya membuat masyarakat lebih bebas menyatakan pendapatnya di ruang publik. Elga Andina (2010: hlm 119) mengatakan penyebaran situs jejaring sosial (*social networking site* atau SJS) berkembang seperti wabah *flu*. Epideminya berlangsung cepat karena ditunjang peningkatan kualitas sarana dan prasarana internet. Tahun 1998 muncul fitur pencarian teman untuk melakukan afiliasi.

Media Sosial, Ruang Ekspresi Sosial

Perkembangan media sosial saat ini merupakan perkembangan yang menarik di Indonesia. Berdasarkan penelitiannya, Yanuar Nugroho dan Shita Laksmi memasukkan dua elemen penting di dalam perkembangan sosial politik di Indonesia. Yang pertama adalah meningkatnya jumlah pengguna dari media sosial dan yang kedua adalah penggunaan media sosial sebagai saluran politik. Kasus seperti Prita dan kasus Cicak dan Buaya yang diangkat oleh kajian ini merupakan ilustrasi dari penggunaannya. Perkembangan ini merupakan bagian dari perkembangan masyarakat sipil di Indonesia, seperti dinyatakan oleh mereka berdua di bawah ini:

"We finally came to a conclusion that civil society is blossoming in Indonesia. The new political climate has allowed many bottom-up initiatives to grow. Bottom-up democracy necessitates a healthy civil society, where manifolds of social movements and civic engagements can express their interests".¹⁶

Kesan yang serupa diperoleh dari paparan Ignatius Haryanto, yang mengikuti perkembangan dari kasus Cicak dan Buaya. Berdasarkan pernyataannya, masyarakat menggunakan dunia maya disebabkan oleh:

"Banyak pihak yang menyebut fenomena penahanan ini sebagai "situasi darurat keadilan di Indonesia", sehingga

¹⁶Yanuar Nugroho, Shita laksmi, 2011, Social Media in Civil Society, <http://www.thejakartapost.com/news/2011/04/30/social-media-civil-society%E2%80%94citizens-ction.html>. Diunduh 1 Nov 2011.

banyak pihak langsung ikut terlibat mendukung kelompok sosial via dunia maya”.¹⁷

Perkembangan ini merupakan perkembangan yang terjadi di dunia global, sebagai bagian yang tidak terlepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Suara yang sama juga diutarakan oleh Roby Muhammad yang melihat ada beberapa butir penting dari kasus media sosial dalam mengangkat sebuah isu yang diikuti oleh tindakan sosial.¹⁸ Berdasarkan isunya, di ruang maya terdapat isu yang beragam, sehingga isu khusus yang diangkat masyarakat merupakan isu yang dianggap penting oleh pendukungnya. Kemudian dalam bentuknya media sosial, seperti FB menjadi alat yang efektif karena beberapa hal, yang pertama adalah *wall* yang sekali klik memperlihatkan baik isu, pendukung dan juga komentar mereka. Selain itu, di dalam strukturnya, FB memperlihatkan teman, atau orang yang kita kenal yang sama-sama mendukung. Dengan pola meng-*invite*, maka orang yang awalnya tidak menyadari adanya isu tersebut kemudian menjadi tercerahkan. Roby Muhammad menekankan bahwa manusia adalah makhluk sosial, sehingga walau tidak bertatap muka, individu merasa dekat dan merasa peduli dengan isu yang sama.

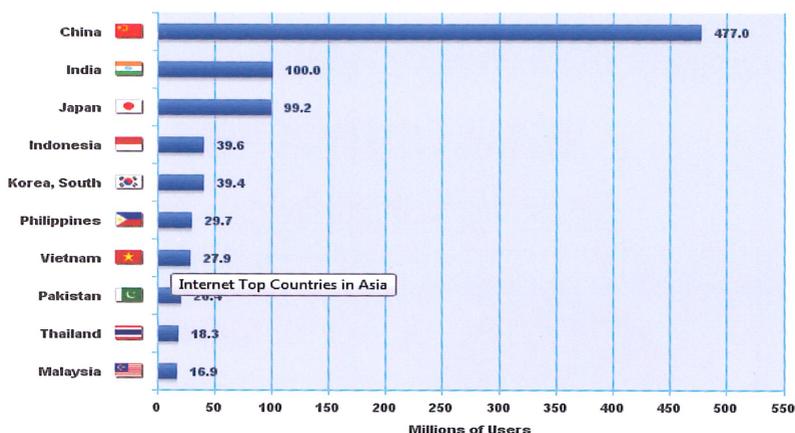
Semakin menarik melihat potensi dari media sosial, yang disebutkan oleh Gun Gun Heryanto merupakan ruang publik baru yang berbeda dari ruang publik. Tidak hanya sebagai sekedar ruang publik, ruang maya merupakan ruang yang potensial untuk mengembangkan kepedulian terhadap konteks simbolik yang sama. Gun Gun Heryanto

¹⁷Ignatius Haryanto. 2009. *Para Pembangkang Mayantara (Cyber Dissident)*, 15 November 2009, http://mediacub-pejompongan.blogspot.com/2009_11_01_archive.html, diunduh 15 sep 2011. Diterbitkan juga di Koran Tempo Sabtu 7 November 2009.

¹⁸Roby Muhammad. 2009. *Gerakan Sosial Digital*. Dimuat di <http://www.liputan6.com>, *dimuat ulang di sini untuk tujuan Pendidikan*. <http://indoproggress.blogspot.com/2009/11/gerakan-sosial-digital.html>, 15 September 2011

memperlihatkan bahwa kepedulian ini dimungkinkan karena besar dan semakin berkembangnya pendukung media sosial. Menyitir data yang diperoleh dari www.Checkfacebook.com, yang memperlihatkan bahwa Indonesia merupakan satu dari 10 pengguna FB terbesar di Indonesia, dan data dari www.internetworldstats.com, bahwa Indonesia menempati posisi keempat di Asia.¹⁹

**Asia Top Internet Countries
March 31, 2011**



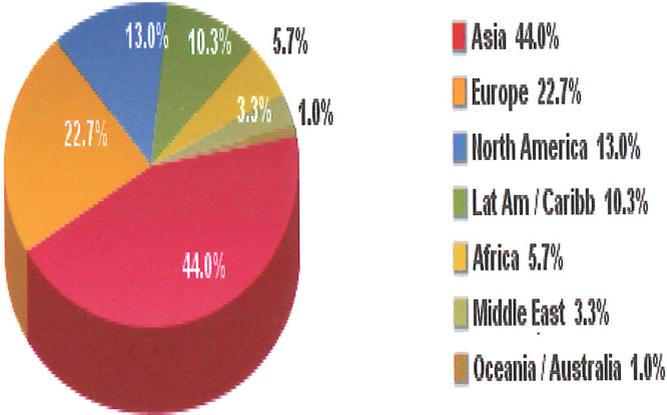
Source: Internet World Stats - www.internetworldstats.com/stats3.htm
 2,095,006,005 Internet users in the World estimated for 2011 Q1
 Copyright © 2011, Miniwatts Marketing Group

Dalam kesempatan yang berbeda Gun Gun Heryanto mempresentasikan bahwa penggunaan FB untuk isu politik berkembang untuk paling tidak dua hal. Yang pertama adalah penggunaannya untuk kepentingan agen politik, baik partai maupun partisannya untuk mengangkat isu yang mereka anggap penting. Yang

¹⁹Gun Gun Heryanto, 2009, sudah diterbitkan di *Seputar Indonesia*, 7 November 2009 dan diterbitkan juga di <http://www.uinjkt.ac.id/index.php/section-blog/28-artikel/1117-ruang-publik-komunitas-virtual.html>. Diunduh 15 September 2011.

kedua adalah penggunaan media sosial sebagai ekspresi kelompok penekan. Pada isu yang kedua inilah, kajian tentang Cicak dan Buaya mendapatkan porsinya yang menarik. Gun Gun Heryanto meramalkan potensi media sosial di dalam urusan masyarakat sipil di Asia akan berkembang cepat dan dapat menghasilkan *posting* yang menarik. Perkembangan pasar media sosial di Asia adalah yang terbesar, dan memperlihatkan pasar yang agresif untuk berkembang.²⁰ Pasar yang berkembang dalam hal ini tidak terbatas pada pemahaman pasar secara ekonomis akan tetapi juga dalam pemahaman politis. Dalam pemahaman politik, maka perkembangan ini akan menarik bagi fenomena cyberdemokrasi.

Internet Users in the World Distribution by World Regions - 2011



²⁰Diambil dari presentasi Gun Gun Haryanto di PMB-LIPI, 10 Januari 2012, berdasarkan izin yang bersangkutan.

Walaupun demikian, data di bawah ini memperlihatkan penetrasi internet di Asia masih terbatas karena hanya 23.8% saja dibandingkan dengan Australia. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari fasilitas dan teknologi yang dimiliki oleh negara tersebut.

WORLD INTERNET USAGE AND POPULATION STATISTICS						
March 31, 2011						
World Regions	Population (2011 Est.)	Internet Users Dec. 31, 2000	Internet Users Latest Data	Penetration (% Population)	Growth 2000-2011	Users % of Table
<u>Africa</u>	1,037,524,058	4,514,400	118,609,620	11.4 %	2,527.4 %	5.7 %
<u>Asia</u>	3,879,740,877	114,304,000	922,329,554	23.8 %	706.9 %	44.0 %
<u>Europe</u>	816,426,346	105,096,093	476,213,935	58.3 %	353.1 %	22.7 %
<u>Middle East</u>	216,258,843	3,284,800	68,553,666	31.7 %	1,987.0 %	3.3 %
<u>North America</u>	347,394,870	108,096,800	272,066,000	78.3 %	151.7 %	13.0 %
<u>Latin America / Carib.</u>	597,283,165	18,068,919	215,939,400	36.2 %	1,037.4 %	10.3 %
<u>Oceania / Australia</u>	35,426,995	7,620,480	21,293,830	60.1 %	179.4 %	1.0 %
WORLD TOTAL	6,930,055,154	360,985,492	2,095,006,005	30.2 %	480.4 %	100.0 %

Atau bandingkan dengan North America—atau Amerika yang memiliki penetrasi internet yang paling tinggi yaitu 78.3%.

Khusus untuk perkembangan FB, yang dianggap sebagai perkembangan yang menakjubkan, masih berdasarkan data yang diangkat oleh Gun Gun Heryanto. FB memperlihatkan perkembangan yang luar biasa dengan penambahan akun baru 150.000 orang perhari, 50,6 miliar pengunjung, 70 pengguna yang *login* setiap hari, 1,7 miliar pengguna photo, 2,2 miliar *men-tag* teman, lebih dari 100.000 gambar yang diunduh setiap hari dan nilai ekonomi dari situs ini adalah 15 miliar dolar (data diperoleh dari Allfacebook.com). Berdasarkan data dari survei Kompas, di Indonesia pengguna FB menduduki posisi

paling populer dengan 95.4%, yang diikuti oleh *twitter* dengan 40.5%. Artinya posisi FB sebagai jejaring sosial memungkinkan untuk penggunaan yang kreatif termasuk mendiskusikan dan mengekspresikan pandangan politik.

2.3 Demokrasi *Online* dan *Offline*

Dalam bukunya *Oposisi Maya*, Putut EA mengakui keghairahan masyarakat menggunakan jaringan komunikasi dalam mengekspresikan pandangan politiknya.²¹ Putut EA melihat grouping seperti dukungan terhadap Bibit-Chandra sebagai sebuah perkembangan ‘baru’ yang penting untuk diperhatikan. Dalam pendapatnya:

“Masyarakat kemudian menemukan alat ekspresi ketidakpuasan itu dalam bentuk yang sangat ideal: cepat, interaktif dan masif”.²²

Meskipun tampak kagum, akan tetapi Putut EA masih memberikan ruang untuk mempertanyakan fenomena itu, dengan menggambarkan konteks Bonoisasi. Berdasarkan paparannya, Bonoisasi adalah “...merujuk pada kasi sosial selebritis yang ‘hanya’ mengeluarkan pernyataan politik di atas panggung lalu mengumpulkan uang untuk kemudian dibagi-bagikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan”.²³

Internet dalam hal ini masih dilihat sebagai mekanisme yang memungkinkan kemungkinan sebagai corong suara. Sehingga yang penting adalah ekspresi apa yang disuarakan oleh media ini.

“Yet, we must not lose sight that the driving force of this interactivity and its concomitant potential for extending

²¹Putu EA. (editor). 2010. *Oposisi Maya*. Insist Press, dalam pengantar.

²²*Ibid* Putu EA (editor). 2010. Hlm. vii.

²³*Ibid* Putu EA (editor). 2010. Hlm. ix.

*egalitarian values is not the internet itself but the voice it gives to our civic disposition”.*²⁴

Menarik untuk melihat penekanannya pada kebutuhan “civic” atau warganegara secara umum. Meletakkan masalah ini di dalam konteks Indonesia merupakan sebuah konteks yang menarik. Kegiatan ini sering dikaitkan dengan keberadaan kelas menengah. Kelas menengah adalah kelas yang sulit didefinisikan, kecuali itu kelas menengah juga kelas yang terfragmentasi pada banyak hal, seperti konsumerisme seiring dengan berkembangnya perekonomian. Selain itu, tekanan etik menjadi profesional juga membuatnya sibuk dengan pekerjaan, belum lagi target keluarga bahagia dan sejahtera. Dalam konteks politik di Indonesia, kelas ini menjadi sasaran dari politik massa mengambang, yang berimbas pada terkikisnya akar-akar tradisional kekeluargaan, politik, sosial dan ekonomi. Kalaupun berkembang, keterkaitannya adalah pada masalah kemanusiaan seperti saling memperhatikan, berdonasi, bekerjasama, berbuat baik dan sebagainya.

Kelas ini memiliki kemampuan karena pendidikan, pekerjaan dan kemampuan ekonomi secara rata-rata, untuk terlibat di dalam politik di Indonesia. Keterlibatan mereka memiliki jarak karena kegiatan mereka yang tidak berada di dalam jalur politik. Kelas menengah yang sekarang ini berkembang di Indonesia, adalah kelas yang dekat dengan teknologi karena mereka berada di dalam situasi perkembangan teknologi, dalam kasus ini adalah teknologi informasi dan komunikasi, seperti telepon selular, komputer, kamera dan sebagainya.

Masyarakat kelas menengah dan dinamika perkembangan yang mengikutinya merupakan satu elemen penting yang perlu dilihat dalam konteks ini. FB di dalam kasus ini menjadi laman di mana mereka yang secara kategorikal dapat dimasukkan sebagai masyarakat kelas

²⁴Douglas Rushkoff. 2003. *Open Source Democracy*. How Online Communication is Changing Offline Politics, <http://rushkoff.com/wp-content/downloads/opensourcedemocracy.pdf>. Diakses 22-2-2011. hlm 14.

menengah. Mereka menggunakan laman ini dengan kreatif, berjualan yang terkenal dengan jenis toko 'online', yang sekarang ini marak berkembang. Mereka juga menggunakan laman ini untuk kebutuhan berjejaring sosial awalnya dan kemudian berkembang lebih jauh menjadi berjejaring untuk kebutuhan dinamika politik juga.

Kasus seperti Bibit-Chandra merupakan salah satu bentuk partisipasi publik, di mana mereka mengekspresikan pandangan baik komentar ringan maupun ulasan yang cukup panjang. Laman FB menjadi laman di mana kasus Bibit-Chandra dikompilasi dengan berbagai alasannya seperti kronologis perkembangan kasus, dan sebagainya.

Penelitian Internet Bukan Hal Baru

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus. Studi kasus yang memperlihatkan penegakan demokrasi melalui media baru (*cyberdemocracy*) diterapkan. Dalam hal ini masalah yang berkaitan dengan kasus Cicak versus Buaya. Di dalam demokrasi *online*, informasi dari Putut EA antara lain adalah perkembangan "Gerakan 1.000.000 *Facebookers* Dukung Chandra Hamzah & Bibit Samad Riyanto", pada 29 Oktober 2009 pendukungnya 33.000 dan pada hari selanjutnya sudah mencapai 113.000. Bahkan Usman Yasin, pembuat gerakan ini, merasa kagum terhadap perkembangan ini.²⁵ Putut EA menyatakan isu ini dikomentari melalui *twitter* dengan judul '#dukungkpk', kemudian *blog* seperti *bebaskanbibitchandra.wordpress.com*. Informasi ini merupakan salah satu akses yang akan dikaji. Cara seperti ini adalah metode pencarian informasi yang dinamakan *snowball*. Selain itu, upaya membedah teks internet menggunakan cara *virtual ethnography* yang dipadukan dengan metafora untuk mengartikan teksnya. Metode-metode ini dipergunakan untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam penelitian tentang internet.

²⁵*Ibid* Putu EA (editor). 2010, hlm. 17.

Phenomena sosial yang muncul dalam kasus atau adanya kecenderungan baru tampil di internet ataupun melalui internet, masih dianggap sesuatu yang baru sebagai sebuah isu dalam penelitian. Oleh karena itu, dalam beberapa segi, penelitian tentang internet tampak baru, karena umumnya orang melakukan penelitian yang disebut dengan penelitian lapangan. Di dalam metodologi akan dijelaskan tentang kaitan antara lapangan dengan penelitian internet, akan tetapi yang penting untuk diketahui adalah penelitian ini bukan baru sama sekali. Sudah ada orang yang melakukan penelitian seperti ini. Nancy K Baym mengupasnya di dalam tulisan *Finding the Quality in Qualitative Research* untuk mengantisipasi pertanyaan metodologi tentang penelitian internet. Bahkan Baym memperlihatkan beberapa hal yang menjadi keunggulan dari penelitian jenis ini. dalam kata-katanya:

“There are, I think, at least six interrelated strengths they share: they are grounded in theory and data, they demonstrate rigor in data collection and analysis, they use multiple strategies to get data, they take into account the perspective of participants, they demonstrate awareness of and self reflexivity regarding the research process, and they take into consideration interconnections between the internet and the life world within which it is situated”.²⁶

Artinya meskipun banyak orang yang membuat klaim tentang kemutakhiran penelitiannya sebenarnya penelitian sudah berkembang penelitian sejenis dengan berbagai macam pendekatan dan metode. Tulisan Baym ini sendiri merupakan sebuah *review* terhadap perkembangan penelitian internet. Namun dia mengutarakan beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh peneliti jika ingin meneliti tentang internet. Yang pertama adalah penelitian seperti ini dapat menggunakan pendekatan dan metode yang sudah lama berkembang, walaupun di dalam penggunaannya terdapat beberapa adaptasi. Dasar yang dikemukakan oleh Baym adalah “...*technology does not reinvent social*

²⁶Nancy K. Baym. 2006. *Finding the Quality in qualitative Research*. Dalam David Silver, Adrienne Massanari (eds), *Critical Cyber-Culture Studies*. New York: New York University Press, hlm. 82.

world”,²⁷ meskipun terdapat beberapa penyesuaian. Pendapat Baym yang perlu diperhatikan oleh peneliti internet adalah dibutuhkan perhatian untuk pengambilan data, karena sesuatu yang tampak baru, mengharuskan adanya pengamatan yang terus menerus terhadap perkembangan ini. Selain itu, dibutuhkan juga upaya untuk mewawancarai atau mendiskusikan perkembangan baru ini dengan penggunanya.

Teks Internet

Metode penelitian teks internet pada penelitian ini menggunakan cara yang dikembangkan oleh Christian Hine yang berjudul *Virtual Ethnography*. Dasar penggunaan dari metode ini berkaitan dengan kasus yang hendak dikaji yaitu Cicak dan Buaya. Menurut Hine metode ini dipergunakan karena “...*the object of virtual ethnography is a topic not a location*”.²⁸ Buku ini menjadi sumber utama dari *virtual ethonography* yang dipergunakan untuk menggarap teks yang diunduh melalui internet.

Metode ini menarik untuk dilakukan karena metode ini memberikan kemungkinan untuk memaparkan dengan rinci dan dalam. Metode ini memberikan kesempatan untuk berpetualang di dalam situasi yang masih ‘asing’ baik karena sumber informasinya maupun karena informasi itu sendiri. Selain itu,

*“Rather than being the record of objectively observed and pre-existing cultural object, ethnography have been reconceived as written and unavoidable constructed accounts of objects created through disciplinary practice and the ethnographer’s embodied and reflexive engagement”.*²⁹

Paparan metodologi ini menjadi sangat penting karena paparan ini tidak hanya menggambarkan adanya subjek ‘baru’ dari *ethnography*

²⁷*Ibid* Baym. 2006, hlm. 83.

²⁸Christine Hine. 2000. *Virtual Ethnography*. London: Sage publication, hlm. 67.

²⁹*Ibid* Hine. 2000, hlm. 42.

akan tetapi juga memperlihatkan perkembangan metode penelitian ini. Hal pertama yang menurut Hine penting untuk dibahas adalah kaitan antara *virtual ethnography* dengan interaksi *face to face*. Pada awalnya *ethnography* memang menggarap subjek penelitian dalam interaksi *face to face* dan menggarap budaya dalam lokasi tertentu. Dengan adanya internet maka interaksi mendapatkan tambahan bentuk yaitu interaksi dengan mediasi (*mediated interaction*) yang menjadi bagian dari *computer mediated communication* (CMC). Selain itu, *ethnography* berkaitan erat dengan kebiasaan *travel* atau melakukan sebuah perjalanan mendatangi lokasi tertentu. Dalam konteks internet, maka perjalanan, tidak bermakna perjalanan fisik tetapi merupakan sebuah pengalaman (*experiential*). Hal ini dimungkinkan dengan adanya perkembangan jaman di mana perjalan tidak lagi seperti awal penggunaan metode ini.

Metode ini mengasumsikan adanya otoritas *ethnographer* yang melakukan analisa interpretasi dan penulisan tentang budaya pada lokasi tertentu. Selain itu, di dalam metode ini diperlihatkan bahwa *ethnographer* juga melakukan observasi terlibat (*participant observation*) yang memperlihatkan pengalaman dan pengetahuannya memahami budaya tertentu.

Melakukan metode *ethnography* dalam dunia maya merupakan sebuah upaya pemahaman yang asimetri dalam pengertian *ethnographer* menggunakan berbagai macam cara untuk melakukan interpretasinya. Di dalam metode *ethnography* yang konvensional, peneliti berada dalam hubungan yang simetri dengan sumber informasinya. Simetri dalam pengertian peneliti menggunakan bahasa yang sama dengan sumber informasinya. Ada pula peneliti dunia maya yang berusaha untuk bertemu *offline* sebagai upaya untuk mendekatkan diri dengan subjek informasinya.

Untuk mempermudah, Hine membuat beberapa patokan di dalam upaya untuk menggarap teks yang ada.

- (1) Peneliti terkait pada kehidupan dari sumber informasi yang akan dipaparkan secara *ethnography*. *Virtual ethnography* merupakan

alat untuk memahami kehidupan yang ditampilkan di dalam internet, karena “... *internet as a way of communicating as an object within people’s lives and as a site for community like formation is achieved and susstained in the ways in which it is used, interpreted and reinterpreted*”.³⁰

- (2) Internet adalah budaya dan juga artefak budaya, di dalam hal ini *cyberspace* atau dunia maya adalah sebuah ruang yang interaktif terhadap kehidupan nyata.
- (3) Internet merupakan ‘*mediated interaction*’ yang menjadi kesempatan untuk melakukan paparan *ethnography* dari interaksi yang *mobile*.
- (4) Pertanyaan tentang ‘*field*’ atau lapangan merupakan sebuah pertanyaan dari penggunaan metode ini, akan tetapi metode ini menekankan tentang ‘*flow and connectivity*’ dibandingkan sebuah *field* yang sudah jelas batas-batasannya.
- (5) Melakukan *ethnography* virtual merupakan upaya untuk mengkaitkan apa yang terjadi di ruang maya (*virtual*) dan yang terjadi di dalam kenyataan (*real*). Hal penting yang perlu diperhatikan adalah kaitan antara ‘*time, space and ingenuity*’
- (6) *Ethnography virtual* merupakan sebuah celah (*interstitial*) di mana posisi mereka yang melakukan upaya *ethnography* berkesesuaian dengan subjek yang dikaji, sehingga keterlibatan peneliti sesekali terjadi.
- (7) *Ethnography* virtual adalah paparan yang partial dalam pengertian dia tidak dapat menggambarkan kehidupan subjek informasinya secara holistik dari subjek informasi, lokasi dari budaya dan budaya itu sendiri.
- (8) Melakukan *Virtual ethnography* berarti melakukan upaya intensif terhadap ‘*mediated interaction*’. Keterlibatan etnographer pada sumber informasi merupakan sebuah upaya eksplorasi dan juga merupakan sebuah intuisi. Pelaku *ethnography* berinteraksi pada sumber informasi dan juga pada teknologi, dalam hal ini internet.

³⁰*Ibid* Hine, 2000, hlm 64.

- (9) Meskipun hubungan *ethnographer* dengan sumber informasi tidak intensif dalam pengertian keduanya memiliki jarak dan waktu, akan tetapi teknologi memberikan kemungkinan untuk saling berhubungan. *Virtual ethnography* berpendapat bahwa interaksi tidak terbatas pada hubungan *face to face* saja, melainkan juga “...in, of and through virtual”.
- (10) *Virtual ethnography* adalah metode penelitian yang adaptif terhadap kondisi yang ada. *Virtual ethnography* sesuai dengan tujuan praktis mengeksplorasi hubungan dari “*mediated interaction*” atau interaksi termediasi.

Wacana, Analisa Teks

Istilah *wacana* menjadi umum dipakai dewasa ini dalam berbagai disiplin ilmu: teori kritis, sosiologi, linguistik, filsafat, psikologi sosial, dan berbagai bidang lain sehingga seringkali jarang didefinisikan dan secara sederhana dianggap sebagai pengetahuan umum semata. Bahkan, dalam disiplin ilmu tertentu pun istilah ini begitu cair pemaknaannya. Crystal (1987: 116) mendefinisikan analisis wacana yang dikontraskan dengan analisis teks. Wacana sering pula didefinisikan dengan apa yang bukan wacana, apa yang menjadi oposisi wacana. Wacana seringkali ditandai melalui perbedaannya dengan serangkaian istilah: teks, kalimat, dan ideologi. Benveniste (1971: 110), mengontraskan wacana dengan “sistem bahasa.” Kemudian dia memberikan ciri khusus wacana sebagai ranah komunikasi, tetapi terus mengontraskan wacana dengan sejarah atau cerita.

Berdasar hal itu, Sara Mills (1997: 7) menyatakan bahwa wacana tidak dapat diharapkan memiliki satu makna karena memiliki sejarah kompleks dan ini digunakan dalam perbedaan cara yang berbeda oleh para pakar yang berbeda. Foucault (1972: 80) memberikan rentang makna wacana sebagai (i) Semua ranah umum dari semua pernyataan,” sehingga semua ujaran atau teks yang memiliki makna dan memiliki pengaruh dalam dunia nyata disebut wacana; (ii) Kelompok pernyataan yang dapat dipisahkan sendiri-

sendiri. Definisi ini sering digunakan Foucault ketika mendiskusikan struktur khusus dalam wacana; (iii) Kelompok ujaran yang tampak teratur yang memiliki koherensi dan daya. Ini biasanya berkaitan dengan istilah seperti wacana feminitas, wacana imperialism, dan sebagainya. Dari sejumlah pengertian itu, satu pengertian yang banyak digunakan para pakar, yaitu *"a regulated practice which accounts for a number of statements."*

Menurut Sara Mills (1997), cara terbaik untuk mengkaji istilah *wacana* ialah melihat bagaimana istilah itu digunakan dalam hubungannya dengan pembahasan kekuasaan, pengetahuan dan kebenaran, karena ketiganya menjadi dasar wacana. Relasi kuasa dengan ilmu pengetahuan, relasi kuasa dengan kebenaran dan otoritas memunculkan konsep politik pengetahuan. Kekuasaan secara sederhana merupakan pencegahan seseorang untuk melakukan keinginan mereka dan pembatasan kebebasan seseorang. Analisis Foucault tentang kekuasaan ialah kekuasaan tersebar ke dalam seluruh hubungan sosial yang menghasilkan berbagai kemungkinan bentuk perilaku begitu juga perilaku membatasi.

Salah satu cara paling produktif untuk membahas wacana ialah bukan sebagai tanda-tanda atau serangkaian teks, tetapi sebagai "praktik yang secara sistematis membentuk objek yang mereka bicarakan (Foucault 1972: 49). Dalam pengertian ini, wacana dipahami sebagai sesuatu yang menghasilkan sesuatu juga seperti ujaran, konsep, pengaruh daripada dipahami sebagai sesuatu yang dapat dianalisis dalam keterisolasian. Wacana bukan sesuatu yang membeku atau statis. Foucault lebih jauh menyatakan bahwa setiap zaman memiliki dan mendefinisikan wacananya sendiri. Selain itu, definisi-definisi berubah secara radikal dari satu periode ke periode lain (terjadi keretakan episteme dan diskontinuitas).

Di bawah ini adalah penjelasan tentang metafora yang dipergunakan untuk membantu melakukan analisa wacana yang sudah dijelaskan di atas ini. Metafora menjadi menarik, karena setelah melihat bahan yang ada, di dalam teks internet terdapat kata-kata sederhana,

pendek, gambar, sebutan yang mengungkapkan keterangan yang bisa panjang. Kata-kata di dalam teks internet cenderung pendek, singkat, penuh ungkapan disebabkan pula oleh keterbatasan dari ruang penulisan tersebut. Selain itu, pola interaksi seperti percakapan diterapkan di dalam teks. Oleh karena itu, teks internet berpola demikian, di mana bahasa percakapan ditekskan.

Metafora dikaji dari berbagai sudut pandang. Bahkan, menurut Ricoeur (1976), teori metafora datang kepada kita dari ahli-ahli retorik kuno, tetapi teori ini tidak akan mengisi peran yang kita harapkan darinya tanpa suatu revisi penting, yakni mengalihkan masalah metafora dari semantik kata ke semantik kalimat. Dalam tradisi retorik kuno itu, ada enam hal yang patut dicatat. *Pertama*, metafora adalah trope, majas wacana yang berkenaan dengan denominasi. *Kedua*, metafora menggambarkan perluasan makna suatu nama melalui penyimpangan dari makna harfiah kata-kata itu. *Ketiga*, alasan untuk penyimpangan itu adalah persamaan. *Keempat*, fungsi persamaan itu ialah mendasari substitusi makna figuratif suatu kata di tempat makna harfiah, yang dapat digunakan di tempat yang sama. *Kelima*, makna yang diganti tidak menggambarkan inovasi semantik apa pun. Kita dapat menerjemahkan suatu metafor, yaitu mengganti makna harfiah dengan makna figuratif. Hasilnya substitusi plus restitusi sama dengan kosong. *Keenam*, karena ia tidak menggambarkan inovasi semantik, metafora tidak memberikan informasi baru apa pun tentang realitas. Itulah sebabnya ia dapat dianggap sebagai salah satu dari fungsi-fungsi emotif wacana. Praanggapan retorik klasik itu dipertanyakan oleh berbagai hasil kajian semantik modern mengenai metafor. Ricoeur sendiri berdasarkan pemikirannya yang mendalam menghasilkan dua simpulan yang sangat bertentangan dengan praanggapan retorik klasik. *Pertama*, metafora *real* tidak dapat diterjemahkan. Hanya metafora substitusi yang dapat menerima terjemahan yang dapat mengembalikan makna harfiahnya. Metafora ketegangan tidak dapat diterjemahkan karena metafora itu menciptakan maknanya sendiri. Ini tidak berarti bahwa metafora ketegangan tidak dapat diparafrasakan. Hanya saja, parafrasa semacam itu tidak terbatas dan tidak mampu menjelaskan

makna inovatifnya. *Kedua*, metafora bukanlah hiasan wacana. Metafora memiliki lebih dari sekadar nilai emotif karena metafora mampu memberikan informasi baru. Suatu metafor, singkatnya, menceritakan kepada kita sesuatu yang baru tentang realitas.

Berbagai kajian akhirnya mengerucut pada adanya pemahaman metafora dalam pengertian sempit dan pengertian luas. Dalam arti sempit, metafora merupakan salah satu majas perbandingan, yaitu majas perbandingan yang dinyatakan secara implisit. Sementara itu, metafora dalam arti luas mencakup lebih dari satu jenis majas yang terdapat dalam klasifikasi tersebut. Sejumlah teori yang dapat dianggap sebagai pendukung teori metafora dalam arti luas antara lain ialah penganut teori konotasi, teori interaksi, teori pragmatis, dan teori antropologi. Dalam teori konotasi, arti kata yang digunakan secara metaforis dapat dijelaskan dengan dasar makna konotasinya. Dalam teori interaksi, makna metafora dapat diperoleh berdasar interaksi fokus dan tenor. Esensi metafora adalah kemustahilan dan ketidakbenaran. Dalam teori pragmatis, untuk dapat mengerti tuturan metaforis, seseorang tidak hanya memerlukan lebih dari sekadar pengetahuan tentang bahasa, tetapi juga membutuhkan kesadaran akan kondisi tuturan itu dan asumsi yang melatari tuturan tersebut yang sama-sama dimiliki oleh pembicara dan pendengar. Secara ringkas tuturan metaforis adalah: pembicara mengucapkan S (topik yang dibicarakan) adalah P (unsur metaforis yang digunakan untuk menjelaskan topik), tetapi memaksudkan S adalah R (maksud tuturan tersebut yang memenuhi salah satu kriteria yang terdapat dalam delapan prinsip yang dikemukakan oleh Searle).

Karena kajian ini adalah kajian yang mendasarkan diri pada kajian interdisipliner linguistik antropologi, bahasan tentang metafora yang bersumber dari teori antropologi mendapat porsi paparan yang jauh lebih banyak. Ancangan antropologi berusaha mencari sumber bahasa dari dunia tempat manusia berpijak, yaitu tempat yang berupa pikiran maupun fisik, kepercayaan maupun perbuatan manusia. Dalam hal ini, nama Lakoff dan Johnson (1980) melalui bukunya *Metaphors We Live By* tidak bisa diabaikan. Dalam pendapat mereka, metafora

adalah ungkapan kebahasaan yang menggunakan satu hal atau benda untuk menjelaskan suatu hal atau benda yang lain. Manusia sering tidak menyadari bahwa sistem konseptual yang mendasari pikiran dan tindakan manusia sehari-hari sebenarnya bersifat metaforis. Sistem konseptual itu dapat dilihat, salah satunya, melalui bahasa. Konsep metaforis didasari oleh suatu sistem, yaitu suatu hal dibicarakan dengan menggunakan sudut pandang hal yang lain, yang berkaitan dan membentuk suatu sistem. Konsep metaforis tersebut mengikuti pola tertentu. Konsep metaforis itu didasari oleh pengalaman manusia, baik pengalaman budaya maupun pengalaman fisik. Contoh pengalaman budaya yang mendasari konsep metaforis ialah konsep *waktu* bagi orang Barat. Sementara itu, contoh pengalaman fisik yang mendasari konsep metafora ialah konsep *atas-bawah* yang melahirkan banyak metafor.

Lakoff dan Johnson (1980) membagi metafora ke dalam tiga kelompok, yaitu metafora struktural, orientasional (spasial), dan metafora ontologis. Metafora struktural adalah ungkapan kebahasaan yang memperlihatkan bahwa suatu konsep terstruktur secara metafora dipandang dari segi konsep lain. Metafora orientasional (spasial) merupakan metafora yang berorientasi spasial seperti atas-bawah, luar-dalam, depan-belakang, pusat-pinggiran. Metafora ontologis ialah metafora yang memandang kejadian, kegiatan, emosi, ide, dan sebagainya sebagai maujud atau substitusi. Metafora ontologis berdasarkan pada pengalaman dengan objek fisik, terutama tubuh manusia. Personifikasi merupakan metafora ontologis yang paling nyata.

Lakoff dan Johnson mengklasifikasi metafora ke dalam metafora konvensional dan metafora baru. Ketiga metafora di atas adalah metafora konvensional, yaitu metafora yang menyusun sistem konseptual masyarakat pemakai bahasa. Sementara itu, metafora baru ialah metafora imajinatif dan kreatif, yaitu metafora yang dapat memberikan pengertian baru pada pengalaman masyarakat pemakai bahasa. Selain itu, mereka juga mengklasifikasi metafora ke dalam ungkapan metaforis yang bersistem dan ungkapan metaforis

ideosinkresi, yang berdiri sendiri dan tidak digunakan dalam rangka suatu sistem dalam bahasa dan pikiran pemakai bahasa. Terakhir mereka membedakan metafora mati dan metafora hidup. Metafora hidup terdiri atas ungkapan-ungkapan metaforis yang merupakan refleksi dari konsep metaforis yang sistematis. Namun, dalam perkembangannya, batas antara metafora mati dan hidup sangat tidak pasti. Tidak seperti teori metafora lain, teori yang dikembangkan Lakoff dan Johnson tidak berbicara tentang bagian-bagian yang membentuk metafor.

Meskipun tulisan Lakoff dan Johnson tentang metafora sangat terkenal, terutama di bidang antropologi dan linguistik kognitif, teori konseptual tentang metafora mendapatkan sejumlah pertanyaan kritis seperti dikemukakan Croft dan Cruse (2004: 193-221). *Pertama*, secara sederhana, bagaimanakah cara terbaik mendeskripsikan pemetaan metaforis tertentu. Contohnya ialah metafora yang dikemukakan Lakoff dan Johnson (1980: 46): *An Argument/Theory Is A Building*. Hal itu memunculkan sejumlah ungkapan metaforis seperti “kita perlu membangun argumen yang kuat untuk itu” dan “Argumennya mulai goyah.” Namun, ungkapan lain yang memiliki pengacuan terhadap *Building* tidak dapat digunakan untuk diikutsertakan dalam pembentukan ungkapan metaforis sehingga tidak ada ungkapan “Teori ini memiliki jendela.” Hal ini menimbulkan simpulan bahwa metafora bervariasi dalam produktivitas. *Kedua*, analisis skematik Lakoff memunculkan pertanyaan: metafora manakah yang merupakan metafora lebih dasar, lebih spesifik, dan lebih skematis pada pemahaman manusia. Untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus membahas aspek lain dulu, yaitu struktur konseptual apa yang dipetakan dalam metafora. *Ketiga*, bagaimanakah hubungan metafora konvensional dengan penciptaan kebiasaan baru? Lakoff dan Johnson (1980: 52-53) menyatakan bahwa metafora baru merupakan perluasan dari metafora konvensional yang sudah ada. Pada akhirnya, hal itu memunculkan penyangkalan bahwa sebenarnya hanya akan ada perbedaan tingkat antara metafora konvensional dan metafora baru.

Untuk menentukan apakah suatu ungkapan merupakan metafora atau bukan, tidak dapat dilakukan hanya dengan melihat ungkapan tersebut secara terpisah atau tanpa konteks. Memang ada sejumlah metafora yang langsung dapat diketahui karena komponen-komponen yang menyusun metafora tersebut memperlihatkan sesuatu yang ganjil dan tidak berterima secara harfiah. Akan tetapi, ada kalanya suatu ungkapan terlihat harfiah jika dipahami tanpa konteks, tetapi jika dipahami dengan memperhatikan konteksnya ternyata ungkapan tersebut adalah ungkapan metaforis. Fakta ini dijelaskan oleh Beekman dan Callow (1974: 127) dengan menggunakan istilah penyimpangan kolokasi tersembunyi.

Teks yang dikumpulkan informasi yang diambil dari para FB yang berhubungan dengan kasus Cicak versus Buaya, yang juga muncul dalam blog. Informasi ini adalah informasi online. Selain itu, peneliti juga akan melakukan wawancara dengan informan yaitu para analis media dan para pengguna FB tentang penggunaan jejaring FB. Informasi ini merupakan paparan fenomena *offline* yang berkaitan dengan kasus. Wawancara akan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara untuk melihat kecenderungan orang di dalam menggunakan FB dan gadget penunjang seperti komputer dan telepon selular.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis wacana model Sara Mills. Model Sara Mills adalah model yang memiliki mekanisme analisa teks yang sesuai dengan teks di dalam FB. Bahasa yang tampil di FB adalah bahasa percakapan yang ditekskan sehingga memungkinkan untuk memahami bentuk argumentasinya. Bentuk argumentasi ini merupakan epistem yang menggambarkan masalah sosial dan politik yang dipahami oleh para pengguna FB. Melalui cara ini maka analisa ini dapat menggambarkan paparan pemikiran yang muncul di FB.

Dalam paparan di atas peletakkan wacana sebagai bagian dari kerangka berpikir merupakan bagian dari perkembangan metode, di mana teori yang digunakan merupakan metode penelitian yang

diterapkan. Perspektif seperti ini diharapkan dapat mengangkat isu kontemporer di dalam pengetahuan yang sudah beredar di dalam masyarakat. Sebagai cara awal diharapkan dengan metode Sara Mills tim dapat memperlihatkan pengetahuan yang tumbuh di dalam masyarakat yang belum disadari oleh *mainstream* politik. Untuk mempermudah melihat dan menginterpretasi hasil yang ada maka kajian ini seperti telah disebutkan di atas menggunakan metafora. Metafora merupakan upaya untuk memposisikan teks yang ada sebagai teks yang signifikan di dalam wacana korupsi.

Selain itu, dengan memasukkan demokrasi *offline* di dalam analisa berarti melihat konteks perkembangan demokrasi di *online* seperti FB dengan fakta empirik. Mekanisme ini juga telah dilakukan pada tahun sebelumnya. Hanya saja dengan peningkatan pengetahuan maka pada tahun ini akan diupayakan wawancara dengan komunitas *cyber* dan tentu saja komentar dari akademisi tentang perkembangan ini. Wawancara dilakukan di Jakarta, Bandung, dan Jogja. Dengan alasan bahwa kota-kota ini merupakan kota yang menjadi tempat di dalam gerakan sosial, merupakan barometer politik nasional serta memiliki aktivitas cyberpolitik.

Keterbatasan Kajian

Dalam disain awalnya, penelitian ini memfokuskan diri pada situs Satu Juta Tanda Tangan Dukung Bibit Chandra. Sebagaimana telah disebutkan bahwa di dalam metode ini, bahwa ruang *cyber* adalah artefak budaya, sehingga situs tersebut diperlakukan sebagai artefak budaya. Namun terdapat beberapa perubahan, di antaranya adalah ketika penelitian ini dimulai pada sekiter bulan Juli, ternyata teks FB-nya sangat sulit untuk dilacak kembali dan hanya mendapatkan teks Mei-Juni 2011. Selain karena situs ini sudah dimulai sejak 2009, kementarnya pun banyak. Sehingga pelacakan kembali yang harus menggarap hari demi hari sudah sangat sulit untuk dilakukan.

Kondisi ini merupakan keterbatasan dari penelitian ini baik dari situsnya maupun dari upaya peneliti untuk mengikuti

perkembangannya. Akhirnya disepakati berdasarkan pertimbangan metodologi untuk mengikuti perkembangan yang mutakhir. Perkembangan terakhir dari kasus ini mencuat ketika Nasarudin mengindikasikan adanya aliran dana korupsi pada tokoh-tokoh KPK. Pertimbangan metodologis yang diangkat adalah kasus Nasarudin merupakan kasus yang masih bertautan dengan laman yang diangkat. Selain itu, kasus ini juga menggambarkan kasus terkini dari wacana korupsi yang menjadi daya tarik awal dari penelitian ini.

Perkembangan berjalan terus, dan ketika dalam proses lanjutan, kajian ini hendak mengikuti isi dari laman tersebut, yang terjadi adalah laman ini sudah putih. Artinya laman ini sudah dihentikan oleh adminnya. Tentu saja tim harus merubah kembali rujukan datanya. Perkembangan yang terakhir ini patut dicatat untuk memperlihatkan bahwa wacana korupsi bukan wacana yang mudah untuk dipantau. Perkembangan kasus Nasarudin ini yang merasuk pada jantung dari KPK merupakan pukulan terhadap perkembangan wacana anti korupsi di Indonesia.

Secara metodologis perkembangan yang terakhir ini, menjadi sangat berarti dalam kaitannya melihat wacana korupsi sebagai topik yang ditekankan oleh Hine dalam konteks metodologi. Interpretasi ini dilakukan untuk memposisikan perkembangan yang terakhir ini dan mengangkatnya sebagai peristiwa penting baik dalam wacana korupsi maupun dalam penelitian tentang CMC. Oleh karena itu, kajian ini menekankan pada wacana korupsi dan mengikuti komentar orang di dalam internet tentang kasus ini. Kasus yang diangkat tetap mengikuti kasus Satu Juta Tanda Tangan Dukung Bibit dan Chandra, dan kemudian diikuti oleh perkembangan terakhir seperti kasus Nasarudin.

Wacana korupsi sudah berjalan cukup lama, dan pertimbangan mengikuti kasus ini secara metodologis merupakan cara untuk memfokuskan pada perkembangan yang ada. Di dalam penelitian lapangan (*field*), cara seperti ini dapat dianalogikan dengan metode *snow ball*, hanya saja yang menjadi kontak person adalah topiknya bukan manusianya. Selain itu, mekanisme ini menggunakan

mekanisme internet. Kajian ini dimudahkan oleh mesin pencari informasi seperti *Google* yang membantu mengumpulkan laman yang lama yang isinya berkomentar terhadap dukungan Satu Juta Tanda Tangan Dukung Bibit-Chandra.

Simpulan

Kajian tentang perkembangan baru di dalam dunia internet merupakan dinamika kontemporer yang menarik. Perkembangan muncul melalui kasus-kasus baru, seperti perlawanan yang diungkapkan melalui wacana korupsi. Di dalam upaya untuk menangkap isu yang berkembang di dalam wacana, penelitian ini menggunakan metaphora yang berguna untuk mempermudah memaknai teks yang ada.

BAB III

CICAK DAN BUAYA SERTA PERSETERUANNYA

Pendahuluan

Bagian ini terdiri dari beberapa informasi, yang pertama adalah paparan kesejarahan kasus Cicak dan Buaya, kemudian seperti masukan yang diperoleh dari pembahasan yang menggambarkan perkembangan penggunaan dari media sosial seperti FB. Selain itu, informasi dari lapangan yang berisi pandangan tentang demokrasi dan memperlihatkan perhatian masyarakat terhadap perkembangan di ruang maya.

Kesejarahan Kasus Cicak versus Buaya

Paparan di bawah ini merupakan upaya untuk meletakkan gambaran kesejarahan masalah korupsi yang difokuskan pada kasus Cicak dan Buaya. Kasus ini dapat dianggap fenomenal dalam konteks cyberdemokrasi, karena keberhasilan menggalang partisipasi masyarakat untuk mendukung KPK. Keberhasilan ini terwujud pada dibebaskannya Bibit-Chandra sebagai ketua KPK yang ditahan Polisi.

Mengkerangkakan posisi KPK merupakan sebuah proses yang penting untuk memperlihatkan posisi-posisi yang tampil pada kasus ini. Kerangka ini penting untuk memaparkan kepentingan yang saling berseberangan. Seperti yang dijelaskan oleh Sarlito W Sarwono bahwa kasus ini adalah “hiperbol KPK lawan Polisi,³¹ yang belum tentu benar. Masalah ini memperlihatkan berkembang emosi yang tidak memperhatikan rasio lagi sehingga yang terjadi adalah pengambilan kesimpulan yang salah.

³¹ Sarlito Wirawan Sarwono. 2009. *Buaya Vs Cicak*. Kompas, 26 September 2009.

Bibit–Chandra dipermasalahkan karena laporan Polisi No 208/K-VII/2009 SPK Unit III tertanggal 6 Juli 2009, beberapa sumber menyatakan bahwa keduanya dipermasalahkan karena testimoni Antasari Azhar.³² Peran sutradara Anggodo Widjojo menyeruak ke publik ketika Ary Muladi berbicara. Tempo 15 November 2009 menggambarkan bagaimana rasa takut menyelimuti Ary Muladi, ketika lampu mati pada saat wawancara berlangsung. Menurut Tempo adalah wajar, karena Ary adalah saksi kunci pada tuduhan pemerasan dan penyalahgunaan wewenang yang dituduhkan pada Bibit–Chandra, dua ketua KPK. Awalnya Ary menyatakan bahwa dia menyerahkan Rp 5.1 M dari Anggoro Widjojo dan Anggodo Widjojo pada KPK melalui Deputy Bidang Penindakan KPK Brigjen (Pol) Ade Raharja. Tetapi selanjutnya Ary menyatakan bahwa dia berbohong dan tidak mengenal para ketua KPK.

Kasus ini menjadi semakin mengguncang ketika MK membongkar rekaman yang menggambarkan bagaimana Anggodo Widjojo menjadi penulis skenario sekaligus sutradara, sehingga mampu mengarahkan saksi yang disesuaikan dengan “...konstruksi fakta yang hendak dibangun Polisi”.³³ Menurut Ary Muladi, “Semua kronologi kasus ini memang dibuatkan Pak Anggodo”.³⁴ Berdasarkan alasan yang dikemukakan oleh Eddy Sumarsono, jurnalis yang pernah dimintakan oleh Anggodo untuk menjadi bagian dari skenario ini, menyatakan bahwa kepentingannya adalah supaya kedua saudara Widjojo lepas dari tuduhan. Sama-sama mengurus aliran dana, tetapi dengan delik penyuaipan kedua bersaudara itu akan masuk bui sedangkan dengan delik pemerasan mereka akan aman karena posisi mereka menjadi saksi korban.

KPK membantah tuduhan Polisi, bahkan kata Chandra “Saya membantah keras tuduhan telah menerima suap dan pemerasan. Ini fitnah yang sangat kejam. Saya bersedia bersumpah, demi sumpah apa

³² *Antasari Akan Jadi Tersangka*. 2009. Kompas 26 September 2009.

³³ *Skenario Menggurung Cicak*. 2009. Tempo 15 November 2009.

³⁴ *Ibid* Tempo 15 November 2009.

pun”.³⁵ Bantahan dilakukan setelah Kapolri menyatakan kasus ini atas laporan Ketua KPK Non-aktif Antasari Azhar. Kata Chandra dia tidak mengenal Anggoro Widjojo dan Ary Muladi dan tidak menerima satu miliar. Selain itu, tanggal yang disebutkan oleh Polisi tentang Bibit dan Chandra bertentangan dengan keberadaan Bibit yang kala itu berada di luar negeri, dan Chandra berada di kantor. Ketika disidik Polisipun keduanya tidak ditanya tentang tuduhan pemerasan dan penyuapan.

Tumpak Hatorongan menyatakan bahwa pemberantasan korupsi adalah bagian dari semangat reformasi yang tertuang pada Tap MPR No XI Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan UU No 31 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tumpak menegaskan bahwa panda RUU pengadilan Tipikor seharusnya melihat konteks sejarah dari gerakan pemberantasan korupsi. Selain itu, Tumpak juga menyatakan bahwa pengalihan wewenang KPK tentang penuntutan pada Kejaksaan adalah salah mengartikan UU Kejaksaan. Penuntutan mengacu pada jaksa bukan lembaga Kejaksaan sehingga jaksa yang berada di KPK juga memiliki kewenangan yang sama dengan jaksa di Kejaksaan.

Posisi KPK diharapkan lebih berjarak dengan lembaga lain yang terkait pada pembentukannya yaitu Polisi. Hal ini terlihat pada pembahasan tentang penyidik independen yang dilatih sendiri oleh KPK, selama ini KPK mendapatkan penyidik dari Kepolisian. Upaya merekrut penyidik bukan dari Polisi sebenarnya didukung oleh peraturan yang ada. Posisi independensi penyidik menjadi perhatian karena beberapa kasus melibatkan Polisi sebagai institusi yang membuat posisi penyidik menjadi ‘tidak enak’.³⁶

Posisi Polisi berdasarkan catatan Tempo November 15, memiliki beberapa fakta seperti catatan penggunaan transportasi Bibit–

³⁵Kepala Polri Dibantah, Chandra dan Bibit Tidak Pernah Ditanya Tentang Penyuapan. 2009. Kompas 27 September 2009.

³⁶Bentuk Segera Penyidik Independen KPK. 2009. Kompas 12 oktober 2009.

Chandra, karcis parkir Ary Muladi, hubungan dekat antara MS Kaban dengan Chandra. Kapolri menegaskan “Ada pandangan perseteruan antara KPK dan Polri, ada balas dendam, ada upaya menggembosi, itu tidak benar. Saya katakan tak benar. Tegas saya nyatakan, itu tidak pernah ada” Kompas 26 September 2009. Posisi Susno Duadji akhirnya diperiksa oleh Polisi dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam kasus Bank Century dan penanganan Bibit-Chandra.³⁷ Di dalam penanganan ini tidak ditemukan gratifikasi dan juga tidak ditemukan penyalahgunaan kewenangan pada kasus Bibit Chandra, termasuk di dalamnya tidak ada intervensi pada penyidik. Susno juga menjadi saksi pada pengadilan Antasari, salah satu yang diungkapkannya adalah ketidaktahuannya tentang tim pencari teror terhadap Antasari Azhar.³⁸ Yang dianggap Susno mengetahui tim ini adalah mantan Wakabareskrim Mabes Polri Ir Jen Pol Hadiatmoko yang menjadi ketua pengawas penyidik. Kedatangan Susno di pengadilan tersebut dianggap inisiatif pribadi bukan atas nama institusi, karena datang pada jam kantor dan tidak membawa surat izin atasan.

DPR dalam masalah RU Tipikor menyatakan bahwa mereka tidak ingin melemahkan posisi KPK, bahkan ingin meletakkannya pada porsi yang benar. Pemikiran ini dinilai Todung Mulya Lubis adalah jawaban teoritis.³⁹ Sedangkan pihak Kejaksaan akan mengembalikan berkas Polisi tentang Bibit Chandra atas dasar kekuranglengkapan.⁴⁰

Publik Bereaksi

Masyarakat menunjukkan kemarahan dan kekesalannya dengan berbagai macam aksi. Salah satu di antaranya adalah dukungan Satu Juta Tanda Tangan melalui *Facebook* (FB).

³⁷Polri: *Profesioanl dan Sesuai Prosedur Hukum*. 2009. Kompas, 10 Oktober 2009.

³⁸Susno *Bersaksi untuk Antasari*. 2010. Replubika, 8 Januari 2010.

³⁹*Presiden Diminta Selamatkan KPK*. 2009. Kompas, 15 September 2009.

⁴⁰Polri: *Profesioanl dan Sesuai Prosedur Hukum*. 2009. Kompas, 10 Oktober 2009.

Di antara masalah Cicak dan Buaya terdapat masalah kadal yaitu publik di'kadali' atau dibohongi. Masalah ini dikemukakan oleh W Riawan Tjandra, setelah masalah Bank Century menjadi ajang koalisi antar partai.⁴¹ Berdasarkan paparannya pendekatan yang dipergunakan oleh para politisi tersebut adalah pendekatan Machiavelian. Dari penjelasannya penguasa dapat muncul sebagai orang baik maupun seseorang bernafsu binatang. Penguasa bertindak utilitarian, tidak perlu memperhatikan moral namun dapat terlihat murah hati pada saat-saat yang dibutuhkan. Bahkan penguasa boleh menyingkirkan orang yang mampu dan digantikan oleh orang yang asal ikut saja demi kekuasaan. Jika ingin melihat kepentingan yang ada di belakang peristiwa politik seperti cicak-buaya dan kadal maka perlu mengembangkan pendekatan genealogi, terutama jika ingin melihat moralitas yang ada. Situasi politik Indonesia menurut Tjandra adalah situasi *chaotic disorder* yang dipenuhi oleh perang tanda. Kenyataan ini memperlihatkan bahwa masyarakat atau publik perlu belajar tentang hermeneutik yang menjadi alat bagi mereka untuk melihat dibalik kenyataan yang kasat mata.

Lembaga Lain Bereaksi

Presiden bereaksi dengan membuat Tim Independen Verifikasi Fakta. MK juga tidak lepas dari komentar seperti anggota Komisi III DPR Fraksi Golkar Aulia Rachman yang mengatakan bahwa "Machfud MD, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) melampaui kewenangan" karena menghentikan penyidikan terhadap Bibit-Chandra. MK tidak memiliki kewenangan tersebut.

Enam komisi menyangkan adanya kriminalisasi KPK, mereka adalah Komnas HAM, Komisi Kepolisian Nasional, KPK, Komisi Penyiaran Indonesia, Komnas Perempuan dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Alasan yang mereka ungkapkan adalah adanya kecenderungan penegakkan hukum yang tidak baik,

⁴¹ W. Riawan Tjandra. 2010. *Episode "Kadal" Pasca-"Cicak-Buaya"*. Kompas, 14 Mei 2010.

tidak tranparan. Sehingga perlu rehabilitasi nama baik, kemudian menonaktifkan Susno Duadji untuk memberi kepercayaan paa publik bahwa Bareskrim (baca Polisi) tidak terlibat dalam proses kriminalisasi ketua KPK. Selain itu, idealnya KPK dan jajaran setara lainnya mendapatkan posisi imunitas supaya tidak mudah dituntut perdata atau pidana dalam melakukan tugas dan fungsinya.

Pandangan dari LSM yang bergerak di bidang hukum seperti Konsorsium Reformasi Hukum Nasional menilai pemanggilan ketua KPK karena ingin bersih-bersih di KPK. Dengan cara ini Polisi ingin menaikkan citranya.⁴² Wahyudi Djafar juru bicaranya menyatakan bahwa sebaiknya Polri melakukan bersih internal untuk meningkatkan kredibilitas. Sedangkan Patra dari YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) menyatakan bahwa sebaiknya Polisi tidak pandang bulu, sedangkan kasus yang ada memperlihatkan situasi perang urat syaraf. Febri Diansyah dari *Indonesia Corruption Watch* menerangkan bahwa situasi politis pemanggilan ketua KPK terlihat dari adanya rumor sebelum penahanan seperti Chandra akan menjadi tersangka karena menyadap telepon Nasrudin Zulkarnaen–Rani Juliani.

Pengajar program Pasca Ilmu Kepolisian UI, Bambang Widodo Umar mengatakan bahwa pemanggilan ketua KPK akan merusak citra Polisi. Citra akan buruk karena kasus yang ada terlihat tidak matang, kasusnya terlihat berubah-ubah. Adhi Massardi dari Komite Bangkit Indonesia menyatakan bahwa pengusutan ini bernuansa melemahkan KPK. Kecenderungan melemahkan KPK juga disinyalir oleh Rudi Satriyo pengajar hukum Pidana di UI. Untuk itu menurut Teten Masduki dari Transparansi International Indonesia, sebaiknya presiden menegur Polisi. Situasi yang ada saat ini kelihatannya ingin melemahkan upaya untuk memberantas korupsi, dan memngurangi keleluasaan KPK untuk menangani dugaan korupsi perwira tinggi Polisi dalam kasus Bank Century.

⁴²*Polisi Bersih Diri Dulu*. 2009. Kompas, 7 September 2009.

PAIP Konstitusi (Perhimpunan Advokat Indonesia) menyatakan prihatin terhadap masalah Polisi, Kejaksaan Agung dan KPK yang menunjukkan adanya persaingan yang dapat berdampak negatif terhadap upaya pemberantasan korupsi. Termasuk di dalamnya adalah upaya menggembosi KPK dan pengadilan TIPIKOR.⁴³ Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)–DPR melalui lobi menyetujui mempertahankan kewenangan penyadapan dan penuntutan pada KPK.⁴⁴ Usulan lainnya adalah perlu perubahan sehingga terdapat pemangkasan terhadap kewenangan KPK Yang awalnya setuju pada pemangkasan kewenangan adalah Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Bintang Reformasi, PAN, Partai Damai Sejahtera, PPP, PDIP, Partai Golkar sedangkan Partai Demokrat dan PKS tidak setuju. Berdasarkan lobi yang dilakukan maka RUU tidak memangkas kewenangan KPK namun ada syarat khusus seperti hakim yang berwenang adalah hakim karier, dan kasus untuk dugaan korupsi di atas 10 Miliar harus dengan izin ketua Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 30 hari dan dapat diperpanjang hingga 15 hari kemudian.

Wapres menyatakan tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 4 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK harus dijalankan. Selain itu, Wapres meminta Polisi membebaskan Bibit- Chandra, demi kejelasan dan kepastian hukum.⁴⁵ Perppu ini juga aneh karena ketika pembuatannya tidak membicarakannya dengan KPK. Perppu ini memperlihatkan bahwa presiden dapat mengangkat pengganti pimpinan KPK jika pimpinan KPK terdiri kurang dari tiga orang. Perppu ini memberi peluang pemaknaan bahwa presiden setuju ‘melemahkan’ KPK. Walau demikian Jasin salah satu pimpinan KPK tidak menolak Perppu ini,

⁴³*Presiden Diminta Selamatkan KPK DPR Dinilai Lupakan Semangat Reformasi.* 2009. Kompas, 13 September 2009.

⁴⁴*Kewenangan KPK Tepat, Pemerintah Minta KPK Tetap Berwenang Menuntut.* 2009. Kompas 27 September 2009.

⁴⁵*Ibid* Kompas 27 September 2009, *Wapres Minta Polri Utamakan Kejelasan Kasus Pimpinan KPK.*

kalaupun ada yang menolak maka tidak dapat dianggap sebagai mewakili pandangan KPK. Mahfud MD mengatakan bahwa MK tidak memihak antara Polisi dan KPK, karena fungsi MK adalah sengketa antara lembaga negara, dan kewenangannya berdasarkan UUD.⁴⁶ MK juga tidak bisa menasehati presiden karena bukan penasehat presiden, dan masalah Polisi dan KPK bukan wewenang MK.

Teks Cicak dan Buaya

Gerakan Cicak dan Buaya adalah dukungan FB untuk Chandra Hamzah dan Bibit Samad. Atas tuduhan korupsi maka mereka berdua diamankan Polisi, namun sesungguhnya ada masalah lain yang lebih besar. Salah satu contohnya adalah adanya perubahan analogi korupsi yang umumnya digambarkan sebagai tikus sekarang ini digambarkan sebagai buaya.

“menggantikan simbol tikus sebagai koruptor dengan simbol buaya”.⁴⁷

Gambaran ini memperlihatkan bahwa korupsi merupakan wacana dominan dan merupakan masalah yang sangat penting di Indonesia. Dalam logika sederhana saja, bagaimanakan orang akan menaklukkan buaya, hewan prehistorik yang mampu hidup hingga saat ini, meski sudah mulai berkurang jumlahnya disana-sini.

Salah satu masalah besar yang diangkat dari kasus Cicak dan Buaya adalah adanya proses kriminalisasi KPK. Yang dituduhkan sebagai upaya untuk melemahkan posisi KPK. Padahal penanggulangan korupsi merupakan salah satu butir penting dari reformasi yang ada di Indonesia. Berdasarkan pantauan dari sesama *facebooker*, gerakan ini sudah mendapatkan sebagian dari target satu juta tanda tangan yang dibutuhkan.

⁴⁶ *Polri Tindak Lanjuti Laporan KPK*. 2010. Kompas 1 Oktober 2010.

⁴⁷ *Gerakan Cicak dan Sejarah Kisah Cicak Melawan Buaya (KPK vs Polri)*. <http://nusantaranews.wordpress.com/2009/07/13/gerakan-cicak-dan-kisah-cicak-melawan-buaya-kpk-vs-polri/>. Diunduh 14 September 2011.

“Gerakan 1.000.000 *Facebookers* Dukung Chandra Hamzah & Bibit Samad Riyanto” yang digagas oleh Usman Yasin dalam hitungan hari telah meraup dukungan setengah dari target yang diharapkan. Hingga 3 November pagi pk. 8.50 tercatat sudah mencapai angka 505.095 *facebooker* yang ikut memberikan dukungan”.⁴⁸

Namun demikian gerakan ini memang tidak mudah dilakukan karena dukungan ini berkaitan dengan kemauan dan tindakan yang dilakukan oleh pengguna *facebook*. Himbauan ini bisa masuk ke dalam akun individual akan tetapi dukungan terhadap FB ini harus dilakukan oleh individu yang bersangkutan.

Gerakan Cicak versus Buaya berkembang berdasarkan kasus Susno Duaji eks Kabareskrim. Pernyataan Susno Duaji inilah yang kemudian memunculkan analogi Cicak versus Buaya seperti yang diacu oleh kutipan berikut ini;

"Kalau orang berprasangka, saya tidak boleh marah, karena kedudukan ini (Kabareskrim) memang strategis. Tetapi saya menyesal, kok masih ada orang yang goblok. Gimana tidak goblok, sesuatu yang tidak mungkin bisa ia kerjakan kok dicari-cari. Jika dibandingkan, ibaratnya, di sini buaya di situ cicak. Cicak kok melawan buaya. Apakah buaya marah? Enggak, cuma menyesal. Cicaknya masih bodoh saja. Kita itu yang memintarkan, tapi kok sekian tahun nggak pinter-pinter. Dikasih kekuasaan kok malah mencari sesuatu yang nggak akan dapat apa-apa," ucap Susno seperti dikutip Majalah Tempo.

Banyak pihak menafsirkan, apa yang disampaikan Susno itu yakni cicak mengarah kepada KPK dan buaya kepada Mabes Polri. Meski Susno tegas-tegas membantah ucapannya bila kata cicak dan buaya mengacu kepada institusi tertentu.⁴⁹

⁴⁸<http://www.pandebaik.com/2009/11/03/%E2%80%98cicak-vs-buaya%E2%80%99-merambah-facebook/>. Diakses 8 November 2010

⁴⁹<http://www.detikinet.com/read/2009/07/10/142932/1162755/455/gerakan-cicak-vs-buaya-ramai-di-facebook>. Diakses 8 November 2010.

Yang menarik dari gerakan ini adalah tumbuhnya gerakan yang hampir sama;

Dukungan terhadap KPK dihimpun juga oleh beberapa group lain seperti “PEOPLE POWER!!!” DUKUNG TRANSPARANSI KASUS BIBIT DAN CHANDRA HAMZAH“ dengan 3.224 *facebookers*, “Sejuta Dukungan Buat Bibit S Rianto & Chandra M. Hamzah (KPK)” dengan 1.277 *facebookers*, “Dukungan Buat KPK” dengan 661 *Facebookers* dan “Dukungan Moral Untuk KPK” dengan 322 *facebookers*.⁵⁰

Selain itu, ada pula gerakan pada kasus yang sama namun menggarap dukungan yang berbeda seperti yang ada di bawah ini;

Pada situs pertemanan *facebook*, para ‘pendukung’ Polri dan Kejaksaan ini akhirnya membuat tandingan dengan nama “Dukungan 2.000.000 *facebookers* untuk POLRI” yang sayangnya masih dalam rentang waktu yang sama hanya mampu menjaring 34 *facebookers*. Adapun beberapa bentuk dukungan lain di situs pertemanan ini adalah “1.000.0000.0000 dukungan untuk POLRI melawan pengkerdilan institusi Polisi” *Satu miliar ? yang bener ?* dan dari target satu miliar tersebut baru berhasil menjaring 27 *facebookers*. “1.000.000 Dukungan *facebook* terhadap POLRI dalam Drama Buaya Vs Cicak” dengan 109 *facebookers*, “M3MB3RI DUKUNGAN TERHADAP POLRI” dengan 106 *facebookers* dan “DUKUNGAN KEPADA POLRI & KPK MEM- BERANTAS KORUPSI DAN OKNUM SILUMAN” dengan 19 *facebookers*.⁵¹

Posting seperti ini menunjukkan bahwa isu yang bergulir bisa beragam dan ditentukan oleh jumlah pendukungnya. Ini adalah ilustrasi adanya

⁵⁰*Ibid*, <http://www.pandebaik.com/2009/11/03/%E2%80%98cicak-vs-buaya%E2%80%99-merambah-facebook/>, diakses 8 November 2010

⁵¹*Ibid*, <http://www.pandebaik.com/2009/11/03/%E2%80%98cicak-vs-buaya%E2%80%99-merambah-facebook/>, diakses 8 November 2010

isu-isu yang saling bersaing mendapatkan pengunjung. Isu-isu ini juga berdasar pada “memberi” dukungan pada pihak-pihak yang berseteru.

Perseteruan Institusi

Paparan ini memperlihatkan dua institusi yang saling berhadapan dalam penanganan korupsi, kesan ini ditangkap di dalam gambar di bawah ini. Yang menarik dari gambar ini adalah posisi rakyat yang terperangkap di antara mereka⁵²



Jika melihat keterlindanan institusi di dalam kasus ini maka akan terlihat adanya beberapa kecenderungan:

“... lembaga KPK mulai terasa digembosi oleh berbagai pihak. Jauh sebelumnya, pada April 2008, Ahmad Fauzi-

⁵²Perlawanan Cicak VS Buaya Dalam Karikatur (Sindiran dan Refleksi) http://ruanghati.com/_2009/11/02/perlawanan-cicak-vs-buaya-dalam-karikatur-sindiran-dan-refleksi/ iunduh pada 14 September 2011

anggota DPR dari Partai Demokrat meminta KPK dibubarkan [sumber]. Dua bulan yang lalu, Nursyahbani Katjasungkana, anggota DPR dari fraksi PKB meminta KPK tidak mengambil keputusan alias tidak usah kerja lagi untuk proses penyelidikan korupsi yang membutuhkan keputusan terkait kasus Antasari [sumber]. Dan 3 minggu yang lalu 24 Juni 2009, Pak SBY mengatakan KPK telah menjadi lembaga superboby sehingga wewenangnya butuh diwanti (dikurangi wewenangnya)...”⁵³

Kutipan ini memperlihatkan bahwa selain KPK dan Polisi, Partai juga turut mengomentari kedudukan KPK. KPK sebagai sebuah institusi mengalami goyangan besar “digembosi” istilahnya.

Susno Duaji melihat posisi Polisi jauh lebih kuat daripada KPK, yang digambarkannya sebagai buaya. Namun pandangannya ini tidak semata sebuah simbol saja, melainkan juga tertera di dalam wawancara dengan dirinya. Ketika ditanya apakah KPK akan menangkap dirinya Susno mengatakan dengan percaya diri bahwa:

“... Mau disergap, timbul pertanyaan siapa yang mau menyergap. Mereka kan anak buah saya. Kalau bukan mereka, siapa yang mau menangkap? Makanya, Kabareskrim itu dipilih orang baik, agar tidak ditangkap”⁵⁴

Sumber ini menggambarkan bahwa sebagai sebuah institusi, KePolisian dan Kejaksaan merupakan institusi dengan tingkat korupsi yang tinggi. Meskipun informasi yang dihimpun ini adalah data tahun 2008, namun jika dikaitkan dengan KPK sebagai sebuah lembaga, maka dapat dipahami posisi KPK yang serba salah. Apakah loyalitas Polisi yang bekerja pada Kepolisian atautkah pada KPK berbeda

⁵³*Gerakan CICAk dan Sejarah Kisah Cicak Melawan Buaya (KPK vs Polri)*. <http://nusantaranews.wordpress.com/2009/07/13/gerakan-cicak-dan-kisah-cicak-melawan-buaya-kpk-vs-polri/>. Diunduh 14 September 2011.

⁵⁴*Gerakan CICAk dan Sejarah Kisah Cicak Melawan Buaya (KPK vs Polri)*. <http://nusantaranews.wordpress.com/2009/07/13/gerakan-cicak-dan-kisah-cicak-melawan-buaya-kpk-vs-polri/>. Diunduh 14 September 2011.

penanganan, ataukah dalam hal ini loyalitas ditujukan untuk kepentingan masyarakat membangun masyarakat bersih korupsi.

Pada kenyataannya terdapat institusi lain yang terlibat pada korupsi, seperti DPR, Komnas HAM, dan LPSK serta beberapa LSM seperti KontraS.⁵⁵ Selain institusi ini juga ada yang memasukkan Pengadilan sebagai institusi yang penting dalam penanganan korupsi.⁵⁶ Berkaitan dengan DPR sebagai mekanisme, kasus ini menggerogoti Partai Demokrat sebagai partai yang berkuasa. Dengan demikian, memasukkan DPR di dalam institusi yang penting di dalam mengangkat korupsi sebagai masalah yang penting di Indonesia, merupakan sebuah keharusan.

Dalam konteks institusi ternyata perkembangan terakhir menyangkut juga institusi yang tidak diperkirakan akan muncul di dalam masalah ini yaitu institusi keluarga. Hal ini muncul di dalam surat yang dikirimkan oleh Nazarudin untuk SBY sebagai presiden.⁵⁷

⁵⁵Munatsir Mustaman, S.H, Direktur Executive **Indonesia Development Monitoring**, <http://m.rimanews.com/read/20110817/38271/awas-valiumisasi-pada-nazarudin-dan-case-close> diunduh 15 september 2011

⁵⁶Komentar AA Terhadap Nazaruddin Ancam Bongkar Borok PD (2), May 19, 2011–7:26 pm, Kamis, 19 Mei 2011, on Aug 14, 2011

⁵⁷Inilah Isi Surat Muhammad Nazarudin Untuk Presiden SBY di Sabtu, Agustus 20, 2011 <http://www.google.co.id/search?q=nazarudin&hl=id&prmd=ivnsulb&ei=hatxToTYIsXxrQfOprGEBw&start=190&sa=N>. Diunduh 15 September 2011.

*Kepada Yth
Bapak Susilo Bambang Yudhoyono
Presiden RI di tempat*

*Bapak Presiden yang saya hormati,
Saya mohon kepada Bapak agar segera memberikan hukuman
penjara kepada saya tanpa perlu lagi mengikuti proses persidangan
untuk membela hak-hak saya.
Bagi saya, saya rela dihukum penjara bertahun-tahun asalkan Bapak
dapat berjanji Bapak akan memberikan ketenangan lahir dan batin
bagi keluarga saya, khususnya bagi istri dan anak-anak saya.*

*Perlu saya jelaskan bahwa istri saya adalah benar-benar seorang ibu
rumah tangga yang sama sekali tidak mengetahui apa pun yang
berhubungan dengan kepartaian.*

*Saya juga berjanji, saya tidak akan menceritakan apa pun yang dapat
merusak citra Partai Demokrat serta KPK demi kelangsungan bangsa
ini.*

*Demikian surat ini, mohon bantuan dan perhatian Bapak Presiden.
Hormat saya,*

Muhammad Nazaruddin.

Dalam kasus korupsi, surat ini memperlihatkan posisi keluarga sebagai institusi yang dipadankan dengan institusi lainnya. Masalahnya adalah di dalam kasus lain seperti Nunun Nurbaiti. Serupa dengan Nazarudin, Nunun juga keluar Negeri.

Perkembangan mutakhir dari kasus Bibit-Chandra kemudian mencuatkan masalah kepartaian. Kasus Nazarudin yang sekarang ini berkembang merupakan masalah kepartaian dalam konteks institusi. Ketua partai dan pejabat partai tingkat tinggi memiliki jabatan berganda; sebagai pejabat juga, telah membuat situasinya menjadi

ricuh. Masalah ini adalah masalah kepartaian ataukah masalah negara sebagai institusi.

Kerancuan ini membuat dakwaan dan perkembangan kasusnya merembet kepada masalah lembaga eksekutif. Perkembangan ini merupakan imbas dari masalah-masalah institusi yang terlibat pada penanganan masalah korupsi itu sendiri, merupakan keterkaitan yang tidak dapat dilepaskan.

Hasil Pembahasan Narasumber IP

Penggunaan Media Sosial dalam Kegiatan Politis

Berdasarkan paparan dari IP, sebagai seorang politikus, banyak orang termasuk mereka yang memiliki kedudukan penting di politik, masih awam terhadap konteks sosiologis dari internet. Salah satu kasus akhir ini yang menyeruak adalah, komentar presiden SBY tentang sosial media seperti FB, penggunaan BlackBerry dan sebagainya. Komentar yang dilontarkan menunjukkan ketidaktahuan yang umum dimiliki oleh masyarakat. Kasus yang dimaksudkan oleh IP adalah SMS dari Nazarudin yang katanya berada di Singapura setelah terdengar kabar KPK akan menangkapnya. Ketika itu presiden memberi tanggapan terhadap pengirim SMS dari Nasaruddin, seperti merepresentasikan pengirim dan penyebar dari SMS sebagai "mereka yang berada di tempat gelap". Tokoh yang mendapatkan SMS yang tidak diketahui pemiliknya disebut sebagai "gelap", cara seperti ini dahulu dikenal sebagai surat kaleng. Menurut IP, sebenarnya sumber seperti itu bisa saja diabaikan atau ditanggapi dengan tenang karena sebenarnya sumbernya "... padahal terang2 aja". Komentar seperti itu memperlihatkan bahwa politikus belum dapat menerima dan bersikap terhadap informasi yang diperoleh melalui, TIK seperti melalui SMS.

Ketidaktahuan umum lainnya muncul melalui pandangan mengenai akun fiktif. Salah satu yang dilontarkan ketika ada posting dengan nada kritis melalui situs jejaring sosial adalah bahwa posting tersebut dilontarkan oleh akun fiktif. Komentar ini dipergunakan untuk menolak isi dari *postingan* tersebut. Sebenarnya tidak ada akun yang

fiktif karena selalu ada pemilik akun dibelakang laman tersebut. Bahwasannya terdapat rekayasa di dalam penggunaan akun tersebut, merupakan salah satu upaya yang dilakukan orang untuk menetralsisir suasana atau sebaliknya, atau bahkan hanya untuk menyuarakan pandangan pribadi seseorang. Beberapa politikus yang berhadapan dengan hal ini bereaksi sangat cepat tanpa menyadari adanya realitas lain di balik *postingan* yang ada.

Perkembangan TIK sangat cepat, dan sistem jejaring sosial yang berkembang di internet dipergunakan secara kreatif, sesuai dengan kebutuhan orang yang bersangkutan. Sebagai ilustrasi tentang pesatnya perubahan yang disebabkan oleh teknologi informasi dan komunikasi adalah *twiter*. *Twitter* yang hanya menggunakan 140 karakter, namun dapat berkembang menjadi medan pertarungan ideologis, baik dalam pengertian kiri, kanan, atau tengah. Biasanya di dalam *twitter* berkembang satu atau beberapa isu yang diperbincangkan, dalam hal ini isu yang dimaksud adalah isu sosial politik. Melalui diskusi dan pembahasan yang berkembang di *twitter* dapat dilihat sisi yang diangkat oleh pembahasnya apakah dari sisi kiri sebagai oposan, kanan sebagai pendukung suara yang dominan ataupun mereka yang berada di tengah, yang berkomentar dan mengikuti diskusi tetapi berposisi tidak memihak keduanya. Posisi seperti ini dapat diketahui jika telah cukup lama mengikuti diskusi yang ada. Dunia yang sekecil ini, IP menunjuk pada telepon selular miliknya,—mengacu pada *gadget* TIK seperti handphone, BlackBerry, i-Pad, merupakan alat bagi penggunaanya (*user*) untuk memperdebatkan apapun.

Pembahasan demokrasi melalui ruang maya atau cyberdemokrasi penting dipahami karena di dalam demokrasi terdapat unsur kedaulatan. Demokrasi pada dasarnya menggarap masalah kedaulatan yang mengacu pada akses masyarakat terhadap informasi. Pandangan yang beredar melalui media sosial mengacu juga pada kedaulatan di mana warganegara memiliki hak bersuara dan berpendapat dan memiliki akses untuk mendapatkannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa unsur publik mendapatkan informasi dan

aksesnya, belum banyak diperhitungkan dan dipenuhi. Berdasarkan penjelasan IP, makna kedaulatan bisa berbeda antara politikus dan masyarakat umum. Yang menjadi masalah adalah adanya kesenjangan antara keduanya. Pada umumnya politikus tidak menyadari hal ini, dan masih melihat dirinya sebagai bagian dari kedaulatan. Terdapat kesenjangan, apabila masyarakat memaknai dengan cara yang berbeda, karena adanya perubahan sosial karena perkembangan TIK.

Namun demikian IP melanjutkan dengan mengatakan bahwa di dalam mengkaji masalah cyberdemokrasi perlu disadari bahwa, dalam di dalam cyber bersarang kepentingan-kepentingan. Ruang maya bukan ruang yang bersih dari kepentingan, bahkan sebaliknya bahwa "... unsur struktural (struktur, red) yang berada di luar akan bermain pula". Para pemilik kapital dan dalam hal ini kelompok kepentingan yang sudah sadar akan bermain aktif melalui jejaring sosial yang ada. Sehingga bukan sesuatu yang aneh bahwa ada orang yang mensangsikan dan berpandangan bahwa media sosial direkayasa.

Pertanyaan yang sering muncul adalah siapa pengguna dari media sosial. Bahkan masih banyak yang mensangsikan tentang mereka. Berdasar pada pandangan IP:

"Pengguna cyber masih banyak yang dikategorikan sebagai *silent majority*. *Silent majority* dalam hal ini adalah pengguna yang tidak mengkaitkan aktivitasnya dengan unsur sosial politik. Karena di dalam konteks dunia maya, seperti *twitter* misalnya, yang *followernya* banyak seperti para selebritis cenderung kurang berkualitas, sedangkan yang berkualitas justru sebaliknya *followernya* sedikit".

Dalam kacamata sosiologis umumnya pengguna adalah para individu untuk kebutuhan hubungan sosial mereka. Kebutuhan disediakan oleh jejaring sosial yang ada. Oleh karena itu, pada umumnya mereka adalah pemirsa yang bisu, beberapa dari mereka mengikuti perkembangan yang ada, dan beberapa dari mereka kemudian merespon *posting-an* yang ada. Kebanyakan dari mereka menggunakannya untuk kehidupan sehari-hari atau untuk urusan perdagangan. Oleh karena itu, meskipun jejaring sosial dipergunakan

untuk mendiseminasikan isu yang serius namun tidak terlalu menjamin jumlah yang mengikutinya, yang dapat dilihat dari jumlah *followernya*. Menurut pengamatan IP di dalam media baru juga terdapat struktur masyarakat sendiri, seperti adanya *opinion maker*, *follower* dan sebagainya. *Opinion maker* adalah orang atau kelompok yang mengangkat isu tertentu, sedangkan *follower* adalah yang mengikuti diskusi yang berkembang.

Pada awalnya *public relation agency* yang menggunakan media sosial untuk kampanye produk. Penggunaan media sosial marak untuk urusan perekonomian terutama penjualan *online* dan iklan. Akan tetapi di dalam sosial media juga berkembang perilaku negatif seperti adanya modus penipuan seperti tawaran pembelian melalui internet, di mana barang yang dipesan, tidak kunjung datang walau uang sudah ditransfer. Di lain pihak ada pula kelompok yang melacak penggunaan *cyber* untuk masalah kriminal. Mereka yang bergerak di aras ini menyadari bahwa kebanyakan masyarakat *gaptek* atau gagap teknologi, sehingga membuat mereka rentan sebagai objek kejahatan. Salah satunya adalah upaya untuk memverifikasi kebenaran sebuah transaksi. Cara yang hampir serupa dipergunakan oleh Bawaslu di kota Bandung untuk melacak kegiatan dari anggota partai politik, untuk menemukan dan memperlihatkan adanya kecurangan pada Pemilu 2009 (Widyawati, 2010).

Pada saat kasus Cicak dan Buaya muncul, situs ini digunakan oleh beberapa kelompok kepentingan yang berada di luar dunia maya. Dalam hal ini terlihat adanya kepentingan struktur, seperti pemilik modal namun memiliki kepedulian. Sehingga ketika kasus tersebut bergulir, beberapa kelompok mengembangkan jejaring sosialnya. Para simpatisan gerakan anti korupsi menggunakan diskusi ruang maya ini untuk menggarap kemungkinannya menjadi gerakan sosial. Mereka bekerja sama dengan kalangan yang selama ini mengambil keuntungan sosial dari dunia maya. Mereka adalah kalangan menengah atas, agen *public relation*, orang yang sehari-hari hidup dengan teknologi, bekerja dalam agensi yang besar tetapi tidak mau tampil di publik. Misalnya MA (bukan nama sebenarnya) seorang perempuan ahli hukum dan

pemilik modal besar, tentunya akan memiliki keterbatasan untuk turut dalam demonstrasi di bundaran HI (Hotel Indonesia). Orang seperti MA dapat menggunakan karyawannya untuk mendukung *postingan* yang ada, dan tentunya juga mendukung pendanaan untuk kegiatan di ruang nyata untuk mendukung ide yang awalnya berkembang di ruang maya. Kegiatan di ruang nyata ketika itu cukup beragam, salah satunya adalah demonstrasi di berbagai tempat penting di Jakarta.

Secara pribadi, IP belum melihat dunia *cyber* memberi kontribusi penting di dalam perkembangan demokrasi. Berdasarkan pemahamannya “Kalaupun ada, kontribusi tidak signifikan. Kecuali melihat sisi yang lain”. Dalam hal ini IP mengacu pada kegiatan politik yang memang belum menggunakan mekanisme media sosial di dalam menggarap partisipasi politik atau kegiatan lainnya. Namun untuk perkembangan dan perubahan lain, IP menunjukkan adanya perkembangan sosiologis. Sebagai ilustrasi adalah gerakan sosial melalui *Blog* yang dibikin secara bersama atau perorangan, dalam hal ini IP mengacu pada laman diskusi yang berkembang karena didukung oleh kelompok yang secara rutin mengisi ruang tersebut. Dalam hal ini *blog* menambah kekurangan FB atau *twiter* yang memiliki ruang yang lebih terbatas.

IP mengamati bahwa di Indonesia gerakan yang menggunakan media sosial memiliki kecenderungan sebagai gerakan yang bersifat tentatif. Gerakan tentatif berarti gerakan sosial tersebut muncul secara sporadis, belum terorganisir dan kadang-kadang isunya mencuat secara tiba-tiba. Sebagai ilustrasi belakangan ini ada gerakan Koin Sastra—gerakan ini berusaha untuk mendukung kesulitan dana bagi perpustakaan HB Yassin. Menurut IP “Secara pribadi saya belum dapat menilai apakah gerakan ini sukses atau tidak”. Seperti gerakan koin Prita, sukses atau tidaknya gerakan diukur dengan jumlah koin yang dapat diperoleh, Prita mendapatkan dukungan luar biasa. Akan tetapi Koin Sastra mungkin berkembang agak lambat, karena tidak semua orang memahami pentingnya arsip, dibandingkan dengan orang yang merasa simpati dengan penderitaan Prita. Perasaan publik seperti ini, turut mendukung kesuksesan dari gerakan sosial yang diangkat di

dalam masyarakat. Kata-kata IP sendiri "Saya ikut tapi tidak mau tampil tapi dukung lewat belakang karena saya politisi". Dari segi ide IP setuju, dan kemudian muncul dalam bentuk dukungan dana, karena danya kesamaan ide. Akan tetapi IP merasa tidak yakin apakah gerakan ini memiliki efek domino yang besar, mengingat masalahnya adalah kepentingan bagi segelintir orang yang memahami arsip dan menyadari pentingnya arsip bagi Indonesia. Perkiraan IP cukup beralasan karena terbukti bahwa pendukung gerakan ini juga lebih terbatas dari kasus-kasus lainnya.

Khusus untuk kasus Cicak dan Buaya, menurut IP membutuhkan perhatian khusus karena kasus ini adalah kasus politik hukum. Gerakan seperti Koin Sastra lebih murni sebagai gerakan sosial tetapi memiliki dukungan yang terbatas. Di dalam konteks Indonesia banyak hal yang perlu diperhatikan salah satunya adalah kebutuhan untuk menyelamatkan LBH Jakarta, namun tidak semua isu berkembang di media sosial. LBH Jakarta tidak lagi mendapatkan dukungan dana dari pemerintah DKI sehingga organisasi tersebut akan mengalami kesulitan untuk mendampingi kasus-kasus hukum bagi orang miskin atau marginal. Sekarang ini mereka tidak punya apa-apa, kondisi ini menurut pembahas "Ini jauh lebih nol lagi". Akan tetapi gaung dari kebutuhan ini belum terdengar maksimal padahal jika bisa isu diwujudkan menjadi gerakan sosial maka, gerakan ini penting untuk mengadvokasi kepentingan publik.

Di dalam dunia politik belum banyak juga politisi yang menggunakan sosial media untuk kepentingan kampanye. Meskipun beberapa dari politisi menggunakannya untuk menyuarakan pandangannya dan menjadi alat kampanye untuk mendukung kontestan tertentu.

"Saya juga pelaku dalam menggunakan sosial media untuk mempertarungkan kepentingan di luar itu termasuk mendukung AG dan PSSI. Saya fasilitasi anak buah saya untuk melakukan itu. Mereka perang aja. Yang penting ada pertarungan ada perimbangan opini".

Sehingga artinya situasi politik juga dicoba dipengaruhi oleh kelompok politik yang saling bersaing melalui media sosial. Dalam hal ini paparan di atas memperlihatkan bagaimana kelompok di ruang nyata, berkonsolidasi untuk mendukung kontestan mereka di ruang maya dan sebaliknya.

Salah satu ilustrasi penggunaan sosial media di dalam masalah sosial politik adalah menggalang dukungan terhadap kontestan A dalam pilkada. Berdasarkan hasil dari *poling*, terlihat adanya komunitas yang tidak bisa dimasuki. Pemetaan yang dilakukan menunjukkan kondisi sosial masyarakat yang memiliki aktivitas sering berada di luar rumah, juga bentuk kluster kediaman mereka. Kalaupun rumah mereka didatangi maka yang akan keluar adalah satpam atau pembantu, sehingga suara mereka tidak *valid* untuk gambaran *poling* yang ada. Kalau kelompok ini diam saja maka tidak ada harapan bagi kontestan A untuk menang. Kelompok yang tidak terjangkau ini lebih efektif didekati melalui sosial media dengan mempelajari situasi sosial mereka. Akhirnya situasi yang awalnya sulit ditembus, kemudian berubah menjadi pemenang. Kecenderungan ini juga terlihat pada Pilkada lainnya.

Demokrasi secara langsung dapat dipengaruhi melalui proses “infiltrasi”, namun yang menjadi masalah adalah apabila pola demokrasi langsung diterapkan pada demokrasi tidak langsung (dengan menggunakan media sosial). Sebagai ilustrasi anak-anak Kaskus punya klub, mereka juga punya “musuh”. Mereka bisa berbeda pendapat di ruang maya tanpa harus berakhir pada konflik terbuka, situasi seperti ini adalah situasi yang ideal. Perkembangan sosial media harus kita “rasional”kan, artinya harus kita pahami sebagai perkembangan baru yang mempengaruhi mekanisme sosial politik. Perlu upaya untuk mengajak masyarakat memahaminya, karena cyberdemokrasi sesuatu yang masih asing dalam politik. Artinya masyarakat perlu diperkenalkan dengan perkembangan baru, selain juga melakukan upaya lanjutan untuk mengantisipasi dan beradaptasi terhadap perkembangan baru di dalam masyarakat. Jangan sampai kontras di ruang maya menjadi konflik di ruang nyata.

Kenyataan yang perlu disikapi adalah pandangan bahwa parpol di Indonesia cenderung berbentuk partai tanpa ideologi, sehingga mereka juga tidak dapat dengan cepat bereaksi terhadap perkembangan di ruang maya. Hal ini merupakan perkembangan baru yang (akan) mempengaruhi politik Indonesia moderen, di mana sebelumnya ideologi mewarnai pembentukan politik dan tentunya pembentukan kader dan hubungannya dengan masyarakat pada umumnya. Namun kenyataan memperlihatkan bahwa kekuasaan, serta modal, memainkan peran besar di masyarakat. Masyarakat umum belum tentu menyukai hal ini, akan tetapi pandangan ini dapat dibantah karena partai juga berubah dan mulai menggarap ideologi. Sebagai ilustrasi partai Golkar memiliki dewan ideologi. Di dalam dewan tersebut Akbar Tanjung adalah politisi paling senior dan yang paling yunior adalah Idrus Marham, ada nama yang lain seperti Siswono. Partai Golkar memiliki keresahan dan kepedulian tentang hal ini, sehingga Partai Golkar membentuk dan mengadakan pelatihan ideologi di beberapa kota. Di dalam skema pelatihan ini alumni pelatihan ideologis kemudian menjadi trainer untuk pelatihan kader.

Kelemahan ruang maya juga timbul karena adanya kerancuan hukum dan politik. Sesungguhnya perlu disadari bahwa hukum adalah sebuah produk politik, namun kita perlu belajar dan membuka diri pada kejadian dan perkembangan yang terjadi di dunia lain, sebagai upaya membuka perhatian yang lebih luas. Di Amerika masalah cyber tumbuh dengan pesat namun hukum menjadi patokan, sehingga meskipun seorang senator mempunyai posisi di dalam politik, tetapi hukum menjadi batas yang menentukan dirinya pula. Di Indonesia politik memainkan peran yang sangat kuat dan mempengaruhi institusi lainnya seperti hukum. Selain politik peran lainnya dimainkan oleh pasar dan juga oleh preman, artinya terdapat dominasi institusi terhadap institusi lainnya. Artinya jika masyarakat merasa “sebal”, “bosan”, maka bukan sesuatu yang aneh bila ruang maya menjadi ruang alternatif di mana masyarakat mengemukakan pandangannya. Menurut IP dalam konteks dominasi politik yang seperti inilah pemahaman yang

lebih mendalam tentang cyberdemokrasi akan sangat berkontribusi pada masyarakat.

Selain itu, terdapat perkembangan yang melibatkan ruang maya yang sangat cepat yang terjadi di masyarakat, sehingga secara sosiologis terdapat kebutuhan untuk mendiskusikan masalah-masalah seperti itu. Salah satu contohnya adalah perubahan pola-pola keberagaman yang diperlihatkan oleh kasus NII (Negara Islam Indonesia), pengelolaan mesjid yang awalnya dikelola oleh NU atau Muhammadiyah, sekarang ini dikelola oleh kelompok Islam lainnya, dan perkembangan tersebut mempengaruhi perkembangan politik di masyarakat. Saat ini mahasiswa tidak tertarik masuk HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) atau PMKRI tapi lebih banyak masuk Islam dalam konteks global. Islam dalam konteks global terlihat dari beberapa aktivis yang bergerak di isu agama, tidak masuk kegiatan atau kelembagaan Islam dalam konteks historis di Indonesia seperti Nu atau Muhammadiyah, melainkan masuk pada isu global seperti perhatian mereka terhadap Palestina. Dalam konteks seperti ini sosial media menjadi alat untuk bertemu, perbedaan pandangan mereka dapat saling bertegur sapa melalui media sosial. Sebagai sebuah ilustrasi, *twitter* yang hanya memiliki 140 karakter namun dapat dipergunakan untuk pertarungan ideologi. Sebagai ilustrasi, menurut IP “Saya dikenal dengan penentang JIL (Jaringan Islam Liberal) dengan dalih ” Salah Arah”. Kemudian yang bersangkutan membuat komunitas lain yang bernama ”Salah Arah” yang lokasinya berdekatan dengan Salihara. Kemudian keduanya saling meng*counter* pandangan dari masing-masing pendukung. Kubu-kubu ini secara ideologis bertarung, namun pertarungan ini hanya berbentuk pertarungan ide. Sama kasusnya ketika Gunawan Muhamad mengangkat Tan Malaka, kemudian ada tandingan yang mengatakan bahwa Tan Malaka bukan opera. Perdebatan ini kemudian dibahas, baik di dalam maupun di luar negeri. Di dalam perdebatan tersebut mereka saling membahas tokoh dan memasukan perdebatan teori melalui *twitter*, kemudian diskusi ini ditindak lanjuti dengan pemaparan yang lebih luas melalui artikel di dalam blog dan kemudian dibahas melalui FB. Dalam hal ini dapat

dilihat bahwa pembahasan dan diskusi melalui sosial media menjadi lebih efektif kalau menggunakan beberapa situs jejaring sosial, seperti *twitter*, *blog*, *web* dan sebagainya.

Ilustrasi lain dari diskusi serupa adalah komunitas yang lahir melalui *twitter* seperti forum Budiman Sujatmiko, yang kemudian diikuti dengan diskusi di kafe di kota besar seperti Jakarta, Bandung, kemarin diskusi dilakukan di Jember dan banyak permintaan lain dari beberapa kota. Berdasarkan paparan IP pembicara dari ruang seperti itu, kebanyakan adalah lulusan ITB yang menggunakan rumus matematika, seperti fraktal, di dalam pertemuan ini terdapat pertemuan multi disiplin yang kelihatannya indah sekali. Berdasarkan pertimbangan IP, diskusi seperti ini melawan argumentasi dari kelompok neoliberal yang menghambakan materi sedangkan kelompok ini menghambakan ide.

Ilustrasi lain, yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak adalah gerakan Safe Jakarta. Gerakan Safe Jakarta muncul dengan ide membahas upaya-upaya untuk menyelamatkan Jakarta. Diskusi dilakukan di kafe dan dibiayai dengan cara *saweran*. Gerakan ini dinamakan gerakan politik Cinta Jakarta, gerakan ini bukan sekedar gerakan sosial tetapi bisa disebut juga sebagai gerakan politik, tokohnya adalah Tantowi Yahya. Berdasarkan pengamatannya gerakan politik bermula dari gerakan sosial. Sebagai ilustrasi adalah usulan komunitas ini, untuk menurunkan penumpang bis di halte (tidak disembarang tempat). Komunitas ini telah menghitung bahwa menurunkan penumpang diluar halte akan menghambat perjalanan. Jika semua orang turun di halte maka perhitungan waktu perjalanan lebih sedikit, dibandingkan dengan turun sembarangan tempat. Masalah ini dihitung secara matematika dan diperkirakan mengurangi kemacetan di Jakarta. Ada juga kelompok yang berkeinginan untuk menghijaukan Jakarta dengan hidroponik. Pemikiran-pemikiran seperti ini sangat kreatif, sehingga akan mempengaruhi demokrasi secara kualitas bukan kuantitas. Namun demikian kalau semua terlibat di sosial media maka akan menjadi seperti yang dikatakan Piliang seorang

pemikir yang tertarik pada dunia maya, yaitu memindahkan dunia nyata ke dunia maya.

IP sangat yakin bahwa media sosial, tidak bisa ditolak seperti kita tidak bisa menolak pengaruh globalisasi dan demokratisasi. Beberapa orang bahkan berpendapat bahwa ilmu politik sudah mati, karena tidak ada teori baru. Sebenarnya kecenderungan yang sama juga terjadi di ilmu sosial, kecuali memperhatikan perkembangan dan perubahan masyarakat. Tantangan tumbuh karena perkembangan teknologi yang menghasilkan masalah dan tantangan yang baru sehingga ilmu-ilmu tersebut berkembang salah satunya melalui perhatian terdapat komputer dan internet. Dalam mempelajari media sosial, kita melihat perkembangan kesejarahan yang terjadi seperti penggunaan *mailing list*. Saat ini *mailing list* tidak sepenting pada tahun 1998, di mana *mailing list* "Apa Kabar" turut mendukung gerakan reformasi. Informasi yang diperoleh melalui *mail list* itu juga telah menghasilkan banyak PhD, yang menggunakan laman tersebut untuk mendapatkan data dan bacaan penting. Kondisi seperti itu, saat ini memiliki kecenderungan di mana orang tidak suka membaca paparan yang panjang-panjang seperti buku, namun menggunakan karakter yang terbatas di *twitter* sebagai sumber informasi. Banyak pertarungan terjadi di dunia maya, mungkin medianya berubah akan tetapi tokohnya tidak banyak berubah. IP mengakhiri pandangannya dengan mengatakan bahwa "Sekarang ini orang bertarung dengan menggunakan kata-kata".

Konteks Sosial Teks

Dalam sub bab ini akan diuraikan konteks sosial dari teks di atas. Sumber utama dari analisis ini adalah wawancara dengan seorang pengamat komunikasi politik yang berprofesi sebagai tenaga pengajar pada sebuah universitas ternama di Ciputat yang bernama GH. GH kini sedang menyelesaikan studi S3 di universitas negeri di Bandung. Menutur GH. Gerakan sosial melawan korupsi yang dilakukan oleh masyarakat *cyber* pada kasus Nazaruddin tidak masif seperti ketika

terjadi kriminalisasi terhadap dua pimpinan KPK yang dikenal dengan kasus Cicak vs Buaya.

Menurut GH, tampaknya di masyarakat tumbuh optimisme bahwa korupsi di Indonesia dapat dikendalikan. Dukungan terhadap KPK pada kasus Cicak vs Buaya itu terkait dengan posisi kinerja KPK. Didirikannya KPK sebenarnya menyumbang pada optimisme membangun negeri yang baik. Pendirian KPK menyumbang naiknya proses pemberantasan korupsi di Indonesia. Eksistensi KPK terbangun "Setelah Indonesia menandatangani *United Convention Against Corruption* kalau tidak salah 2002 kemudian 2006 kita menginisiasi bagaimana KPK lahir". KPK menjadi kelompok *pressure group*, atau kelompok penekan. KPK menjadi harapan karena dianggap sebagai lembaga independen yang tidak merepresentasikan kelompok penegak hukum yang selama ini carut marut contohnya adalah Kejaksaan dan Kepolisian. Pada saat KPK bekerja, reaksi beberapa institusi memperlihatkan proses kriminalisasi yang menimbulkan simpati sebagian masyarakat mengharapkan penindakan korupsi. Berdasarkan pengamatan GH, pada saat kasus tersebut terjadi, posisi kredibilitas dan akuntabilitas KPK masih baik. Sebagai ilustrasi, ketika Nazarudin mengatakan bahwa Chandra Hamzah dan Ade Raharja pernah bertemu empat kali dengan Nazaruddin meskipun Chandra mengaku bahwa dia bertemu karena temannya Saan Mutafa, masyarakat masih percaya.

Namun beberapa survei terakhir menunjukkan popularitas KPK menurun sehingga, dukungan terhadap KPK juga berubah. Mereka yang dahulu memberikan dukungan ketika terjadi proses kriminalisasi KPK, sekarang berubah menjadi netral, atau bahkan sebaliknya. Perubahan seperti ini adalah situasi yang umum terjadi, karena di dalam proses dukung mendukung paling tidak terdapat tiga kecenderungan, yaitu menolak, netral atau mendukung. Dalam pandangan GH, mereka yang mendukung bisa berubah menjadi netral, atau mereka menunggu penjelasan komisi etik di KPK, atau mengamati proses penegakan hukum dalam kasus Nazaruddin. Dalam bahasa GH "

Bisa jadi Cicak vs Buaya ini adalah dulu booming karena memang kredibilitas dan akuntabilitas KPK menunjukkan

citra positif dimata masyarakat. Nah sekarang ada sebagian yang dulu mendukung itu, ok netral dulu deh melihat hasil komisi etik bagaimana? Bisa jadi ketika Alexander Lay dan teman-teman mampu mengadvokasi KPK kemudian menunjukkan bahwa Chandra Hamzah tidak ada keterkaitan dengan kasus korupsi yang dilakukan oleh Nazar(udin) dan pelan-pelan itu juga disosialisasikan pada khalayak ke sosial media, belum tentu dukungan terhadap KPK selesai atau habis”.

Penjelasan ini menggambarkan penurunan konsistensi dukungan terhadap kasus Cical dan Buaya.

Lebih lanjut GH mengungkapkan bahwa diskusi, komentar, lontaran pendapat yang berkembang di media sosial merupakan salah satu perkembangan baru. Perkembangan itu tidak hanya karena ditemukannya internet, yang kemudian menyumbang berkembangnya ruang publik yang baru. Akan tetapi juga karena media massa yang ada. Di dalam penjelasannya, televisi di Indonesia, meskipun pada awalnya menyumbang pada proses demokratisasi, akan tetapi juga merajai pandangan yang beredar.

”optimis pada ekspresi di ruang publik yang sudah *distorted* seperti TV yang dimiliki oleh politisi pengusaha orang masih lebih nyaman mengekspresikan di sosial media, ruang publik baru itu, saya mengambil istilah dari David Foster ya itu *new public sphere*. Itu sebagai ruang publik baru”.

Televisi seperti yang dilansir oleh Ade Armando, mempengaruhi pandangan publik di Indonesia, karena seperti sudah menjadi rahasia umum bahwa kepemilikannya berkaitan dengan pemilik modal dan juga partai tertentu. Sehingga bukan merupakan sebuah keanehan ketika masyarakat juga menjadi apatis terhadap pandangan yang dilontarkan melalui media massa.

Selain itu, perkembangan penggunaan internet dan situs jaringan sosial di Indonesia berkembang luar biasa. Dalam pengamatan GH,

“Terlebih kita melihat bahwa posisi *traffic* di *facebook* dan *twitter* Indonesia luar biasa. Kita selalu *the big three* untuk internet *users* pengguna *facebook* dan *twitter*. Kita dulu di posisi tujuh sekarang di posisi tiga. Ini menunjukkan bahwa internet *users* di Indonesia itu besar meskipun belum tentu terkait dengan isu-isu politik”.

GH termasuk orang yang memiliki optimisme bahwa sosial media bisa menciptakan ruang publik baru. Optimisme tersebut diikuti oleh pemahaman tentang perkembangan dari isu politik yang berkembang di media sosial. GH menjelaskan melalui pemahaman di bawah ini:

“Itu kan kalau kita bicara simetrik dan asimetrik, kan memang asimetrik misalnya dari akun X ke akun Y yang sebetulnya di *setting* oleh operator-operator politik Itu titik lemahnya. Tetapi titik positifnya, *citizen* sebagai warga negara punya ruang ekspresi yang kemudian menjadikan sosial media tidak hanya sebagai alat *sharing* untuk pertemanan tetapi juga bisa menjadi semacam ekspresi politik atau partisipasi politik, misalnya protes, keluh kesah warga negara bahkan beberapa kasus beberapa kasus memperlihatkan proses inisiasi bukan? Misalnya inisiasi yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu”.

GH menggunakan konsep asimetrik untuk menjelaskan adanya upaya dari kelompok politik yang dominan atau dapat disebut sebagai kelompok kepentingan (*interest group*), untuk mempengaruhi pandangan melalui sosial media. Kenyataan ini pada satu sisi membuat masyarakat sangsi terhadap netralitas isu yang berkembang di media sosial. Akan tetapi internet dan situs jaringan sosial juga memiliki sisi positif, yaitu sebagai ruang untuk berekspresi tidak hanya dalam konteks hubungan sosial akan tetapi juga dalam konteks masalah sosial politik. Menurut GH sisi positif ini tetap perlu diapresiasi, karena beberapa dari aktivitas tersebut mampu menggalang dan memobilisasi pandangan dan kepedulian masyarakat.

Meskipun GH tidak terlalu yakin bahwa perkembangan media sosial di Indonesia, akan mengikuti perkembangan yang terjadi di

Mesir. Di Mesir, media sosial merupakan mekanisme yang menumbangkan rejim Husni Mubarak. Sehingga tentu kemungkinan untuk dipergunakan sebagai alat memobilisasi masyarakat untuk menurunkan rejim juga menjadi pertanyaan penting di Indonesia.

“Tetapi saya yakin tidak sampai seperti di Mesir atau Tunis mbak. Kenapa demikian ? Kan kalau kita melihat kasus Ghanem yang membuat akun *we are khalid said*, itu kan mampu menginisiasi gerakan protes di dunia riil. Kalau kita melihat psikopolitisnya. Kalau di Mesir *mainstream* media ditekan sehingga ekspresi warga masyarakat untuk melakukan protes melalui *mainstream* media tidak terwadahi. Kemudian pada saat Ghanem menginisiasi gerakan sebagai bentuk respek untuk perjuangan Khaled Said, seorang *blogger* yang mati karena dibunuh kemudian mendapat respek dari *user* internet di Mesir. Sehingga pada saat mereka masuk di *facebook* kemudian (terjadi tahapan revolusi) ”OK, diinisiasi, kita ketemu (ditempat tertentu), melakukan...”. Pada saat Ghanem membuat akun ”*we are all Khaled Said*” kemudian *followernya* banyak, kemudian diinisiasi, melakukan protes terhadap Husni Mubarak, kemudian terjadilah demonstrasi besar-besaran. Jadi bisa dibilang revolusi 2.0 memang sukses di Mesir. Di Tunisia juga sama, *Twitter* memainkan peranan. Tetapi saya lihat bahwa Mesir dan Tunis itu karena *mainstream* medianya ditekan mbak. Berbeda dengan Indonesia”

Media di Indonesia, meski merajai pandangan yang ada, namun masih memberikan celah sebagai saluran politik. Bahkan di Indonesia perkembangan media massa cenderung liberal, sehingga ekspresi simbolik yang dikonstruksi oleh media massa cenderung bebas bahkan eksplosif, misalnya kritik Metro atau TV One terhadap pemerintahan SBY. Artinya media massa tidak hanya memberikan ruang akan tetapi juga menggunakannya, dalam bahasa GH, ruang protes yang digarap dengan menggunakan hirarki pengaruh yang ada.

Dengan demikian, di dalam melihat internet sebagai ruang publik baru dan ruang untuk berekspresi, masyarakat penggunaanya juga

melakukan proses konsolidasi politik. Pada awalnya, internet adalah semacam ruang ekspresi bagi warga negara, sebagai *users* dari internet. Kemudian proses sosial terjadi di mana ruang itu dipergunakan secara kreatif untuk menyampaikan protes, pendapat atau kritik, yang ditujukan kepada warga negara lain. Sehingga penting untuk diperhatikan bahwa awalnya isu yang berkembang lebih merupakan upaya “curhat”—curahan hati, terdapat keinginan untuk mengungkapkan pandangannya yang disemburkan bagi sesama pengguna internet. Kegiatan tersebut awalnya tidak ditujukan sebagai upaya konsolidasi sebuah gerakan politik, namun jika sampai ke *sharegroup consciousness*, dapat menghasilkan sebuah gerakan sosial bahkan sampai revolusi. Namun GH sekali lagi mengingatkan bahwa:

“Kalau *mainstream* media ditekan, maka sosial media akan efektif. Contoh misalnya kita di tahun 1997 ketika *mainstream* media ditekan maka muncul misalnya apakabar.net yang menjadi alat *endorsement* untuk melakukan gerakan meruntuhkan rejim Suharto”.

Gerakan sosial di media baru seperti Cicak vs Buaya, berdasarkan paparan GH, awalnya adalah ekspresi di media sosial. Gerakan tersebut menghasilkan lebih dari satu juta tanda tangan mendukung Bibit-Chandra. Gerakannya berkembang dari *online* ke *offline*, dari ekspresi melalui FB, menjadi gerakan yang secara langsung melakukan tekanan terhadap lembaga-lembaga yang berwenang. Kini situs gerakan 1.000 000 dukungan untuk Bibit Chandra sudah menjadi putih, setelah kasusnya berkembang semakin luas dan mendalam.

“Ini kan suatu fenomena menarik Cicak vs Buaya, saya sempat mengikuti proses dinamika perbincangan dan narasi yang ada di laman Cicak vs Buaya. Itu kan sebenarnya memang menjadi salah satu ekspresi politik dari sebagian *facebooker* bahkan, saya bilang ini merupakan ekspresi dari warga negara yang kecewa gitu, (terhadap) ada(nya) satu proses kriminalisasi terhadap KPK. Nah ini menjadi bukti mbak bahwa sebenarnya upaya menginisiasi para pengguna internet untuk kemudian melakukan proses gerakan sosial

maupun politik di Indonesia sangat mungkin, tetapi tidak sampai pada revolusi”.

Berdasarkan pandangan seperti ini, kepedulian masyarakat yang menghasilkan lebih dari satu juta tanda tangan tersebut adalah ungkapan kepedulian masyarakat. Masyarakat ternyata peduli terhadap upaya mengatasi korupsi, dan bahkan KPK menjadi tumpangan harapan mereka.

Jika ada yang mencurigai gerakan tersebut sebagai gerakan yang ditumpangi oleh kepentingan tertentu, maka sebetulnya ada hal lain yang perlu diperhatikan. Jika gerakan tersebut adalah sebuah upaya tertentu dari mereka yang memiliki kepentingan tertentu, maka hal lain yang akan berkembang. Untuk sampai menjadi sebuah gerakan, upaya di media sosial bertumpu pada proses yang panjang:

“Saya bilang menginisiasi gerakan sosial politik tetapi tidak sampai pada revolusi, terutama yang sifatnya *head to head* dengan pemerintah, misalnya menumbangkan rejim SBY. Itu menurut saya tidak akan pernah sukses, kenapa? karena SBY masih memberikan ruang ekspresi politik warga negara di media-media *mainstream*”.

Penjelasannya memperlihatkan bahwa, jika gerakan ini memang ditujukan untuk menggulingkan sebuah pemerintahan perlu memperhatikan proses sebuah gerakan menjadi revolusi. Sebuah revolusi dapat terjadi dengan beberapa tahapan proses. Yang pertama adalah adanya *common enemy*, adanya musuh bersama. Pada kondisi saat ini SBY tidak dapat dilihat sebagai musuh bersama, karena ada kelompok yang mendukungnya. Yang kedua adalah adanya friksi di tubuh militer. Saat ini kita melihat bahwa militer cukup baik, meskipun terdapat pandangan yang berbeda antara beberapa kelompok. Yang ketiga adalah adanya intervensi asing. Kemudian yang keempat adalah adanya konsolidasi kekuatan *pressure group* seperti mahasiswa dan NGO. Sebagaimana kita ketahui, saat ini terdapat banyak kelompok dengan pandangannya masing-masing. Yang kelima adalah adanya tokoh pemersatu, saat ini kita bahkan sedang mencari figur tokoh baru.

GH sebagai pengamat politik juga melakukan aktivitas *cyber* untuk berbagai keperluan. Hampir seluruh situs jejaring sosial GH miliki, misalnya “...*friendster, facebook, twitter* semua saya pakai, kemudian *weblog* interaktif saya ikut, Kompasiana, Politikana”. Ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh GH berkontribusi melalui media sosial.

“Saya menggunakan ini pertama sudah jelas ya untuk bagian kita adaptasi dengan perubahan teknologi komunikasi, kita tidak bisa restriktif terus karena bagaimanapun menggunakan sosial media menjabatani *unrestricted moment* di mana kita berhubungan misalnya, dengan mbak, dengan kawan-kawan untuk urusan pekerjaan...”.

Kemudian yang kedua,

”saya juga tertarik untuk melihat sesuai dengan *concern* saya yaitu pada persoalan komunikasi politik yang terjadi di situs Jejaring sosial dan *weblog* interaktif. Ini riil, saya melihat ada proses yang menarik yang terjadi di situs jejaring sosial dan *weblog* interaktif”.

Bagi GH sebagai akademisi yang bergerak di bidang komunikasi politik, media sosial merupakan perwujudan dari saluran komunikasi politik generasi ketiga. Saluran politik generasi pertama menggunakan retorika, yang menghasilkan orator-orator unggul seperti Sukarno. Kemudian saluran komunikasi politik yang kedua adalah penggunaan media massa dalam proses pencitraan. Kecenderungan ini muncul di dalam proses politik yang berusaha untuk menggambarkan citra yang positif terhadap posisinya dalam politik dan citra negatif untuk lawan politik. Saluran politik yang ketiga adalah sosial media, yang muncul melalui *bubble-bubble issue*. *Bubble issue* adalah pandangan politik yang dilontarkan yang bisa ditanggapi atau tidak ditanggapi oleh masyarakat. Perkembangan ini memperlihatkan perubahan dan dinamika dari pengemasan opini publik. Opini publik tidak lagi dimonopoli oleh *mainstream* media, tetapi sudah mulai berkembang di sosial media. Lebih lanjut GH menjelaskan bahwa:

”Nah saya suka mengamati, misalnya isu apa yang hari ini atau minggu ini kemudian *dishare* oleh teman-teman, oleh aktivis atau operator politik. Bahkan saya sempat ngobrol ya mbak, dengan salah satu orang yang bekerja di *advertising agency* yang kebetulan dapat *project* menjadi operator politik dari salah satu partai besar yang tugasnya adalah mengoperasikan 8 atau 10 akun *twitter* yang kloningan artinya akunnya banyak tapi dimiliki oleh satu orang. Tujuannya untuk (menghasilkan) *buble issue*. Nah saya suka mengamati itu”.

Buble issue dilakukan dengan *name calling technique* yaitu pemberian label buruk bagi kelompok-kelompok tertentu. Caranya adalah dengan memberikan informasi atau *men-share* misalnya tindakan korupsi yang dilakukan oleh beberapa pihak.

“Saya tidak menafikan bahwa kasus korupsi itu kan *ultimate crime* atau *tophead crime*. Kemudian penegakan hukumnya juga lama. Ada kelompok-kelompok tertentu di masyarakat yang mungkin merasa bosan dengan cara-cara penegakan hukum yang kerap kali tidak sampai pada penjelasan yang diharapkan oleh masyarakat sehingga muncul juga upaya-upaya melakukan proses perlawanan melalui situs jejaring sos. Kalau ini terus konsolidatif bisa menjadi saluran baru untuk ekspresi *cyber protest*”.

Sedangkan tujuan yang kedua adalah melihat isu-isu yang “murni”, dari pandangan masyarakat. menurut GH, informasi di media massa dibatasi oleh aturan-aturan untuk mendukung kredibilitas informasi. Salah satunya adalah informasi yang memaparkan keterangan dari pihak-pihak yang berseteru, supaya tidak terlihat memihak, namun;

“Sosial media itu lebih leluasa orang mengekspresikannya sehingga, *sharegroup consciousness* atau kesadaran kelompoknya menjadi lebih *genuine*. Meskipun tidak menutup kemungkinan akan muncul titik lemahnya yaitu adanya suatu *setting-an* opini publik yang sengaja diinjeksikan kepada para pemakai sosial media. Sehingga apa, digiring pada satu opini tertentu”.

Penggunaan media sosial di dalam proses demokratisasi secara umum dapat dilihat dari tiga tipologi. Tipologi yang pertama adalah kelompok yang radikal. Kelompok radikal ini terkenal dengan istilah *hactivist*. *Hactivist* tidak hanya men-*share* pandangannya, akan tetapi juga melakukan peretasan, misalnya kasus kawat diplomatik, Indonesia terkait dengan SBY. Peretasan tersebut dilakukan oleh Julian Astinger dan teman-temannya, dan berasal dari luar Indonesia. Tipologi yang kedua adalah mereka yang melakukan proses *diffusi*. Orang ini menabur isu seperti menabur benih di kantong-kantong masyarakat. Peran mereka merupakan salah satu bagian dalam konteks cyberdemokrasi. Mereka memanfaatkan internet sebagai alat untuk menyebarkan gagasan, ide, *me-link*, dan melakukan protes. Mereka juga melakukan upaya untuk berinteraksi seperti bertanya, menginterpretasi dan memberikan komentar.

Pengaruh gagasan terhadap demokratisasi dapat dilihat dari *follower*. Pada kasus-kasus tertentu *follower* berupaya untuk dalam group atau diskusi-diskusi di media. Para *follower* sedikit banyak terpengaruh oleh kasus-kasus “besar” yang berpengaruh. Seperti isu yang terkait Nazaruddin. Ketika kasus tersebut diinjeksikan melalui *twitter* atau FB, ternyata kasus tersebut pernah menjadi *trending topic* beberapa hari. Kenyataan ini menunjukkan bahwa mereka membuka *link* yang *dishare* di *twitter*. Pembentukan isu terjadi jika isu tersebut muncul menjadi aktivitas di dunia nyata. Contohnya adalah Forum Indonesia Sejahtera, awalnya menebar gagasan kemudian diikuti oleh kumpul-kumpul, kemudian memperbincangkan, melihat potensi untuk gerakan sosial. Para *follower* yang berkumpul di Taman Ismail Marzuki dimulai dari inisiasi di FB, misalnya mereka mengevaluasi satu tahun pemerintahan SBY. Dengan demikian, proses menginisiasi tidak hanya dilakukan oleh mahasiswa tetapi juga orang “awam” melalui situs jejaring sosial atau media sosial.

Proses demokratisasi juga terjadi pada pertautan global-lokal, dalam arti isu bergerak dari global ke nasional atau dari lokal ke nasional. GH melihat hal itu jarang terjadi pada saat ruang ekspresi hanya menggunakan media massa. FB atau *twitter* bersifat *unrestricted*

dan dinamis sehingga bisa diakses oleh siapa saja di mana saja. Orang dari daerahpun bisa menjadi penggerak, menjadi inisiator. Inisiator “Satu Juta Tanda Tangan” berdomisili di luar Jawa. Artinya siapapun dapat menginisiasi menggunakan internet atau sosial media. Bisa dibayangkan bila inisiasi gerakan Cicak vs Buaya tidak menggunakan sosial media, maka isu harus dikembangkan dari pusat. Pada saat mekanisme dinamis dan *unrestricted* tidak terbatas pada Jakarta, bisa dari Bandung, Surabaya, Yogya, Medan, dan Makasar. Relasi kuasanya terdistribusikan dengan baik.

Mekanisme media sosial membuat relasi kuasa awalnya mempengaruhi geopolitik misalnya sangat Jakarta centris, atau nasional centris, sehingga isu daerah dilupakan. Tanpa media sosial, forum yang diinisiasi orang daerah biasanya berkembang lebih lambat dibanding dengan yang diinisiasi oleh orang di pusat atau Jakarta. Oleh karena itu, pada saat internet *users* itu menggeliat, artinya orang dari luar daerah pun bisa menginisiasi gerakan yang berpengaruh dalam lingkup nasional. Ini sebenarnya cyberdemokrasi, karena sifatnya yang *unrestricted* dan dinamis.

Demokrasi cyber juga melahirkan tokoh lokal. Dalam hal ini konteksnya adalah proses mengkonstruksi citra yang sangat dimungkinkan untuk meng*create*. Salah satu dari sisi ekspresi simbolik di situs jejaring sosial atau sosial media seperti *weblog* interaktif tidak semata-mata ditujukan untuk protes tetapi juga untuk konstruksi citra. Proses ini dapat dilakukan, apalagi jika didukung oleh konvergensi teknologi, misalnya seseorang memasang video di FB atau memasang foto, berkomentar di *twitter* menggunakan *link*. Sehingga yang terjadi adalah konvergensi simbolik, proses berbagi makna, atau terjadi *sharegroup consciousness*. Salah satu caranya adalah dibentuk melalui tema fantasi dan retorik. Kemudian untuk mengkonstruksi citra digunakan momen yang membentuk fantasi yang pada jargon-jargon para politisi yang secara perlahan bisa diinjeksikan ke masyarakat melalui sosial media.

“*Sharegroup consciousness*”, adalah kata-kata yang dapat membangkitkan rasa dan kesadaran untuk memilih. Dalam konteks yang lebih luas, kata-kata tersebut adalah retorik yang secara teoritis menjadi mekanisme yang tepat. Sebagai ilustrasi kata tema fantasi seperti “*Yes We Can*”, yang terkait dengan Obama, seperti penggunaan kata *triple 0*; “*Obama, Online, Operation*”. Kata-kata seperti ini merupakan mesin yang dahsyat untuk memobilisasi suara masyarakat.

Sosial media dianggap memiliki efek penekan terhadap rejim pemerintahan yang berjalan. Di dalam pembukaan telah disebutkan bahwa mekanisme ini dipergunakan di beberapa Negara Dunia Ketiga sebagai cara untuk menurunkan pemerintahan. Beberapa dari gerakan tersebut berhasil. Bagaimana di Indonesia? Pertanyaan ini merupakan salah satu daya tarik dari penggunaan jejaring sosial saat ini. Berdasarkan pengamatan GH, penggunaan jejaring sosial saat ini belum dilihat dalam konteks kemungkinannya untuk menurunkan rejim. Karena untuk penurunan rejim dibutuhkan karakter atau prasyarat yang lain. Namun di dalam konteks penurunan popularitas, jejaring sosial terlihat cukup berperan. Berdasarkan pengamatan GH pada pelantikan SBY pada 20 Oktober 2009, popularitasnya “... sekitar 50 persen ke atas”. Pada saat itu kritik terhadap popularitas SBY dilakukan melalui media massa. Posisi SBY masih bisa bertahan, akan tetapi ketika upaya mengguncang popularitas tersebut dilakukan melalui sosial media, popularitas SBY turun hingga 36.7%. Salah satu yang membuat jejaring sosial menjadi efektif di dalam upaya mengguncang popularitas SBY adalah karena isinya yang cenderung lebih personal.

Dalam hal ini terdapat efek sosial yang berbeda dari kedekatan individu dengan media massa. Individu meskipun mengkonsumsi media massa, tetapi kemungkinan mereka mengakses media tersebut terbatas, baik karena waktu mereka terbatas juga karena program atau tayangan yang berbeda juga. Sedangkan dengan jejaring sosial informasi muncul dengan cepat karena adanya gadget yang lebih praktis seperti HP atau Blackberry. Melalui gadget seperti itu, informasi bisa masuk melalui *twitter* atau tiba-tiba dapat *link facebook*,

atau terkoneksi atau di”invite” untuk masuk dalam kelompok seperti ini. Pandangan GH “... ada kontribusi sih mbak, sebagai *pressure group*. Tapi kan definisi *pressure group* apa dulu nih soalnya misalnya *pressure group* dan *Interest group* sesuatu yang beda ya misalnya kalau *interest group* itu *multy issue*, *pressure group* isunya tunggal”.

Dalam konteks wacana korupsi, menurut GH, “Kalau *pressure group* dalam konteks korupsi saya ada optimisme dalam konteks sebagai sebuah ekpresi, iya, tetapi tidak dalam konteks mampu mengartikulasikan *pressure group*nya dalam satu gerakan yang *sustainable*”. Sehingga di dalam hal ini penggunaan jejaring sosial, merupakan cara untuk mengekspresikan pendapat tetapi, untuk menggarapnya menjadi sebuah gerakan, terdapat kerawanan tentang *sustainability*. Berbeda dari media massa yang memiliki sejumlah orang untuk menggarap *agenda setting*, di dalam media sosial, tidak jelas hubungan antara keduanya. Sebagai ilustrasi seseorang atau sekelompok orang bisa menggarap satu isu, namun pada saat lain terdapat orang lain yang mengutarakan pandangan lain. Sehingga kita bisa melihat tema-tema yang muncul saling berbeda bahkan bertentangan misalnya isu menohok SBY atau Kepolisian, sedetik kemudian ada pandangan tentang rekening gendut, namun ada pula yang mampu bertahan agak lama dan menarik banyak pengikut seperti kasus Cicak vs Buaya.

Sehingga di dalam pembahasan tentang media sosial seringkali dipertanyakan siapa yang akan muncul dan mampu bertahan karena memang ada masalah *sustainability*. Menurut GH pandangan yang berkembang juga sangat cair, pengguna internet bisa datang hari ini, namun besok belum tentu kembali pada isu yang sama. Jika membayangkannya sebagai sebuah ruang publik, GH merasa “Jadi menurut saya optimisme menjadikan sosial media sebagai ruang publik iya, tetapi *sustainability* sebagai sebagai *pressure group* saya tidak yakin nih”. Media sosial akan memainkan peran yang lebih jelas pada situasi sosial di mana media massa ditekan. Kasus di Mesir memperlihatkan bahwa media massa sangat dikontrol sehingga media sosial menjadi efektif penggunaannya. Kita bisa melihat bahwa TV Al

Arabia, dan Koran Al Arabia dimiliki oleh Husni Mubarak, sehingga sosial media menjadi ruang publik yang efektif.

Pendapat GH mengenai korupsi di Indonesia bisa dilihat dari pernyataan GH berikut:

”*Keyword* mbak ya, Indonesia mengarah pada kleptokrasi itu istilah negara yang dipimpin pencuri misalnya kasus Sesmenpora dan Kemenakertrans jadi bukti, ini kan puncak dari gunung es. Politik anggaran ini ada di semua kementerian mbak *budgeting* dan pengelolaan sebuah *project* disebuah kementerian”.

Pandangannya tentang kleptokrasi menjadi kunci yang penting untuk melihat wacana korupsi yang berkembang di Indonesia. Situasi seperti ini belum akan surut kata GH:

”Menurut saya ya mbak ya *entry* tindakan korupsi di Indonesia itu pertama adalah politik anggaran yang terjadi di banggar (badan anggaran) itu jelas tuh. Ini kan hubungannya dengan usulan dari kementerian-kementerian. Disitu sudah terjadi transaksi. kegiatan politik berbasis APBN-politik anggaran di Banggar-.... Kemudian yang kedua di level eksekusi projek”.

Situasi ini merupakan situasi sosial yang dihadapi oleh Indonesia di dalam konteks korupsi.

Pandangan GH ini sesuai dengan ungkapan yang sama dari Ikrar Nusa Bhakti. Kleptokrasi merupakan turunan dari pengertian tentang kleptomani yaitu tindakan di mana seseorang mengambil barang orang lain dan tidak merasa bersalah. Tindakan tersebut adalah tindakan spontan, dan merupakan kecenderungan tindakan psikologis seseorang. Hanya saja kleptokrasi disini mengacu negara.

Kleptokrasi tidak lagi digunakan untuk menunjukkan ciri psikologis seseorang, melainkan sudah dipergunakan untuk menggambarkan kecenderungan ”kelompok”, seperti komentator politik di bawah ini;

”Jika Presiden Yudhoyono tidak berusaha keras untuk menghentikan berbagai praktik korupsi di berbagai kementerian, bukan mustahil kabinet yang dipimpinnya akan dikenal sebagai “Kabinet Kleptokrasi” karena diisi oleh para bawahan yang sukanya mencuri (untuk tidak mengatakan merampok) uang negara karena posisi politik mereka”.⁵⁸

Jika Bhakti menandai kecenderungan parlemen, karena kasus yang berkembang setelah Bibit Chandra sekarang ini sudah menjadi pembicaraan politis. Korupsi sudah berkembang dari upaya individual untuk memperkaya diri sendiri, kemudian menjadi upaya kelompok untuk mempertahankan kekuasaan.

Situasi sosial yang berhubungan dengan korupsi cenderung menjadi sebuah jalinan yang kompleks karena adanya hubungannya dengan partai politik. Menurut GH ”Kemudian yang ketiga itu terkait dengan adanya proses keterhubungan projek itu sebagai sebagai basis logistik dari partai politik. Karena kita tahu bahwa salah satu basis logistik partai politik di Indonesia adalah proyek-proyek dari APBN dan APBD kan mbak”.

Dalam konteks korupsi maka menurut GH ”Kalau memang tujuannya meristriksi potensi-potensi korupsi harus, bukan lagi mungkin”. Artinya, salah satu tindakan yang dapat dilakukan adalah membatasi mekanisme partai dalam mengatur masalah dana. Tentunya terdapat resistensi dari partai politik. Berdasarkan pengamatan GH ”... Partai sih pasti tidak mau karena apa mbak kita tahu bahwa dalam ketidakjelasan politik anggaran di DPR maka *hengki pengki* ini kan menjadi bagian paling utuh dari instrumen menjadikan anggaran-anggaran itu sebagai logistik”. Sehingga terdapat beberapa hal yang akan menjadi pergulatan yang ketat tentang aturan, sama hal nya dengan pertanyaan apakah KPU bisa independen. Pada dasarnya partai politik tidak ingin menjadikannya independen.

⁵⁸Ikrar Nusa Bhakti, Kabinet Kleptokrasi, dalam <http://aiipi.wordpress.com/2011/09/12/kabinet-kleptokrasi/>. Diunduh 26 September 2011.

Dengan demikian, terdapat situasi yang rumit untuk mengentaskan Indonesia dari korupsi. Berdasarkan pandangan GH, kekuatan masyarakat sipil harus mengisi ruang publik. Masyarakat sipil harus menjadi *pressure group*, pandangan ini meski terasa normatif namun merupakan salah satu upaya yang penting. Masyarakat sipil perlu menyadari kekuatan yang dimilikinya yaitu melakukan tekanan yang terus menerus. Sebagai ilustrasi salah satunya adalah menekan supaya “banggar” ditiadakan dan fungsinya dikembalikan pada fraksi-fraksi sesuai dengan kebutuhan. Dengan kata lain menurut GH yang perlu dilakukan adalah mengurangi peran “banggar”.

Masyarakat Indonesia memang perlu menetapkan korupsi sebagai *top head crime*, jika tidak maka kasus akan selalu berulang, seperti sebuah labirin. Dapat dibayangkan ketika Indonesia merayakan Proklamasi yang mendapatkan “hadiah” adalah koruptor yang mendapatkan remisi. Artinya mereka mendapatkan hadiah dari pemerintah, tentunya hal tersebut harus dilihat sebagai tindakan yang melukai perasaan warga masyarakat. Selain itu, tindakan pemberian remisi menempatkan posisi koruptor dalam daya tawar yang lebih baik. Mengapa tindakan tersebut dilakukan, berhubungan dengan posisi SBY yang bukan *high risk taking leader*, bukan orang yang biasa mengambil resiko tinggi sehingga selalu membuat kompromi politik. Tanpa menempatkan korupsi sebagai *top head crime* maka korupsi akan menjadi *labirin* bagi penegakan hukum.

Pemaparan Demokrasi *Offline* Kasus Cicak dan Buaya

Paparan hasil penelitian di bagian ini adalah untuk menjawab pertanyaan tentang penanganan masalah korupsi di Indonesia dan peran institusi penting yang ada di dalamnya (KPK) dalam melakukan pemberantasan korupsi. Paparan ini terdiri dari beberapa wawancara dan diskusi yang dilakukan dengan mahasiswa di kota Yogyakarta dan Bandung, khususnya isu korupsi dan penggunaan media sosial.

Di dalam diskusi dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Gerakan Mahasiswa National Indonesia (GMNI), Himpunan

Mahasiswa Islam Indonesia (HMI) dan Persatuan Mahasiswa Muslim Indonesia (PMMII), terlihat adanya kepedulian terhadap masalah kepemimpinan nasional. Masalah kepemimpinan nasional muncul melalui berbagai media terutama karena isu negatif seperti maraknya korupsi etika moral dalam praktik politik. Akan tetapi, situasinya dimaknai secara berbeda oleh oknum dalam kepemimpinan nasional, mulai dari aparat pemerintah, anggota dewan sampai para elit partai. Bukannya mereka merasa risih, justru mereka seperti menjadi terlalu asyik dengan kebebasan yang dilegitimasi oleh demokratisasi.

Berbicara tentang korupsi, terlihat adanya perbedaan secara umum antara korupsi pada masa Orde Baru dan Orde Reformasi ini. Pada jaman Orde Baru korupsi terjadi pada kalangan tertentu terutama dalam lingkungan birokrasi dan militer. Saat ini korupsi justru meluas sampai ke berbagai kabupaten bahkan ke pelosok desa. Selain itu, korupsi ini juga telah memasuki ranah legislatif baik di tingkat pusat maupun daerah melalui praktik broker atau percaloan proyek.

Isu yang berkaitan dengan korupsi adalah persoalan krisis etika dan moral yang melanda kepemimpinan nasional. Seolah-olah moralitas mereka tergadaikan oleh kuatnya tarikan kekuasaan dan kekayaan yang instan. Kondisi ini menghasilkan situasi yang saling melegitimasi, dalam pengertian orang memahami bahwa meskipun politik itu tidak bebas nilai, namun dalam caranya, politik menghalalkan segala cara untuk mencapai kepentingannya dengan cara mengabaikan etika. Situasi ini terlihat pada mekanisme politik yang diwarnai oleh uang. Uang telah menjadi faktor utama dan penting untuk memenangkan kepentingan politik maupun untuk melemahkan lawan-lawan politik walaupun untuk mendapatkan uang tersebut dilakukan dengan cara korupsi. Maka terdapat perlombaan memenangkan pemilihan kepala daerah dengan berbagai cara, dan tentunya melalui politik uang.

Demokratisasi yang seharusnya menjadi kebanggaan, saat ini diwarnai oleh permainan politik uang dan cara-cara yang kotor dengan melakukan politik “adu domba” yang berakibat pada pecahnya konflik

sosial. Hasil dari proses demokrasi seperti itu melahirkan sosok kepemimpinan yang “cacat moral” karena mereka cenderung meneruskan praktik kotornya melalui berbagai korupsi. Akibatnya, para pemimpin baru itu baik dalam sebuah kabupaten, kotamadya atau provinsi tidak mampu membuat program yang bermanfaat bagi rakyat. Mereka tidak mampu mensejahterakan rakyatnya. Kemiskinan dan pengangguran masih terus menjadi bagian permasalahan daerah dan masyarakat pada umumnya masih tetap tidak berdaya.

Pada tingkat nasional perang terhadap korupsi menjadi agenda yang harus dikerjakan pemerintahan SBY. Perang terhadap korupsi adalah untuk mewujudkan *Good Governance* pada tataran implementatif dan bukan retorik semata. Pada tataran kepemimpinan nasional selama ini masih dihadapkan pada persepsi bahwa SBY masih lebih banyak bermain politik pada ranah retorika ketimbang tindakan yang nyata dan cepat untuk mengatasi masalah di lapangan. Karena dalam perjalanan dua periode pemerintahannya terdapat kasus korupsi kelas kakap yang belum diselesaikan. Namun demikian, apresiasi perlu diberikan pada kepemimpinan Presiden SBY di mana KPK mampu bekerja dengan baik. Sayang pada periode kedua pemerintahan SBY, institusi KPK melemah kembali. Kasus korupsi yang ditangani adalah kasus korupsi yang kecil, beberapa dari koruptor telah melarikan diri keluar negeri dengan alasan berobat. Masalah korupsi memperlihatkan tantangan untuk mewujudkan *good governance* di era pemerintahan SBY yang kelihatannya bukan tantangan yang ringan. Berbagai kebijakan dan alternatif pemecahan masalah harus dilakukan dari tingkat yang paling dasar.

Pemanasan politik melalui kasus Cicak Buaya membuka berbagai macam jenis penyuaipan sebagaimana yang disinyalir melalui fenomena “makelar kasus” (markus). Masalah seperti ini merupakan pekerjaan rumah yang tidak ringan bagi pemerintahan SBY untuk dua tahun mendatang. Begitupun kasus lain seperti Bank Century, sangat mempengaruhi kinerja dan kepercayaan publik di pemerintahan ini. Belum lagi berbagai potensi kasus korupsi pada tingkat pemerintahan

pusat hingga pemerintahan daerah dan desa yang memperlihatkan problem bangsa yang tidak kalah beratnya.

Karena perkembangan semacam ini, tudingan bahwa Indonesia adalah negara korup cukup masuk akal. Sebuah lembaga bernama *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) yang berbasis di Hongkong telah menegaskan tentang buruknya birokrasi Indonesia yang belum mengalami perbaikan berarti dibandingkan dengan keadaan di tahun 1999. Penilaian ini didasarkan pada pandangan dan pendapat para eksekutif bisnis asing (*expatriats*), yang memiliki pengalaman bekerja di Indonesia.⁵⁹

Upaya pemberantasan korupsi melalui KPK mendapatkan berbagai rintangan dan halangan. Tantangan yang sangat berat adalah upaya mengkriminalisasi beberapa pimpinan KPK, seperti Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Tetapi, *counter attack* terhadap upaya pemberantasan korupsi dilakukan oleh tangan-tangan yang tidak terlihat untuk melemahkan gerakan KPK. Melalui kasus Bibit-Chandra dapat dilihat perlawanan yang luar biasa dari masyarakat, salah satunya melalui gerakan *facebookers* atau *blogger* dan *twitter* sehingga kasus kriminalisasi pimpinan KPK terpaksa dihentikan dengan alasan politis mengakui tekanan kelompok ini.

Kasus korupsi seperti diungkap oleh Prasojo kepada harian Kompas⁶⁰ semakin menggurita di Indonesia, sudah menjalar kesemua sel pemerintahan dan lembaga politik. Oleh karena itu, hanya bisa diberantas dengan langkah radikal, upaya penanganan korupsi perlu dilakukan oleh penegakan hukum. Masyarakat perlu mengorganisasi diri untuk menekan pemerintah, KPK dan Kejaksaan agar membongkar kasus-kasus korupsi. Tantangan ini cukup berat karena hasrat perilaku mengambil uang rakyat demi kepentingan pribadi dan kelompok,

⁵⁹Lihat Endang Turmudi. 2011. *Menilik Kesempatan Kalangan Muda Memasuki Kepemimpinan Nasional*. Dalam Henny warsilah, 2011: Alih Kepemimpinan Generasi Muda. Jakarta: LIPI Press.

⁶⁰Harian Kompas, 10 Juni 2011.

semakin kuat karena ditopang oleh jejaring yang saling mendukung di antara pelaku korupsi.

Secara sosiologis upaya untuk memerangi korupsi dapat dilakukan dengan membentuk aliansi orang-orang yang berada di dalam pemerintahan atau di dalam partai politik yang punya integritas dan berupaya melawan sistem yang korup. Secara sistematis upaya pencegahan korupsi dilakukan dengan merombak sistem di pemerintahan menjadi lebih bersih, transparan dan bertanggungjawab. Selain itu, juga perlu membentuk peninjau independen yang berfungsi mengawasi dan mengevaluasi program-program yang ada.

Sementara menurut Fajar,⁶¹ korupsi sudah menjadi alat politik antar elit. Ada dua hal penting yang harus dilakukan untuk memberantas korupsi, pertama perlu terapi kejut pemberantasan korupsi kelas kakap yang selama ini dinanti publik, seperti mengatasi kasus Bank Century dan mafia pajak-Gayus Tambunan. Terapi kejut ini diperlukan untuk menunjukkan pada mereka yang terlibat kasus korupsi. Kedua, dengan cara memobilisasi tekanan publik terhadap Presiden, KPK, Kejaksaan dan pengadilan untuk memberantas korupsi. Sekarang ini dapat diasumsikan bahwa korupsi tumbuh subur karena pemerintah tidak konsisten, dan publik dipaksa percaya pada retorika pemberantasan korupsi.

Sedang menurut Diansyah⁶² dari divisi monitoring hukum *Indonesian Corruption Wacht* (ICW), upaya KPK memberantas korupsi akan lebih efektif dalam bentuk pengendalian aset dan memiskinkan koruptor. KPK selama ini tidak pernah menggunakan UU No.8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana, dan pencucian uang (*money laundering*) dalam menjerat pelaku korupsi dan merampas asetnya. Padahal dengan undang-undang itu, KPK bisa menerapkan strategi "*follow the money*" untuk melacak tindak korupsi yang terjadi. KPK tidak bisa bekerja sendiri, untuk itu pusat pelaporan

⁶¹Harian Kompas, 10 Juni 2011.

⁶²Harian Kompas, 10 Juni 2011.

dan analisis transaksi keuangan (PPATK) dapat membantu KPK dalam kondisi ini. Dalam menjerat pelaku korupsi biasanya KPK menggunakan UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (TIPIKOR).

Kriminalisasi Kasus Bibit-Chandra

Kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah kembali menjadi tersangka menyusul putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerima permohonan praperadilan Anggoro Widjojo. Putusan tersebut menyatakan bahwa Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) yang dikeluarkan oleh Kejaksaan tidak sah dan memerintahkan agar perkara Bibit-Chandra dilimpahkan ke pengadilan.⁶³ Walau secara yuridis formal, putusan pra peradilan tidak salah, penerbitan SKPP telah menimbulkan pertentangan logika berpikir hukum. Disatu sisi, pada kasus kriminalisasi Bibit-Chandra, Kejaksaan telah mengeluarkan P-21, yang berarti perkara telah lengkap, termasuk bukti-buktinya, dan siap dilimpahkan ke Pengadilan namun disisi yang lain, Kejaksaan menerbitkan SKPP.⁶⁴ Berdasarkan ketentuan Pasal 140 ayat (2) KUHAP, SKPP diterbitkan jika perkara tersebut tidak memiliki cukup bukti. Perkara tersebut bukan sebuah perbuatan pidana atau perkara yang ditutup demi hukum. Sementara itu, perkara ditutup demi hukum bila perkara tersebut *nebis in idem*, kadaluarsa atau meninggal dunia.

Proses hukum Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah menjadi isu strategis di masyarakat karena menimbulkan kecurigaan adanya rekayasa terhadap proses hukum tersebut.⁶⁵ Pembiaran kasus ini akan menimbulkan hilangnya *public trust* terhadap lembaga penegak hukum yang ada. Oleh karena itu, hakim dalam mengadili

⁶³Eddy Os Hiariej, Staf Pengajar Hukum Pidana Fakultas Hukum UGM. Dalam "*Quo Vadis*" Kasus Bibit-Chandra? Opini Harian Kompas, 28 April 2010, Hlm. 7.

⁶⁴*Ibid.*

⁶⁵Laporan dan Rekomendasi Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum Atas Kasus Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto.

perkara Bibit-Chandra harus bertindak hati-hati dan tidak hanya berkuat pada formal legalistik. Tetapi juga harus memerhatikan kasus tersebut dari berbagai aspek, termasuk aspek sosiologis. Terlebih dalam hukum pidana yang dicari adalah kebenaran materil dan bukan kebenaran formal.

Upaya Dukung Anti Korupsi

Gerakan mahasiswa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) UGM menurut pengakuan ketuanya, sejak lama telah melakukan gerakan yang bergerak di ranah hukum walau basis utama HMI adalah ideologi agama. Misal membentuk tim *task force* korupsi bergabung dengan ICW, membentuk aliansi pemuda untuk bangsa yang berasal dari organ gerakan-gerakan mahasiswa dan pada bulan Mei tahun 2011 ini membentuk gerakan mahasiswa Yogyakarta (GEMA Yogyakarta) untuk melakukan diskusi rutin sekitar ranah politik dan hukum terkait isu hangat yang berkembang di masyarakat. Diskusi dilakukan dengan cara lintas gerakan dengan orientasi akhir melakukan aksi bersama untuk menekan pemerintah dapat bersikap tegas dalam pemberantasan korupsi. Selain itu, juga mendukung KPK untuk independen dalam menyelesaikan tugasnya, mereka juga menolak kriminalisasi KPK.

Menyikapi maraknya kasus korupsi yang mencederai demokrasi, LF sebagai Presiden BEM UGM mengatakan bahwa gerakan mahasiswa harus mempunyai arah, misal menolak kriminalisasi KPK karena saat ini KPK telah menjadi alat kekuasaan dan mengalami “normativisme”. Terlebih-lebih saat ini hukum telah menjadi produk politik, di mana politik menjadi panglima yang menguatkan ekonomi sehingga hukum tidak terlepas dari intervensi pasar (kapitalisme). Untuk itu BEM giat merancang diskusi dan aksi untuk memerangi kasus-kasus korupsi di darah maupun pada level nasional. Selain aksi dukungan terhadap kasus bibit-Chandra misalnya disuarakan pihak BEM melalui jejaring sosial *facebook*: *bem_ugm_menyapa*, *Twitter*: *bemkmugmenyapa* dan *website*: *bemkmugm.org*

Sementara HMI, menjadikan kasus Bibit-Chandra sebagai momentum bagi gerakan untuk mendorong penyelesaian kasus korupsi yang membelit bangsa ini. Pada pertemuan HMI cabang Sleman pada tahun 2009, dengan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan PUMI menyikapi kasus Bibit-Chandra dengan cara menolak kriminalisasi KPK. Pernyataan sikap itu ditindaklanjuti dengan serangkaian aksi demonstrasi yang mengusung penolakan terhadap kriminalisasi KPK.

HMI, mengakui lembaga KPK memiliki *bargaining position* yang lebih baik saat ini karena para pemimpin KPK lebih muda sehubungan dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di tubuh KPK. Namun demikian, dalam tataran lapangan mereka belum memiliki gebrakan nyata seperti ketika KPK dipimpin oleh Antasari. Pasca kasus Bibit-Chandra ada kelambanan KPK, dahulu Antasari mampu menyentuh Aulia Pohan, besan Presiden SBY, ketika itu KPK belum mampu menyentuh bendahara Partai Demokrat Nazarudin dan Hakim Agung Syariffudin. Artinya KPK belum mampu menangani kasus korupsi tingkat tinggi, hanya menyelidiki kasus-kasus pinggiran saja. Padahal banyak kasus korupsi yang melibatkan petinggi parpol atau pejabat negara seperti kasus IT KPU, Bank Century, Kasus mafia pajak-Gayus Tambunan.

Ketika kasus Bibit-Chandra di *blow up* memang ada efek psikologis di mana dukungan publik menguat dan sebaliknya jajaran pimpinan KPK rawan terhadap praktik hukum bodong. Kerawanan tersebut dapat dilihat dari kasus Antasari yang dijerat oleh kasus yang memalukan yang kebenarannya belum dapat dibuktikan. Maka yang terjadi tidak ada transformasi KPK, padahal dukungan publik kuat tetapi tekanan terhadap KPK juga semakin kuat.

Informan dari Bandung, beberapa mahasiswa dari UPI (Universitas Pendidikan Bandung) Bandung, merasa sangat akrab dengan internet. Ada yang menggunakannya melalui *Hand Phone*, *BlackBerry*, mengakses internet melalui *modem*, dan juga rental internet yang sekarang banyak bertebaran di sekitar kampus. Bagi mereka, internet sangat potensial untuk mengembangkan diri,

menambah pengetahuan, dan juga mengikuti perkembangan informasi dalam bidang apa pun, termasuk dalam bidang politik yang sangat dinamis.

Jejaring sosial yang banyak mereka gunakan adalah *facebook*. Selain untuk meng-*update* status, mereka juga bisa saling bertukar informasi mengenai apa pun melalui FB. Bahkan, beberapa orang di antara mereka menyatakan bahwa

Melalui FB saya bisa mengetahui isi hati orang lain tentang sesuatu. Bisa mengetahui ekspresi dan sikap orang lain tentang peristiwa. Misalnya, komentar-komentar orang tentang kasus korupsi.

Saya bisa mengungkapkan kekesalan saya dan semua ungkapan hati saya kepada pemerintah yang lamban memberantas korupsi melalui FB. Malas ikut demo. Nah, kalau melalui FB nggak usah berpanas-panas kan suara kita bisa diekspresikan.

Bagi mereka internet bukan sekadar FB. Banyak hal yang bisa mereka lakukan dengan menggunakan internet. Bahkan, untuk mengerjakan tugas pun sebagian di antara mereka menggunakan sumber internet meskipun mereka mengakui ada buruknya juga karena menjadi agak malas membaca buku aslinya.

Mereka tidak begitu akrab dengan dunia *blog* meskipun mereka mengetahui adanya *blog* di internet. Maksudnya, di antara informan ini tidak ada yang aktif ikut nge-*blog*. Namun, tetap saja mereka bisa menggunakan *blog* orang lain yang membahas sesuatu untuk ikut mengomentarnya kalau memang ingin terlibat di dalamnya.

Mereka memang tidak terlibat gerakan sosial secara langsung di masyarakat, misalnya ikut kelompok-kelompok yang memberikan tekanan kepada pemerintah. Namun, mereka memahami bahwa keterlibatan mereka tidak harus diartikan ikut turun ke jalan atau cara-cara lain yang lebih kelihatan kehadiran fisiknya. Salah seorang di antara mereka menyatakan

Saya bisa terlibat gerakan sosial melalui komentar-komentar saya di *facebook* atau saya memberikan dukungan terhadap *Facebook* tertentu yang sesuai dengan pendapat saya. Saya memang tidak pernah turun ke jalan.

Mereka menyadari bahwa sekarang banyak gerakan sosial dilancarkan melalui dunia maya. Itu membentuk opini yang luar biasa. Namun, memang harus dibantu oleh media-media lain seperti televisi dan surat kabar untuk menggencarkan gerakan sosial karena bantuan pemberitaan dari televisi atau surat kabar membuat orang penasaran untuk ikut bergabung dalam gerakan sosial di dunia maya. Misalnya gerakan sosial dukungan terhadap KPK.

Kalau tidak ditolong media siapa yang menolong mereka? (Maksudnya lembaga KPK). Berharap kepada pemerintah? Lha mereka juga terlibat kok dalam berbagai kasus. Makanya masyarakat harus bergerak dengan caranya sendiri. Sekarang mah bisa saja kita bergerak di dunia maya. Banyak orang mengenal internet. Memang agak sulit sih bagi masyarakat bawah untuk terlibat dalam hal seperti ini. Tapi mereka kan nonton televisi sehingga tau apa yang terjadi.

Keefektifan penggunaan dunia maya untuk menekan pemerintah dalam penanganan berbagai kasus untuk saat ini ada yang efektif ada yang tidak. Namun, setidaknya dunia maya memperluas ruang partisipasi bagi masyarakat untuk terlibat.

Memang ada yang berhasil ada pula yang tidak. FB Dukungan Sejuta *Facebooker* untuk Bibit-Chandra kan berhasil. Dukungan *facebooker* untuk membebaskan Prita dari jerat hukum Undang-Undang apa itu,..... ITE ya..... akhirnya juga berhasil. Jadi jangan khawatir kalau orangnya nggak kelihatan nggak bisa menekan pemerintah. Bisa kok.

Bagi mereka, FB dapat digunakan untuk menggalang massa. Hal itu ditekankan oleh salah seorang informan yang kuliah di ITB. Dia sangat yakin bahwa dunia maya akan sangat membantu dan sangat potensial untuk menjadi kelompok penekan manakala lembaga-lembaga yang berwenang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Misalnya, DPR

yang seharusnya menjadi kelompok yang mewakili rakyat dan kenyataannya tidak bisa menampung aspirasi rakyat, bisa tertampung di dunia maya.

Kita memang belum bisa berharap pada berbagai lembaga pemerintah ini untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Satu-satunya jalan menyuarkan aspirasi kita ya melalui internet, bisa FB, Twitter, atau blog. Kalau turun ke jalan perlu usaha besar. Kalau demo di internet ya.... Gampang banget kan.....

Memang tidak ada jaminan bahwa gerakan sosial melalui dunia maya akan berhasil. Tapi apa ada jaminan pula bahwa gerakan sosial yang menghadirkan fisik seperti demo di jalanan juga berhasil. Enggak juga kan? Jadi sama saja prinsipnya. Ada yang berhasil, ada pula yang tidak. Nah, di sini harus dipelajari nih kenapa satu gerakan sosial tertentu melalui dunia maya bisa berhasil, sedangkan yang lain tidak. Ini PR bagi para aktivis.....

Berkaitan dengan upaya demokratisasi, baik informan mahasiswa UPI maupun ITB merasa yakin bahwa dunia maya sangat membantu upaya demokratisasi.

Ada kok hasil kajian yang menunjukkan hubungan internet dengan demokratisasi. Di negara-negara yang internetnya berkembang dengan baik pada umumnya sistem demokrasinya juga berkembang dengan baik. Begitu juga sebaliknya.

Kedua kelompok informan, baik dari UPI maupun ITB, antusias menanggapi masalah korupsi dengan gayanya masing-masing.

Korupsi di Indonesia? Payah bener. Amanat reformasi kan memberantas korupsi ya. Ini tampaknya memang belum berhasil. Tapi jangan pesimis. Mahasiswa harus tetap semangat mengawasi jalannya pemberantasan korupsi. Nggak usah turun ke jalan kalau nggak terpaksa. Kalau terpaksa, ya apa boleh buat.

Korupsi jalan terus. Nggak tau pemerintahnya ada di mana. Ngumpet. Bahkan, ikut terlibat. Coba lihat kasus Bank Century dan juga kasus Nazarudin. Itu kan melibatkan pemerintah, kan? Bagaimana pemerintah mau memberantas korupsi kalau sejak awal juga sudah tersandera dengan kasus korupsi. Pemerintah sendiri terlibat dalam mafia korupsi itu. Mau apa lagi?

Meskipun mereka tampak kecewa dengan pemerintah atas jalannya pemberantasan korupsi, mereka masih berharap media seperti internet dan televisi atau radio bisa terus menekan pemerintah untuk berbuat yang terbaik dalam hal pemberantasan korupsi. Kalau ada sinergi antara pengguna internet, televisi, dan surat kabar, pemerintah mau tidak mau akan merasa terawasi. Kalau hal itu tidak dilakukan oleh kelompok-kelompok tadi, menurut kalangan mahasiswa tadi, pemerintah bisa terlena dan hanya berbuat sekadar berbuat untuk pencitraan semata.

Informan, baik dari kalangan mahasiswa ITB maupun UPI, mengikuti perkembangan pemberantasan korupsi di Indonesia dengan alasan ini menyangkut masa depan mereka.

Masa depan kita ada di sana (maksudnya keberhasilan pemberantasan korupsi itu). Kalau korupsi gagal diberantas, mau jadi apa kita nanti?

Kita juga tidak rela reformasi dikhianati dengan cara korupsi yang lebih menggila lagi. Itu betul-betul menyakitkan masyarakat.

Mereka terus mengikuti perkembangan korupsi dari dunia maya maupun media massa. Penggunaan internet mereka pandang sebagai cara termudah untuk mengikuti perkembangan informasi korupsi dan pemberantasannya.

Berkaitan dengan penggunaan bahasa di internet, mereka tidak menganggap itu sebagai kekasaran. Mereka menganggap itu adalah ekspresi spontan.

Sebenarnya seperti itulah ekspresi masyarakat yang sesungguhnya. Gemes dan marah dan berbagai perasaan lain campur aduk melihat pemerintah yang tidak serius menangani korupsi. Hal itu tampak dalam berbagai komentar di internet. Tapi kan semua komenar tidak bernada kasar kan. Ada juga yang membuatnya menjadi humor. Banyak kok yang seperti itu.

Memang ada beberapa humor, bahkan karikatur, yang lucu dibuat berdasar kasus-kasus korupsi. Kasus cicak vs buaya, misalnya, dalam sebuah wacana di internet diplesetkan menjadi nyanyian anak-anak sebagai berikut.

Cicak-cicak di dinding
Diam-diam merayap
Datang seekor buaya
Plug..... lalu terungkap

Facebook, Sebagai Ruang Ekspresi

FB dukung Bibit-Chandra pada awalnya adalah laman yang memberikan tempat untuk mengekspresikan pandangan tentang hal ini. Namun laman ini kemudian berkembang menjadi laman yang mampu menggalang partisipasi masyarakat dan merubah laman ini menjadi penekan sosial. Penekan sosial ini berhasil menekan dan berhasil mengeluarkan mereka dari tahanan politik. Sehingga kegiatan individu-individu di ruang maya kemudian berhasil menjadi komunitas tatap muka seperti kutipan di bawah ini;

“Ya, komunitas-komunitas lokal. Manakala Internet melalui komunitas-komunitas maya-benar-benar bisa menjadi jalan untuk mewujudkan komunitas-komunitas tatap-muka, barulah ia akan menjadi alat perubahan sosial yang penting”.⁶⁶

⁶⁶Kutipan dari wawancara dengan Umberto Eco yang disitir di <http://lenteradi atasbukit.blogspot.com/2009/11/internet-dan-perubahan-sosial-gerakan.html>. Diunduh 14 September 2011.

Dalam upaya untuk melacak kembali laman ini ternyata laman ini sudah ditutup sehingga informasi yang ada sudah tidak dapat dikejar. Gerakan Bibit-Chandra adalah sebuah event yang penting yang ketika itu mampu menggabungkan antara gerakan di ruang maya dengan komunitas tatap muka. Tentu saja media lain turut menyumbang pada event ini, seperti masuknya informasi ini menjadi bagian dari pantauan media televisi dan media lainnya. Penggabungan media-media ini semakin mengkerucutkan gerakan ini.

Tujuan dari gerakan ini kongkret dan fokus, seperti keluarkan Bibit Chandra dari tahanan politik, namun dalam gerakan yang lebih besar seperti gerakan anti korupsi gerakan ini masih merupakan ekspresi ruang maya.

“... menggunakan internet sebagai fasilitas yang sangat kuat untuk kelompok-kelompok yang bekerja di luar struktur kekuasaan konvensional”.⁶⁷

Pandangan seperti ini sesuai pula dengan pandangan GH, kandidat doktor dari sebuah Universitas di Bandung, yang menyatakan bahwa sebagai alat “... deligimatif (jejaring sosial dan internet) efektif...”. Kemungkinannya untuk alat yang lebih ‘kuat’ seperti menurunkan rejim tidak terlalu besar karena saluran ekspresi di media mainstream masih kuat. Hal ini tidak ditemukan dalam kasus Mesir, di mana orang yang kurang suka terhadap Mubarak menggunakan saluran media baru untuk mengekspresikan pandangan mereka.

Seperti telah dijelaskan pada keterbatasan metode penelitian, tentang adanya perubahan karena lamannya berubah. Sehingga perlu kiranya untuk menjelaskan bahwa di dalam laman Satu Juta Tanda Tangan Dukung Bibit-Chandra juga terdapat upaya untuk mengkaitkan dengan masalah yang dianggap berkaitan dengan korupsi dalam bentuk lain. Salah satunya adalah kasus contekkan massal yang muncul di

⁶⁷Ignatius Haryanto, Kelompok Studi Media Pejompompongan Para Pembangkang Mayantara (“Cyber Dissident”), http://mediacub-pejompompongan.blogspot.com/2009_11_01_archive.html. Diunduh 15 September 2011.

dalam Ujian Nasional 2011. Contekkan massal muncul di Surabaya ketika seorang anak membocorkan upaya untuk mendongkrak nilai ujian melalui contekkan. Contekkan ini disebut massal karena dibocorkan pada banyak orang. Yang bersangkutan, rupanya tidak berkenan dengan tindakan ini dan kemudian melaporkannya.

Mengapa tindakan tersebut muncul, komentar di bawah ini menggambarkan dengan cukup rinci dasar dari tindakan contekkan massal tersebut.

Kontroversi Keluarga AL yang membongkar Contekan massal sesungguhnya berakar pada paradigma pendidikan kita yang kejar target. Seolah Tingkat kelulusan menjadi target politisi² Daerah, dan seolah sebuah desain prestasi politik. Tidak hanya kepala sekolah sesungguhnya ini mencerminkan kesalahan para politisi yang menempatkan prestasi semu tadi sebagai bahan bualan. Kita masuk kepada prestasi yang tak tak sungguhan, hanya pentas² Idola² tak bermutu. Dramatisasi partisan yang cenderung hanya hiburan dan bukan prestasi real. sama dengan prestasi membangun gedung sekolah tapi gagal membangun karakter pendidikan sesungguhnya.⁶⁸

Isu utama yang diangkat adalah paradigma pendidikan saat ini yang hanya menekankan pada prestasi semu. Namun yang menarik adalah upaya untuk mengkaitkannya dengan tindakan politisi yang menekankan pada bangunan yang bagus tetapi tidak menggarap karakter bangsa. Selain laman seperti ini juga ada laman yang isinya adalah video tentang tindakan anti korupsi. Laman ini juga diisi oleh mereka yang menekankan bahwa perkembangan sumber daya manusia (SDM) sangat penting terutama di dalam mencari pekerjaan.

bagaimana membuat seratus pekerjaan yang akan
menghidupi ribuan pemuda....
saatnya telah kritis, dan hampir² terjadi keputusaan
massal..
jangan biarkan itu terjadi...

⁶⁸DH <http://www.facebook.com/dh>. Diakses Juni 2011.

jangn biarkan harapan mereka dimakan hama
dan di racuni oleh tiadanya pegangan...
bantulah aq dengan sokongan ide-ide kalian
teman2....***^^^***⁶⁹

Komentar seperti ini merupakan kecenderungan bahwa individu yang menggunakan ruang maya melihat potensi dan juga kemungkinan untuk menggarap isu yang lainnya. Masalah ketenagakerjaan dan juga potensi orang muda merupakan masalah yang penting untuk diperhatikan.

Isu lain yang berkembang adalah berkembangnya dukungan untuk Mahfud MD, ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang pada saat yang bersamaan dikaitkan dengan kasus Andi Nurpati. Beberapa kalangan melihat Mahfud sebagai sosok yang penting dan berpengaruh dan patut didukung.

Gerakan Dukung Chandra & Bibit ini sudah Kadaluarasa... Melempem dan tidak punya Greget lagi... Bagaimana kalau Gerakan ini diganti dengan "GERAKAN 10 JT GOLPUT DUKUNG MAHFUD" Walau dia katakan tidak punya tampang jadi Presiden dan tidak punya partai....tetapi sesungguhnya dialah yg paling tepat untuk kita dukung menjadi The Next President... BERANI, JUJUR dan TANPA BEBAN hutang politik.... HIDUP MAHFUD KAMI BUTUH KAU.....!⁷⁰

Komentar seperti ini memiliki makna yang mendalam, karena juga berbicara tentang kebutuhan akan kepemimpinan. Bibit dan Chandra ternyata tidak hanya dilihat dalam konteks wacana politik, tetapi juga mereka diposisikan sebagai pemimpin yang memberi harapan. Kalaupun konteksnya bukan pemimpin, maka keduanya merupakan tokoh yang diidolakan.

⁶⁹JK, <http://www.facebook.com/putra.madiun>. Diakses Juni 2011

⁷⁰RR, <http://www.facebook.com/r>

Gerakan Sosial Melawan Korupsi Melalui Media Baru: Dari Optimisme Cicak Vs Buaya ke Pesimisme Sinetron Nazarudin

Media baru kini berkembang begitu pesat, dan penggunaannya tidak hanya sebatas alat komunikasi, tetapi juga untuk mempromosikan isu-isu sosial dan politik. Di Meksiko media baru digunakan untuk revolusi damai yang dikenal dengan nama *The Zapatista Revolution on The Internet* yaitu sebuah gerakan yang menggunakan media baru sebagai alat komunikasi para *grassroots* yang melawan pemerintah Meksiko pada 31 Desember 1993. Gerakan tersebut digunakan untuk memperjuangkan masalah tanah, perumahan, makanan, pekerjaan, kesehatan, pendidikan, kebebasan, demokrasi, keadilan, perdamaian, budaya, informasi, keamanan, perlawanan terhadap korupsi, dan lingkungan hidup. (Straubhar dan La Rose 2008: 517, Trippi, 2004).

Di Indonesia juga pernah terjadi gerakan sosial melalui media baru yang sifatnya masif yang dikenal dengan sebutan “Gerakan 1.000.000 *Facebookers* Dukung Chandra Hamzah & Bibit Samad Riyanto” Gerakan ini terus bergulir sampai awal September 2011 dan mampu mengumpulkan 1,309,570 anggota. Sayangnya *facebook* yang dilahirkan oleh Usman sebagai kreator ini kini, *Wall* nya bersih sehingga tidak ada lagi informasi yang bisa diakses dari situs tersebut..

Tulisan ini menganalisis gerakan sosial melawan korupsi melalui media baru. Namun karena situs yang paling terkenal yaitu “Gerakan 1.000.000 *Facebookers* Dukung Chandra Hamzah & Bibit Samad Riyanto” informasinya tidak bisa diakses maka sampel yang diambil dalam tulisan adalah <http://ruanghati.com/2009/11/02/perlawanan-cicak-vs-buaya-dalam-karikatur-sindiran-dan-refleksi/>.

Pada akhir hidupnya, situs jejaring sosial yaitu “Gerakan 1.000.000 *Facebookers* Dukung Chandra Hamzah & Bibit Samad Riyanto” isunya bergerak dari kriminalisasi dua pimpinan KPK yaitu Bibit Samad Riyanto dan Chandra hamzah ke nyanyian Nazaruddin tentang dua pimpinan KPK lain yaitu Chandra Hamzah dan Ade Raharja.

Episode baru masalah KPK kini pemeran utamanya adalah Nazaruddin. Analisis terhadap kasus Nazaruddin ini diambil dari situs <http://inpogue.com/pencarian-nazarudin-melibatkan-tim-termehek-mehek>.

Pada situs ruanghati perlawanan cicak vs buaya dalam karikatur dialog yang terjadi pada masyarakat *cyber* menunjukkan bahwa dukungan mereka untuk melawan kriminalisasi terhadap dua pimpinan KPK yaitu Bibit Samad Riyanto dan Chandra Hamzah. Gerakan ini menunjukkan sebuah gerakan yang bersifat optimis. Para *netter* percaya bahwa dukungannya terhadap KPK diharapkan mampu membuat KPK bekerja optimal dalam menjalankan tugasnya dalam memberantas. Namun demikian pada situs pencarian Nazaruddin melibatkan tim termehek-mehek menunjukkan adanya pesimisme dalam pemberantasan korupsi yang melibatkan Nazaruddin.

Visualisasi Korupsi

Karikatur merupakan bahasa non verbal yang biasa digunakan untuk kritik sosial. Karikatur yang *diupload* di Ruanghati mendapat simpati para *netter*. Selain rasa simpati terhadap para karikaturis, para *netter* juga berharap kritik sosial yang dilakukan karikaturis mampu menyentil pihak-pihak yang terlibat dalam masalah Cicak vs Buaya. Para *netter* memiliki optimisme bahwa apabila persoalan Cicak vs Buaya selesai maka KPK bisa melaksanakan tugas dengan baik. Metafora ‘*ciiat*’ yang diambil oleh *netter* yang menamakan Bri merupakan konotasi dari perjuangan para ahli silat dalam mengalahkan kejahatan. Ahli silat yang direpresentasikan dalam kata tersebut adalah KPK, sedangkan kejahatan yang dimaksud adalah korupsi. Dialog para *netter* dalam mendukung seniman dapat dilihat sebagai berikut:

bri says:
salampagii teteh..selamat pagii future
karikatur karakternya lucu
tapi nyentil telinga iaa teh visualnya^^
kapan iaa bisa buat kek gituuh..mmh
nanti pasti bisa..ciiat

Wandi thok says:

Saya juga ikut mendukung senimannya mbak

yans"dalamjeda" says:

Dengan gambar sepertinya kritik lebih mengena.

yans"dalamjeda" says:

Kritik lewat karikatur lebih menggelitik bahkan mungkin lebih mengena. Kebebasan pembaca menterjemahkan gambar memberikan sebuah refleksi atas kondisi yang sedang terjadi dalam berbagai penafsiran.

Analisis teks pada bagian ini dilakukan terhadap dialog yang terjadi antara tanggal 2 sampai 20 November 2009. Karikatur pertama menggambarkan bahwa perseteruan antara KPK (cicak) dan Kepolisian (buaya) dikhawatirkan membuat pemberantasan korupsi terbelengket. Keadaan ini bisa dimanfaatkan oleh koruptor (tikus) leluasa melakukan aksinya. Cicak, buaya dan tikus merupakan metafora yang menggambarkan penyimpangan makna dari binatang-binatang tersebut. Bintang utama dalam karikatur ini adalah tikus yang merupakan binatang pengerat yang suka mencuri makanan manusia. Tikus biasa mencuri makanan pada malam hari ketika tuan rumah terlena karena sedang tidur. Tikus digunakan untuk menggambarkan koruptor yang memanfaatkan kesempatan dalam perseteruan KPK dengan Kepolisian untuk melakukan aksi korupsinya. Cicak merupakan binatang yang tubuhnya kecil. Hal ini digunakan untuk menggambarkan institusi KPK yang organisasinya kecil.



Dialog berikut menggambarkan terjadinya tarik menarik antara Kepolisian yang dituangkan dalam metafora PERTAMA dan KPK yang dituangkan dalam metafora KEDUA. Kepolisian digambarkan sebagai PERTAMA karena organisasinya lebih besar dan *powerful*. Dalam kasus cicak vs buaya terjadi tarik-menarik antar berbagai elemen masyarakat untuk menyelamatkan institusi tertentu yaitu KPK atau Kepolisian. Metafora yang dihadirkan dalam dialog menunjukkan bahwa pemenang dalam pertandingan ini bukanlah cicak atau buaya melainkan tikus yaitu koruptor.

(maaf) izin mengamankan PERTAMA dulu. Boleh kan?!
aman?

alamendah says:

(maaf) izin mengamankan KEDUA dulu. Boleh kan?!
Yang sorak-sorak pasti tikus

dira says:

Sesekali nebeng yang pertama ah..

alamendah says:

perseteruan antara cicak dan buaya ini amat disayangkan.
Tapi jika **CICAK BERTARUNG MELAWAN BUAYA,**
SIAPA YANG MENANG.

Komentar di bawah ini merupakan isu yang didiskusikan oleh para *netter* di mana mereka membandingkan upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh negara tetangga, yaitu China.

Bagaimana korupsi bisa diberantas? hukumnya aja bisa di korupsi..... *knapa sih koq takut nembak tikus???* Aneh kan kalau tikus2 kabel di cina di hukum mati, tapi di Indo, malah di beri sangkar, di kasih makan lagi, trus di biarin beranak pinak hahahaha.

Gustav Gilbert Balan⁷¹

Metafora di atas terutama pada “knapa sih koq takut menembak tikus???” adalah metafora yang titik kemiripan dan topiknya tidak disebutkan. Setidaknya, kalimat itu dapat dikembalikan ke bentuk dasarnya, yaitu *koruptor adalah tikus*. Tetapi, pemerintah dan KPK takut menembak tikus itu.

Pada kalimat seperti itu hanya citranya, yaitu *tikus* yang disebutkan secara eksplisit. Berdasarkan konteksnya dapat diketahui bahwa tikus digunakan untuk menjelaskan topiknya, yaitu para koruptor di Indonesia, baik di lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Titik kemiripan antara topik metafora, *para koruptor* dan citra metafora, *tikus*, ialah keduanya menggerogoti secara sembunyi-sembunyi, namun benda yang digerogeti pasti akan habis. Dalam hal ini, para koruptor menggerogoti uang negara. Komentar yang pertama, bukanlah metafora tunggal, melainkan metafora yang membandingkan *koruptor dengan tikus dan perlakuan koruptor di Indonesia dan di China*. Sebagaimana kita ketahui, China berhasil mengurangi korupsi yang terjadi di negara mereka, dengan cara memberlakukan hukuman mati terhadap koruptor.

Karikatur yang pertama ini menggambarkan para koruptor yang digambarkan melalui gambar tikus berwarna gelap dan bermuka seram. Gambar ini memperlihatkan bahwa para koruptor menertawakan peristiwa yang terjadi. Seakan-akan kasus yang diangkat,

⁷¹<http://www.facebook.com/profile.php?id=1823874210>. 6 Mei 2011

hanyalah sebagian kecil dari korupsi yang lebih besar. Koruptor besar mentertawakan kasus-kasus kecil yang “baru” bisa digarap oleh KPK. Gambar tersebut juga memperlihatkan para koruptor seakan dibela oleh buaya dan mentertawakan keinginan cicak untuk menangkap para koruptor.

Dukungan Terhadap KPK

Dukungan terhadap KPK diekspresikan melalui komentar terhadap karikatur di bawah ini. Karikatur ini terdiri dari dua gambar. Gambar bawah menggambarkan dua cicak kecil dikepung oleh segerombolan buaya. Ini menggambarkan kriminalisasi Kepolisian RI terhadap dua pimpinan KPK yaitu Bibit Samad Riyanto dan Chandra Hamzah. Karikatur tersebut dimaknai oleh *netter* sebagai bahaya besar mengancam cicak namun bantuan belum datang. Hal tersebut bisa dilihat dalam komentar berikut:

luminous25 says:

Red alert... red alert... cicak terkepung nih...!!! mana bantuannya... ??

Dukungan lain terhadap KPK digambarkan oleh seorang *netter* sebagai ”buaya kok braninya cm sm cicakdasar payah”. Komentar ini menunjukkan bahwa perseteruan antara Kepolisian (buaya) dan KPK (cicak) merupakan perseteruan yang tidak seimbang. Kepolisian dianggap sebagai institusi yang besar tetapi memiliki nyali kecil karena hanya berani terhadap institusi kecil yaitu KPK. Komentar *netter* ini mengandung makna secara implisit bahwa Kepolisian tidak berani menghadapi kekuasaan yang lebih besar misalnya penguasa negara.

Gubahan lirik lagu berikut mempersonifikasikan perseteruan antara KPK dengan Kepolisian yaitu adanya penyadapan telpon Kabareskrim pada waktu itu yaitu Susno Duaji oleh KPK. Penyadapan telpon tersebut menyebabkan terkuaknya korupsi yang terjadi di Mabes (Markas Besar) Polisi. Karena geram bahwa telponnya disadap dan mengakibatkan terkuaknya kasus korupsi di tubuh Polisi maka Susno Duaji berkomentar ”cicak kok berani melawan buaya” sejak kasus ini

dikenal sebagai Cicak vs buaya. Gubahan lagu tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

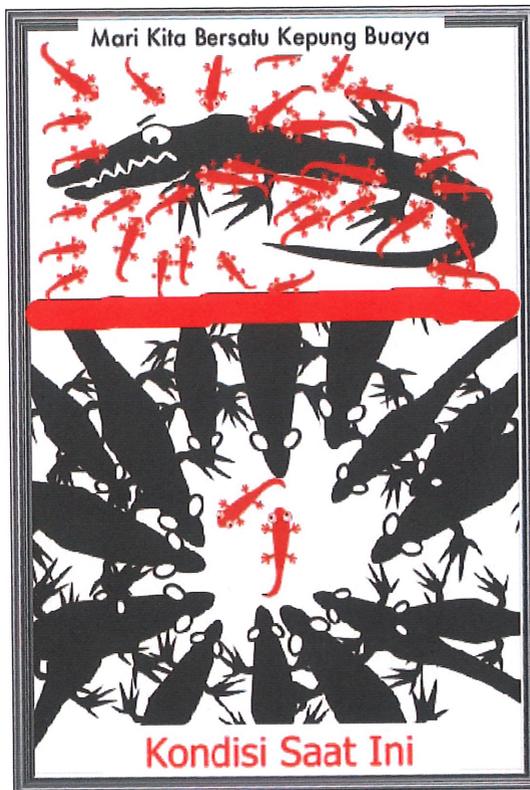
sonnybastoni says:

cicak,cicak didinding
diam-diam menyadap
datang seekor buaya ...kap...
cicak ditangkap

Dukungan terhadap KPK digambarkan oleh seorang *netter* dengan mengomentari karikatur yang kedua ini pada gambar bagian atas. Gambar karikatur yang kedua bagian atas tersebut, karikaturis memvisualkan bahwa meskipun tubuh cicak kecil namun apabila para cicak bersatu maka tidak tertutup kemungkinan cicak mampu melawan buaya. Karikatur maupun kalimat *netter* berikut secara implisit menggambarkan persatuan *facebookers* dalam “Gerakan 1.000.000 *Facebookers* Dukung Chandra Hamzah & Bibit Samad Riyanto” merupakan gerakan rakyat yang bersatupadu melawan kekuasaan (Polri) dan terbukti tekanan *facebookers* tersebut mampu membebaskan Bibit-Chandra dari jeratan Hukum. Komentar *netter* tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

longortj says:

ayooooo cicak-cicak serbuuuu buayaaaaaa!!!!!!
Karikatur -2



Dialog *netter* berikut merupakan penggambaran dari ketidakseimbangan antara dua institusi yang berseteru. *Tuti 'sii' fans albert einstein* menggunakan metafora 'walaupun badanmu kecil jangan mau ditindas dengan buaya' sebagai sebuah perluasan dari tindakan Kepolisian yang dianggap semena-mena dalam merekayasa kasus ini. Sedangkan kata 'buaya darat' merupakan metafora dari tindakan 'jagoan' dari yang kuat terhadap yang lemah. Buaya darat sering diartikan sebagai tindakan jagoan dari pihak yang kuat yaitu laki-laki terhadap pihak yang lemah yaitu perempuan dengan tujuan menundukkan perempuan. Dalam kalimat ini buaya darat yang dimaksud adalah tindakan semena-mena pihak yang kuat yaitu

Kepolisian terhadap pihak yang lemah yaitu KPK. Dialog tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

tuti 'sii' fans albert einstein says:

cicak trus berjuang walaupun badanmu kecil jangan mau ditindas dengan buaya.....

ivan says:

hoe ayo buaya tunjukkan kalau kamu memang jago didarat kan entekan buaya darat

anak kecil says:

wah rakyat harus turun tangan ga boleh diem ajah....

bangun negeri dengan ketabahan,....

maju indonesia...

serang buaya....

Kasus cicak vs buaya sebagai sebuah persoalan politik yang besar mendapat perhatian dari seorang *netter* yang menamakan dirinya asepsaiba. Konteks politik yang diangkat adalah suatu ketika sangat mungkin bahwa terjadi pelarangan penggunaan ‘CICAK’ dan ‘BUAYA’. Pelarangan ini bisa dijelaskan melalui konteks historis di mana sebuah peristiwa politik seringkali dicoba penyelesaiannya oleh rejim melalui pelarangan penggunaan kata, kalimat, jargon atau lagu yang populer ketika peristiwa tersebut meledak. Pelarangan dimaksudkan untuk membuat ingatan masyarakat akan kasus tersebut tidak mudah muncul

asepsaiba says:

Hati-hati penggunaan kata “CICAK” dan “BUAYA” loh... Sebentar lagi akan dilarang penggunaannya!

Wacana Cicak Vs Buaya dipicu oleh pernyataan Susno Duaji, yang pada waktu itu menjabat Kabareskrim Polri pada Juli 2009. Dia menyatakan “ibaratnya, di sini buaya di situ cicak. Cicak (KPK) kok melawan buaya (Polisi).” Pernyataan itu menuai banyak komentar, bahkan menimbulkan banyak gerakan dukung-mendukung salah satu lembaga. Pernyataan itu ternyata seperti bola liar yang begitu sulit dihentikan. Hal itu menimbulkan pertanyaan: apa yang sesungguhnya

terjadi dengan pernyataan itu ditinjau dari sudut penggunaan bahasa sehingga menimbulkan wacana yang begitu luar biasa pengaruhnya dalam tindakan nyata?

Jika diurai, pernyataan SD itu berbunyi demikian: (1) *KPK adalah cicak dan (2) Polisi adalah buaya*. Kedua kalimat itu mengandung keganjilan semantis sehingga tidak dapat dipahami secara harfiah. Dengan kata lain, secara harfiah kalimat di atas tidak berarti. Dengan demikian, metafora jenis ini dapat diketahui secara langsung.

Topik metafora pertama ialah *KPK*, sedangkan citranya ialah *cicak*. Akan tetapi, titik kemiripan yang menunjukkan dalam hal apa *KPK* dan *cicak* serupa tidak disebutkan secara eksplisit dalam metafora tersebut. Untuk mengetahui titik kemiripan itu diperlukan pengetahuan tentang konteks tempat metafora tersebut berada atau pemahaman terhadap simbol "cicak" dalam masyarakat. Cicak itu binatang kecil, merayap, biasa hidup di rumah (pada langit-langit, di dekat lampu), makanannya binatang kecil (nyamuk dan sebagainya). Dalam metafora ini, titik kemiripan yang muncul dari *cicak* dan *KPK* adalah sama-sama kecil. *KPK* bukanlah lembaga besar seperti departemen-departemen lain di Indonesia yang memiliki kantor-kantor perwakilan di daerah. *KPK* juga tidak sebesar lembaga Kepolisian. Namun, di antara berbagai titik kemiripan yang ada, yang terpenting ialah *cicak* dan *KPK* keduanya dianggap "kecil" dan dapat dengan mudah dimatikan tanpa bisa memberikan perlawanan karena tidak memiliki aparat sebesar berbagai lembaga lain di Indonesia.

Hal itu berbeda dengan metafora *Kepolisian adalah buaya*. Dalam metafora ini, *Kepolisian* adalah topik, sedangkan *buaya* adalah citra. Titik kemiripan di antara keduanya tidak disebutkan secara eksplisit dalam metafora ini. Namun, titik kemiripan itu dapat dicari berdasarkan konteks keindonesiaan dan beranjak dari makna primernya dulu. *Buaya* adalah binatang berdarah dingin yang merangkak, bertubuh besar dan berkulit keras, bernafas dengan paru-paru, hidup di air (sungai, laut). Tidak seperti *cicak* yang tidak memiliki makna kiasan, *buaya* memiliki begitu banyak makna kiasan dan begitu banyak

ungkapan yang menggunakan kata *buaya*. Salah satu makna kiasan dari buaya adalah ‘penjahat’, misalnya pada ungkapan: *adakah buaya menolak bangkai?* Ungkapan itu berarti ‘orang jahat akan berbuat jahat kalau ada kesempatan.’ Ada ungkapan lain, seperti *tak akan terlawan buaya menyelam air*, yang berarti ‘orang pandai atau kaya atau berkuasa (meskipun tidak pandai), tidak mungkin dapat dilawan.’ Selain itu, ada sejumlah makna kiasan dari buaya seperti pada ungkapan *buaya darat*, yang berarti (1) Penjahat, pencuri, pencopet, dan sebagainya; (2) Penggemar perempuan; *buaya pasar* yang berarti ‘tukang copet’; *membuaya* yang berarti menjadi penjahat, mengganggu perempuan; *membuayai* yang berarti (1) Menipu, memperdaya, (2) Menggertak; menakut-nakuti.

Berdasar perbandingan makna primer dari *buaya* dengan topik dari metafora itu, yaitu Kepolisian, kita dapat menangkap metafora tersebut bahwa lembaga Kepolisian adalah lembaga yang berkuasa, sulit di lawan karena kekuasaannya itu, dan juga sebagai lembaga besar yang memiliki keanggotaan sangat banyak yang tersebar hingga tingkat kecamatan. Namun, karena buaya memiliki banyak makna kiasan yang bermakna buruk, lembaga Kepolisian pun diasosiasikan dengan makna buruk. Padahal, seharusnya justru lembaga Kepolisian yang bisa menumpas “buaya” dalam maknanya sebagai ‘penjahat’.

Buruknya titik kemiripan antara buaya dengan lembaga Kepolisian ini tampak dalam persepsi masyarakat Indonesia terhadap korupsi yang mendudukkan lembaga Kepolisian sebagai lembaga terkorup. Di sini ada unsur-unsur nonfiguratif yang berhubungan dengan citra metafora tersebut. Kedua metafora di atas dapat dikategorikan sebagai metafora hidup, yaitu metafora yang diciptakan oleh pembicara untuk melukiskan sesuatu. Metafora hidup dimengerti sesudah pembaca dan pendengar memberi perhatian khusus pada perbandingan yang dibuat.

Dalam wacana korupsi, binatang melata menjadi citra dalam metafora. Hal itu tampak dalam munculnya metafora baru pada tanggapan tulisan yang berjudul “Cicak Versus Buaya di Ranah Media

Sosial,” oleh: Wicaksono <http://blog.tempointeraktif.com/blog/cicak-vs-buaya-di-ranah-media-sosial/> Diunduh 15 September 2011. Ada dua komentar menarik yang dapat dikemukakan di sini.

Komentar:

1. **mas Hadi** | 8 November, 2009 19:40
Cicak versus buaya adalah masalah kecil, Bank Century jika dibuka akan lebih menarik, dan banyak *kadal raksasa dan komodo beracun* yang bakal kepanasan
2. **mbah Joko** | 8 November, 2009 19:45
Cicaknya terlalu menepuk dada, buayanya narsis, yang terbaik cicak dan buaya introspeksi, jangan berlaku sok jagoan dan paling berjasa di negeri ini.

Pada komentar pertama, yang dikemukakan mas Hadi, ada dua binatang yang dijadikan citra dalam metafora, yaitu *kadal raksasa* dan *komodo beracun*. Jika diurai metafora itu berbunyi: “*koruptor yang terlibat dalam penggarongan Bank Century adalah kadal raksasa dan komodo beracun.*”

Jika dibandingkan dengan metafora cicak vs buaya di atas, secara harfiah *kadal raksasa* dan *komodo beracun* lebih ganas dibandingkan cicak dan buaya. Titik kemiripan antara korupsi Bank Century dengan kadal raksasa dan komodo tentu saja adalah pada besar dan ganasnya. Kadal raksasa bukanlah kadal biasa. Begitu pun komodo beracun. Kadal dalam makna kiasan keseharian membentuk makna menipu dan membohongi dalam bentuk *mengadali* atau *dikadali*. Dengan demikian, makna metafora tersebut ialah korupsi Bank Century jauh lebih besar dari korupsi lain. Tipuannya sungguh dahsyat sehingga pelaku yang terlibat dalam korupsi Bank Century berhasil menipu sebagian rakyat Indonesia dengan meracuni pemikiran rakyat bahwa penggarongan uang Bank Century itu bukanlah tindakan koruptif. Rakyat diyakinkan oleh para pelaku melalui wacana media bahwa tindakan korupsi Bank Century justru bertujuan menyelamatkan perbankan Indonesia agar tidak ambruk diterpa krisis.

Seorang *netter* yang menamakan dirinya Catatan Febri menyampaikan bahwa dukungannya kepada KPK merupakan

dukungan terhadap penyelamatan kekayaan negara. Pernyataan tersebut diungkapkan dalam bahasa “*plesetan*” di mana KPK disebut sebagai Komisi Penyelamat Kekayaan Negara atau KPK N. Kalimat cacatan Febri tersebut mengandung makna bahwa frasa ‘menyelamatkan kekayaan negara’ merupakan perluasan dari frasa pemberantasan korupsi’. Pernyataan tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

catatan febri says:

saya kopas, mari dukung kpk
jangan lupa KPK N (Komisi Penyelamat Kekayaan Negara)

Seorang *netter* yang menamakan dirinya sebagai Trunt menunjukkan rasa simpati terhadap kriminalisasi terhadap dua pimpinan KPK mengenakan pakaian warna hitam. Warna hitam merupakan simbol dari rasa duka cita. Melalui dukungan yang disebutnya sebagai ‘dukungan pasif’ Trunt berharap masalah KPK segera selesai sehingga KPK segera menjalankan tugasnya dalam memberantas korupsi. Dukungan Trunt ini bisa diartikan sebagai optimisme para *netter* dalam gerakan melawan korupsi.

Triunt says:

senin kemaren gw pake Baju item juga...
ikutan herpartisipasi pasif... 😊
semoga masalah KPK cepat kelar dan go berantas
korupsi... 🙏

Dialog yang dilakukan *netter* berikut merupakan dukungan terhadap KPK. ‘maju terussss’, ‘dukung cicak’ merupakan dukungan yang optimis terhadap KPK dalam menjalankan tugasnya. Kalimat ‘menguak semua konspirasi melemahkan KPK’ merupakan harapan akan adanya tranparansi terhadap penyelesaian kasus KPK.

nia says:

Hidup KPK.. maju terussssssss !!

nyanyianbahasa says:

Semoga KPK bisa bertahan...

Salam kenal 😊

Zico Alviandri says:

Saya juga mendukung KPK 😊. Semoga pengadilan di MK hari ini bisa menguak semua konspirasi melemahkan KPK. Dukung cicak!!

manusiakendi says:

gak nyangka ya, pernyataan spontan yang gak sengaja tentang “cicak vs buaya”, jadi terkenal banget

Dukungan Terhadap Pemberantasan Korupsi

Beberapa *netter* yang terhubung dalam dialog berikut menginginkan *ending* dari kasus ini adalah penegakan keadilan dalam pemberantasan korupsi. Ungkapan *netter* yang menyebutkan bahwa: 'Buaya dan Cicak kan sama-sama reptil, kenapa nggak belutnya aja yang diberantas' Kepolisian dan KPK hanya merupakan institusi penegakan hukum yang terkait dengan pemberantasan korupsi. Harapan *SI RETNO* adalah 'belut' nya yang diberantas. Belut disini merupakan metafora dari koruptor. Belut merupakan binatang yang dikenal sangat sulit ditangkap karena badannya licin Selain itu, *manuver-manuver* belut saat ditangkap sangat canggih, sehingga mempersulit penangkapan belut. Belut dalam kalimat ini merupakan simbol dari koruptor yang sulit ditangkap.

Seorang *netter* menyampaikan gagasan: "buaya pakai nangis segala, bilang kalau anak cucu buaya sangat sedih dan terluka....air mata buaya ternyata menyentuh perasaan buaya-buaya lain di DPR..." Kalimat tersebut merupakan tanggapan dari pernyataan seorang pejabat Kepolisian yang menyatakan ketidaksetujuannya dengan penggunaan istilah buaya sebagai metafora dari Kepolisian. Sang pejabat mengatakan bahwa anak cucu mereka tersinggung dengan simbolisasi buaya untuk Kepolisian. Airmata buaya dipilih sebagai ungkapan bahwa pernyataan tersebut diragukan ketulusannya. Sedangkan frasa 'buaya-buaya di DPR' merupakan penggambaran bahwa oknum DPR memiliki kesamaan dengan oknum Polisi yaitu sama-sama suka melakukan kesewenang-wenangan. Dialog para *netter* tentang dukungannya dalam memberantas korupsi dapat dilihat sebagai berikut:

mazdarwan66 says:

Bukan cicak bukan buaya, yang penting korupsi harus diberantas!

SI RETNO says:

Buaya dan Cicak kan sama-sama reptil, kenapa nggak belutnya aja yang diberantas. Do'a kita orang kecil Alon-alon asal kelakon. Maju terus bang Buyung !!!!

Nda says:

pokonya korupsi harus di berantas

syukriy says:

kok malah buanya yang lengser ya?

buaya pakai nangis segala, bilang kalau anak cucu buaya sangat sedih dan terluka...

air mata buaya ternyata menyentuh perasaan buaya-buaya lain di DPR...

BAH!

Zoel fahmi says:

hidup tak sekedar bernafas oke sohib merdekakan nurani, dukung terus kebenaran walaupun benar itu semu....?

Ferdinad says:

Emank PaRah NegaRa Qta T'Cinta ini.....

Setiap BuLan Ada aja kasus koRupsi....

S'moga Cpet TeRungkap Tuch Kasus "Buaya N Cicak"

hhee

Erny says:

gile...

gak hbis2'nya indonesia q tercinta ne dari korupsi!!!

makin byk z KORUPTOR bertebaran di dunia ne!!

Rendahnya Dukungan dari Institusi Lain

Karikatur ketiga menceritakan sebuah belantara yang dihuni oleh berbagai binatang. Ketika terjadi peperangan antara cicak dan buaya penghuni rimba raya tidak ada yang membantu cicak, namun sebaliknya buaya dapat bantuan dari tikus. Harimau sebagai raja rimba tidak membantu cicak karena tertidur ulas. Karikatur ini merupakan

kritik sosial dari tidak adanya bantuan dari institusi lain ketika KPK berseteru dengan Kepolisian. Tikus yang merupakan metafora dari koruptor malah membela buaya yang badannya besar karena koruptor tidak sudi membela KPK karena keberadaan KPK dianggap mengganggu eksistensinya. Harimau yang sedang tidur merupakan metafora dari kekuatan besar yang tidak melakukan apa-apa. Kekuatan besar tersebut merupakan kekuatan rakyat Indonesia atau bisa juga diartikan sebagai penguasa republik ini mengingat harimau merupakan metafora dari raja rimba.

Karikatur tersebut mendapat perhatian dari beberapa *netter*. Seorang *netter* yang menamakan dirinya *dira* menggambarkan bahwa musuh cicak (KPK) hanya dua yaitu buaya dan tikus, artinya musuh KPK hanya dua yaitu koruptor dan institusi penegak hukum yang seharusnya salah satu tugasnya adalah memberantas korupsi. Menurut Dira sebenarnya di rimba raya masih banyak binatang lain yang siap membantu tetapi binatang-binatang lain tersebut masih sibuk mencari makan. Kalimat Dira tersebut merupakan metafora dari ketidakpedulian institusi lain dalam membantu KPK menyelesaikan masalahnya karena sibuk dengan urusannya sendiri. 'Mencari makan' merupakan metafora dari kesibukan institusi lain melakukan rutinitas, menghabiskan APBN sehingga tidak ada waktu untuk memperhatikan institusi lain..

Seorang *netter* yang menamakan dirinya *musthofa* memberikan semangat agar rakyat Indonesia (harimau) bangun untuk membantu KPK (cicak). Apabila dijelaskan dalam konteks historis, harapan *musthofa* terwujud melalui berbagai gerakan sosial mendukung KPK yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Gerakan sosial melawan korupsi melalui solidaritas terhadap KPK diawali oleh gerakan melalui ruang maya di antaranya adalah "Gerakan 1.000.000 *Facebookers* dukung Bibit Samad Riyanto dan Chandra Hamzah".

dira says:

Kreatif.. Sabar ya cicak, mereka cuma berdua kok, tikus sama buaya. Masih ada ratusan binatang lain yg siap membantu.

Sayangnya mereka lagi pada sibuk cari makan. Mungkin nanti sore mereka kenyang, dan akhirnya datang menolongmu..

musthofa says:

apa memang benar masyarakat indonesia lagi t iduk seperti harimau di atas, klo begitu ayo dong bangun harimau2 lihat thu kondisi bangsa kita..... jangan biarkan korupsi merajalela di negara kita..... KPK kau harus tetap tegar, kau harus tetap hudup selama pemerintahan diindonesia masih ada, dengan adanya kau (KPK) semua koruptor akan terkuak semua... Memang selama ini ada penegak hukum tp yang jd pertanyaan adalah kenapa penegak hukum tidak mampu menguak para biadap koruptor negara.???????

Karikatur -3



Pesimisme Sinetron Nazarudin

Bagian ini menganalisis situs yaitu <http://inpogue.com/pencarian-nazarudin-melibatkan-tim-termehek-mehek>. Pada bagian di atas optimisme masyarakat *cyber* untuk melakukan gerakan sosial melalui media baru cukup tinggi. Dialog yang dilakukan *netter* dalam memberikan dukungan terhadap KPK maupun dukungan terhadap

pemberantasan korupsi sangat kuat. Hal ini berbeda dengan kelanjutan kasus kriminalisasi terhadap dua pimpinan KPK yang mendapat dukungan dari para *netter*, kelanjutan kasus ini adalah ‘nyanyian Nazaruddin’ yang menuduh dua pimpinan KPK yaitu Ade Raharja dan Chandra Hamzah berkolusi dengan Anas Urbaningrum untuk membebaskan korupsi kasus Wisma Atlet SEA Games 2011 hanya pada Nazaruddin. Nazaruddin menuduh Anas Urbaningrum menikmati hasil korupsinya, maka makna yang terkandung dalam pernyataan Nazaruddin adalah dua pimpinan KPK tersebut berkolusi dengan Koruptor. Nazaruddin juga menuduh bahwa dua pimpinan KPK tersebut mendapat gratifikasi dari dirinya.

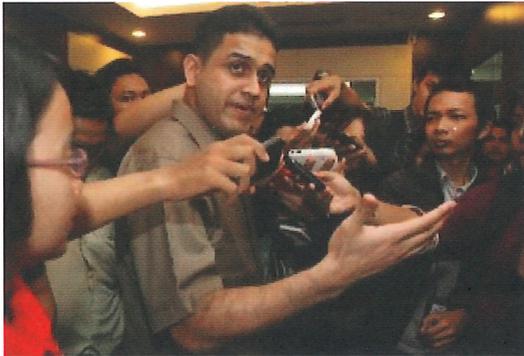
Kasus dua pimpinan KPK tersebut kini tidak lagi menjadi perhatian para *netter*. *Netter* kini lebih tertarik dengan sosok Nazaruddin. Namun demikian gerakan *netter* kali ini bukan lagi merupakan gerakan yang optimistik melawan korupsi, akan tetapi gerakannya cenderung pesimistik. Hifsian, kreator situs ini memulai diskusi dengan membuat artikel yang berjudul “Sinetron Nazaruddin”. “Sinetron” disini merupakan metafora bahwa penyelesaian kasus ini hanya merupakan sandiwara saja. Hal ini diungkapkan dalam kalimat berikut: “panggung sandiwara negri ini di hangatkan dengan tayangan berseri yang cukup heboh, serial yang bercerita tentang kehidupan seorang anggota dewan kehormatan Indonesia, serial yang sempat mengambil lokasi syuting di luar negri (Kolombia)”.

Karena pemberantasan korupsi dalam kasus Nazaruddin hanyalah merupakan sandiwara maka kelanjutan ceritanya berkembang menurut skenario yang dibuat oleh produser. “Produser” dalam hal ini adalah metafora dari penguasa. Dalam hal penguasa melibatkan tiga unsur kekuasaan negara yaitu eksekutif, yudikatif dan legislatif. Hal tersebut diungkapkan Hifsian sebagai berikut: “Kelanjutan cerita ini masih di rahasiakan oleh sang produser, menurutnya akan lebih seru jika penonton tidak mengetahui bagaimana cerita seterusnya, penasaran dan terus berusaha menebak apa yang akan terjadi membuat serial ini akan terus di tunggu oleh penggemarnya imbuhnya lagi”.

Pesimisme masyarakat dalam pemberantasan korupsi didasarkan pada realita di mana kasus hukum yang melibatkan korupsi pada umumnya *endingnya* tidak memuaskan. Kita masih ingat, kondisi kasus Gayus Tambunan, agar supaya dilupakan orang maka kasus tersebut ditutup oleh kasus lain agar masyarakat lupa. Penutupan kasus melalui kasus diungkap oleh Hifzian melalui metafora berikut: Apakah serial ini bisa sukses menyedot perhatian pemirsa sampai akhir episode, ataukah nantinya tertutup lagi oleh tayangan baru yang lebih di gemari, atau juga tayangan ini terhenti dengan tulisan di pojok bersambung sampai waktu yang belum di tentukan. Teks lengkap yang dikreasi oleh Hifzian dapat dilihat sebagai berikut:

Nazaruddin, Sinetron Terbaru TV Indonesia

Posted by **Hifzian** on Agustus 16th, 2011



Pemeran Utama 'Nazaruddin' di keprung wartawan

Menjelang detik HUT kemerdekaan Republik Indonesia, panggung sandiwara negeri ini di hangatkan dengan tayangan berseri yang cukup heboh, sebuah serial yang bercerita tentang kehidupan seorang anggota dewan kehormatan Indonesia, serial yang sempat mengambil lokasi syuting di luar negeri (Kolombia), dan berani merogoh kocek lebih dalam untuk sebuah pesawat carter, kabarnya untuk bisa menyewa pesawat ini saja mereka harus rela membayar sebanyak 4m. Jika untuk pesawat saja mereka berani

mengeluarkan begitu banyak uang, lalu kira-kira berapa dana yang mereka siap kan untuk serial yang satu ini. Entah lah mungkin ratusan M atau bahkan triliunan, yang saya tahu itu bukan jumlah uang yang sedikit.

Serial ini menceritakan seorang a(n)ggota dewan yang di tuduh menggelapkan uang negara dan kemudian juga terbukti bersalah di kasus yang sama di masa lalu nya. Di ceritakan juga sang anggota dewan yang bernama Nazaruddin kemudian melarikan diri ke beberapa negara, dalam pelariannya Nazaruddin sempat mengungkap beberapa nama yang menurutnya mereka itulah dalang dari semua kasus yang menyudutkan dirinya, sebagian besar nama yang di sebut Nazaruddin ternyata orang-orang penting di gerombolan (partai) yang sudah mengantarkannya duduk di kursi empuk sebagai anggota dewan. Setelah beberapa negara dia lewati akhirnya Nazaruddin tertangkap di Kolombia oleh Polisi lokal, dan kemudia(n) di jemput dengan pesawat *carter* untuk di bawa pulang langsung ke Indonesia. Kelanjutan cerita ini masih di rahasiakan oleh sang produser, menurutnya akan lebih seru jika penonton tidak mengetahui bagaimana cerita seterusnya, penasaran dan terus berusaha menebak apa yang akan terjadi membuat serial ini akan terus di tunggu oleh penggemarnya imbuhnya lagi.

Terlihat serial ini memang menuai sukses, terbukti serial ini sering jadi bahan pembicaraan di warung, cafe, bahkan anak-anak sekolah mulai biasa bercerita tentang episode-episode Nazaruddin, menurut mereka serial ini memang cukup menarik, dalam setiap tayangan episode nya selalu saja bisa menuai senyum, gregetan, atau bahkan luapan amarah dari para penonton.

Yang paling menghebohkan bahkan menurut saya inilah yang membuat serial ini semakin banyak menarik penonton, ketika masuk episode pemeran utama di tangkap di luar negeri, lalu episode di bawa pulang ke Indonesia dengan pesawat mahal, suguhan yang mencengangkan atau juga membingungkan, dan dari sekian banyak penonton serial ini saya sempat mendengar celoteh anak kecil 'ternyata

Indonesia kaya yah..' mungkin ini juga yang menjadi daya tarik serial ini, mereka sering mendengar negara ini dalam keadaan krisis, tapi di serial ini mereka bisa tidak bisa melihat di mana krisis itu, mereka juga sering mendengar Indonesia masih punya hutang di luar negeri, tapi dalam serial ini mereka melihat bagaimana begitu banyak uang negara di habiskan. Tayangan serial ini benar-benar berhasil mengaduk emosi penontonnya, penikmat serial ini bahkan tidak bisa membedakan lagi, serial ini dunia nyata ataukah hanya serangkaian episode sinetron biasa.

Di episode terbarunya terlihat bagaimana serombongan orang yang memaksa bertemu dengan pemeran utama serial ini (Nazaruddin), padahal mereka datang tidak di saat jam berkunjung, mereka memaksa dengan mengatasnamakan dewan terhormat Indonesia. Disini seakan-akan mereka ingin menunjukkan bahwa dengan menjadi dewan terhormat mereka bisa melakukan apa saja, ironis memang, di saat negara ini menjelang perayaan detik-detik kemerdekaan, mereka tetap menyuguhkan perilaku tidak terpuji, apapun tujuan mereka yang terlihat dalam serial ini dan terbaca oleh penonton hanyalah unjuk kekuatan atas nama pribadi ataupun golongan.

Apakah serial ini bisa sukses menyedot perhatian pemirsa sampai akhir episode, ataukah nantinya tertutup lagi oleh tayangan baru yang lebih di gemari, atau juga tayangan ini terhenti dengan tulisan di pojok bersambung sampai waktu yang belum di tentukan.

Artikel Hifsiyan tersebut di atas mendapat tanggapan dari 34 *netter*. Tanggapan tersebut didiskusikan dari 16 Agustus 2011 sampai 18 Agustus 2011. Diskusi yang berkembang adalah penekanan bahwa penyelesaian kasus Nazaruddin hanyalah sandiwara. Hal tersebut diungkapkan dalam kalimat berikut: "paling2 bentar lagi juga ganti pemain, kayak yang udah2...tahu ndirilah, biar g(a) membosankan". Ganti pemain merupakan metafora dari menutup sebuah kasus melalui kasus baru. Ini merupakan salah satu cara mempeti es kan sebuah kasus

Hal tersebut digaris bawahi oleh seorang *netter* sebagai berikut: “Nggak perlu khawatir bos, penonton Indonesia cepat bosan”

Seorang *netter* menulis: ” jangan lupa sinetron Indonesia sering memutus kontrak pemeran utama di tengah jalan, jadi bisa saja kemudian di ceritakan sang pemeran utam hilang atau bahkan mati dan masuk pemeran utama lainnya”. Memutus kontrak merupakan sebuah metafora dari menutup sebuah kasus melalui kasus lain dengan cara mengungkap kasus lain dan menyimpan kasus lama dari pemberitaan media. Cara menutup kasus juga dilakukan dengan mencari tokoh yang dikorbankan untuk menjadi kambing hitam. Kambing hitam ini oleh seorang *netter* disebut sebagai pemeran pengganti. Hal tersebut diungkap oleh seorang *netter* sebagai berikut: “pilihan yang bagus, bayaran peran pengganti saya dengar bisa saja lebih tinggi dari sang bintang”

Dibalik pesimisme dalam memandang penyelesaian kasus Nazaruddin terdapat seorang *netter* yang menganggap bahwa pengungkapan korupsi melalui sandiwara merupakan pengkhianatan terhadap pahlawan bangsa. Hal tersebut diungkapkan dalam kalimat berikut:”Bisa bayangkan yang nonton sinetron ini adalah para pahlawan RI. Betapa pedih hati mereka. Darah dibalas dengan pengkhianatan para koruptor”.

Kasus Nazarudin menghasilkan analogi dengan sinetron, salah satunya adalah karena negara pelariannya berada di Amerika Latin. Sebagaimana kita ketahui, *telenovela* atau sinetron yang berasal dari Amerika Latin merupakan tontonan favorit sebelum tempat mereka diambil oleh sinetron dalam negeri. Sinetron adalah *soap opera*, cerita bersambung yang menggarap cerita yang berhubungan dengan percintaan, keluarga dan persaingan tentunya.

Sinetron di Indonesia menunjukkan kontroversi di dalam penayangannya, karena banyak sinetron dengan cerita orang dewasa, tayang pada jam tayang keluarga dan anak-anak. Oleh karena itu, paparan kasus yang ditayangkan oleh media massa terutama oleh televisi berada di jam-jam berita dan juga *breaking news*, sehingga

mereka mengatakan bahwa tayangan ini berkategori bahaya bagi anak-anak.

tribumihoo says:

Indonesia... ^ ^v.....

Wah Bahaya... 😊:).

@tribumihoo, Ngga perlu khawatir bos,penonton Indonesia cepat bosan,apalagi kalau ceritanya monoton.yang penting jangan lupa bila ada anak kecil menonton tayangan ini harus di dampingi,sebab ini tergolong tayangan dewasa 😊

Akan tetapi di dalam perjalanan sebuah kasus, tayangan yang sama atau yang diubah sedikit dapat ditayangkan berulang kali. Sehingga sebagai akibatnya pemirsa menjadi bosan dan kemudian diasumsikan lupa. Padahal dalam hal ini mereka yang lupa atau diasumsikan lupa adalah mereka yang awalnya bersemangat menayangkan tapi kemudian meupakanceritanya. Tentu juga para penegak hukum yang memperlihatkan proses bertele-tele dan kemudian sepertinya tidak lagi menjadi perhatian dari pemirsa.

Karena perjalanan kasus memperlihatkan ketidakjelasan, kemudian berkembang isu di masyarakat bahwa ada rekayasa kasus, untuk meredam kasus. Dengan konteks sinetron pada satu sisi terdapat kebosanan karena cerita diulang-ulang, namun pada satu sisi kalau dapat dipertahankan, masyarakat tetap mengikuti perkembangan kasus yang ada.

kuda bunting Menjawab:

Dicari ghost writer yang bisa menulis sinetron berjudul: “Vini Vidi Vici, Nazaruddin, The True Story”

Oleh karena itu, memang dibutuhkan penulis skrip sinetron yang handal. Vini Vidi Vici adalah ungkapan yang terkenal untuk memperlihatkan seorang tokoh yang memenangkan kasusnya. Selain penulis skrip, juga dibutuhkan sutradara yang mengatur perkembangan dari cerita (baca kasus korupsi) yang ada.

@kuda bunting juga dibutuhkan sutradara yang bisa menghadirkan awaludin dan ahirudin dari sinetron ini.

Kuda bunting menghadirkan nada kalimat yang sesuai dengan rima dari Nazarudin yaitu Awaludin untuk merujuk pada siapa yang mengawali ceritanya. Kemudian cerita ini akan diakhiri oleh Akhirudin. Kedua nama ini adalah nama yang umum di Indonesia, yang kemudian memilili rima yang sama dengan Nazarudin.

Komentar di bawah ini memperlihatkan perkembangan cerita ala sinetron. Komentar seperti ini merupakan reaksi terhadap *postingan* orang lain yang cukup menarik perhatian orang. Seperti komentar mengenai proses penangkapan Nazarudin yang dilakukan oleh Polisi Kolumbia. Termasuk mengusulkan diri menjadi pemain pengganti, dengan imbalan yang menarik. Pelarian Nazarudin memiliki latar belakang “penggelapan” uang yang cukup besar.

Rinthanna says:

Wahhh... Bakal seru tuh, apalagi kalo aku yg brperan sbgai police kolmbia'nya pasti film'nya mkin heboh...

venny says:

saya mau jd artis peran pengganti jd neneng sri wahyuni...tp shootingnya ke Luar Negri juga ya...pasportku dah ada kok...

@venny, pilihan yang bagus, bayaran peran pengganti saya dengar bisa saja lebih tinggi dari sang bintang;-D

Posting lain adalah komentar yang pesimis mengikuti perkembangan kasus ini, sehingga lebih baik melakukan uapaya lain yang lebih berguna. Meskipun kemudian dibalas kembali dengan mengatakan bahwa mengikuti perkembangan ini hanyalah selingan saja.

abi zalwa says:

sudahlah cape!, mendingan istirahat daripada nonton sinetron-sinetron murahan itu. Ada yang lebih utama utk kita lakukan, untuk kebaikan bangsa ini.

@abi zahra, Saya setuju, masih banyak yang bisa kita lakukan selain menonton menilai dan berujung menghujat, tapi sekali-sekali menonton ga papa lah hitung-hitung menyegarkan pikiran 😊

app wap says:

paling2 bentar lagi juga ganti pemain, kayak yang udah2... tahu ndirilah, biar g membosankan 😊

@app wap, Dengan alasan penyegaran 😊

Pengusulan judul sinetron yang di bawah ini juga menarik untuk diperhatikan, kasus Nazarudin dianggap kasus yang extravaganza, dalam pengertian posisinya dalam partai cukup bagus, sehingga mengakibatkan banyak pertanyaan. *The conqueror*, sang penakluk yang memperdayai banyak orang. Untuk beberapa kelompok, Nazarudin tidak dianggap sebagai orang yang bersalah melainkan sebagai seorang Hero, seorang pemenang, pengelana, pembohong besar, pemberi, orang yang beruntung, penipu. Termasuk juga hubungannya dengan beberapa orang seperti Nazarudin dan istrinya (teman perempuannya), dan hubungannya dengan kelompoknya.

kuda bunting says:

Judul Sinetron 10 episode:

Nazaruddin the coqueror

Nazarudin the provider of all

Nazarudin the biggest liar

Nazarudin the adventurer

Nazarudin and his Women

Nazarudin My Hero

Nazarudin the Liar

Nazarudin and the Company

Nazarudin the lucky wizard

Nazaruddin the impostor

Kalau ada pengarang yang pandai mengolah kisah siNazar ini, dijamin akan dapat menjadi cerita termasyhur sedunia dan pasti mengalahkan cerita James Bond dan Harry Potter. Cepat kumpulkan bahgan dan garap judul cerita ini....

Pelariannya cukup mentakjubkan orang Indonesia, yang terbiasa dengan pelarian yang tidak dapat dilacak keberadaannya, atau pelarian disekitar negara di Asia. Sehingga pelariannya hingga ke Amerika Latin menimbulkan banyak pertanyaan dan juga spekulasi.

kuda bunting says:

Beberapa judul Sinetron Nazaruddin yang akan di terbitkan:

1. Nazaruddin, Anak Desa jadi Penguasa
2. Kisah Nazarudin anak Desa Bangun Pengembara
3. From Cartagena With Love
4. Rise and Fall of Nazarudin
5. Nazar my Naughty Hero. Semoga Penulisnya mampu mengisahkan Nazarudin sebagai the most popular fugitive and clown in the world, sehingga berhasil memperoleh piagam dari MURI

Untuk melengkapi sebuah sinetron diperlukan lagu yang sesuai. Pada banyak sinetron, *soundtrack*-nya cukup menarik sehingga lagu mewakili sinetronnya. Beberapa sinetron yang menggunakan pemain yang juga penyanyi, menggunakan lagu *hits* dari penyanyi tersebut untuk *soundtrack*nya.

penyanyi says:

Waaah... Klu sinetron berarti kudu ada sountrack lagunya ya....

saya mulai nyanyi ya.

Udin yg Pertama namanya Awaludin.

Udin yg suka di jalan namanya Jalaludin.

Udin yg suka korup namanya Nazarudin.

Udin yg lg bingung namanya Nazarudin.

Udin yg abis kabur namanya Nazarudin.

Udin yg lg bungkam namanya Nazarudin....

Udin udin namamu norak tapi Terkenal.

Komentar mengenai lagu ini mengangkat nama Udin, nama yang umum digunakan di Indonesia, untuk mengejek kasus ini.

Cerita sinetron cenderung mengambil dalih menggambarkan cerita yang sebenarnya terjadi di masyarakat, seperti kasus-kasus yang

masuk ke media massa. Dalam hal ini kasus yang dimaksud adalah kasus yang berhubungan dengan keluarga, seperti cerita yang dikembangkan dari kasus Manohara, yang lari dari suaminya, seorang Datuk dari Malaysia. Sehingga masyarakat juga mengidentifikasi hal serupa akan terjadi pada kasus Nazarudin.

xxx says:

paling ujung-ujungnya ada adegan amnesia-nya

@xxx, Itu salah satu kemungkinan, tapi jangan lupa sinetron Indonesia sering memutus kontrak pemeran utama di tengah jalan, jadi bisa saja kemudian di ceritakan sang pemeran utam(a) hilang atau bahkan mati dan masuk pemeran utama lainnya 😊

Di dalam sinetron, cerita seringkali terlihat dibuat-buat, amnesia merupakan salah satu cara yang jitu untuk merubah atau menambah ketegangan sebuah cerita. Amnesia atau hilang ingatan juga menjadi salah satu alasan yang dikemukakan oleh beberapa tokoh dengan tuduhan korupsi. Selain itu, perkembangan kasus korupsi selalu memperlihatkan ketidakajegan, di mana kasus akan ramai dibahas di media massa, namun beberapa saat kemudian kasus tersebut seperti hilang dan tidak mendapatkan perhatian lagi dari publik. Dalam konteks seperti ini meskipun tampak tidak ramai, namun sebenarnya kondisi ini menghasilkan rasa tidak percaya kepada pemerintah.

Sugiarto says:

Bisa bayangkan yang nonton sinetron ini adalah para pahlawan RI. Betapa pedih hati mereka. Darah dibalas dengan pengkhianatan para koruptor.

Semoga kepedihan mereka segera berakhir, dan semoga para penghianat segera sadar

Komentar di atas ini mengkaitkan kasus ini dengan para pendahulu republik ini yang sudah berkorban, dan sudah membangkitkan negeri ini. Tindakan para koruptor merupakan tindakan pengkhianatan terhadap negeri ini. koruptor dimetaforakan

sebagai penghianat, karena hanya menguntungkan diri sendiri saja dan mencoreng nama Indonesia.

Pada wacana itu dikemukakan sebagai berikut.

Bukan “Cinta Fitri”, tidak pula “Putri yang Ditukar.” Ini *sebuah sinetron bangsa* berdurasi jangka panjang yang akan mengaduk-aduk opini kita tentang sebuah cerita yang tidak melulu happy ending dan belum tentu bad ending.

Nazarudin. Judul besar sebuah sandiwarra baru yang mengetengahkan dagelan politik dan hukum paling kentara di Indonesia. Nama baru, lakon baru, tapi cerita lama yang didaur ulang dalam scenario cerita yang sejatinya tidak akan jauh berbeda seperti kasus Gayus, Century, BLBI, dan banyak yang lain.

Ada keterhubungan antara wacana di atas dengan wacana lain yang ada di salah satu web internet, yang berjudul *Nazaruddin: Sinetron Terbaru TV Indonesia*, yang *diposting* oleh **Hifzian** pada 16 Agustus 2011 yang telah disinggung sebelumnya. Di atas sudah dipaparkan tentang isi dari *postingan* tersebut, dan di bawah ini merupakan jawaban atau komentar terhadap *web* tersebut.

@xxx, Itu salah satu kemungkinan,tapi jangan lupa sinetron Indonesia sering memutus kontrak pemeran utama di tengah jalan,jadi bisa saja kemudian di ceritakan sang pemeran utam hilang atau bahkan mati dan masuk pemeran utama lainnya


Hal yang dapat dikemukakan dari dua wacana di atas dan juga komentar *blog* tersebut ialah metafora yang terdapat dalam wacana itu bukanlah metafora tunggal, melainkan serangkaian metafora yang membandingkan *kasus Nazaruddin yang begitu mendominasi pemberitaan di media massa dan media sosial baru dengan serial sinetron*. Pada kedua wacana di atas, *serial sinetron* merupakan citra umum yang terdapat dalam sepanjang wacana. Sebagai sebuah sinetron, cerita kasus Nazaruddin akan terus bersambung dari waktu ke waktu. Mungkin rakyat Indonesia sebagai penonton sudah mengetahui

akhir cerita dari sinetron Nazaruddin ini. Namun, rakyat Indonesia akan terus menontonnya sampai adanya sinetron baru yang dibuat oleh sutradara yang sama.

Para pemain yang terlibat dalam kasus Nazaruddin turut menjadi daya tarik tersendiri karena banyak petinggi Partai Demokrat yang tersudut. Apalagi, dalam tayangan penangkapan Nazaruddin dibuat seperti sinetron laga dengan menghadirkan pemain bersenjata dan juga pemain impor dari Kolombia. Ada adegan konyol, ada adegan lucu, dan ada pula adegan yang menggemaskan yang diperankan dengan sangat baik oleh masing-masing pemeran.

Kenali siapa calon pemimpin anda. *Jangan pilih kucing dalam karung. Apalagi jual diri karena politik uang.* Maksimal 5 hari uang2 itu jadi taik kembali. Padahal *Anda pasti diperkosa dan dirampoknya* selama 5 tahun. Bangkitlah rakyat Indonesia!⁷²

Pernyataan “Anda pasti diperkosa dan dirampok” merupakan metafora predikat. Metafora jenis ini memiliki citra pada predikat kalimat, sedangkan komponen lainnya dinyatakan secara harfiah. *Diperkosa dan dirampok* merupakan predikat bagi subjek kalimat *Anda*, yang dalam bentuk aktif berbunyi “*Pemimpin Indonesia memperkosa dan merampok Anda sebagai rakyat.*” Predikat ini merupakan citra dari kalimat di atas dan hanya cocok untuk menggambarkan perbuatan yang kasar. *Diperkosa dan dirampok* digunakan secara metaforis untuk menjelaskan pemimpin Indonesia yang terpilih melalui pemilu yang dengan kasar dan tanpa malu-malu memperkosa hak-hak rakyat untuk mendapatkan dana pembangunan bagi kesejahteraannya dan juga merampoknya untuk kepentingan diri sendiri atau kelompoknya.

Partai Demokrat ternyata gudangnya penyuap dan sarangnya koruptor.....mana janji kampanyenya

⁷²Sabar Mengadu, 9 Mei 2011, <http://www.facebook.com/profile.php?id=1618900558>

????????? Hanya slogan sj ngg bisa dipertanggung
jawabkan...⁷³

Metafora di atas terdiri atas topik metafora, yaitu Partai Demokrat dan citra yang dimunculkan adalah gudang penyuap dan sarang koruptor. Gudang dalam makna primernya adalah rumah atau bangsal tempat menyimpan barang-barang. Sementara itu, sarang dalam makna primernya ialah (1) tempat yang dibuat atau yang dipilih oleh binatang unggas, seperti burung, untuk bertelur dan memiara anaknya; (2) tempat yang dibuat atau yang dipilih untuk beranak dan memiara anaknya (tikus, tupai, dan sebagainya);

Titik kemiripan antara Partai Demokrat dengan gudang dan sarang adalah keduanya merupakan tempat untuk menyimpan atau menyembunyikan sesuatu. Partai Demokrat adalah tempat persembunyian atau kediaman para koruptor dan di dalamnya terdapat banyak koruptor karena disamakan dengan gudang yang menyimpan banyak stok barang. Dalam tubuh Partai Demokrat berdasar pada pikiran komentator tersebut terdapat banyak koruptor. Mungkin juga anak-anak para koruptor itu dipiara di dalam tubuh Partai Demokrat karena Partai Demokrat adalah tempat yang aman untuk melindungi dari serangan berbagai penjur.

KPK banci kalau berhadapan dgn kader2 Partai Demokrat....mereka cuma bisa mejeng nama dan sok sucidan brani di media masaa aja..mana nyalimu KPK??????⁷⁴

Hal itu dikomentari *facebook* lain sebagai berikut:

Gantung Koruptor hahaha...KPK pasca Antasari...
mbelgedesss, cemen, *ayam sayurrrr!!!!*

Komentar itu terdiri atas dua metafora kalau ingin topiknya dieksplisitkan, yaitu (1) *KPK adalah seorang banci* dan (2) *KPK adalah ayam sayur*. Pada metafora *KPK adalah seorang banci*,

⁷³Tiara Jo, 26 Mei 2011, <http://www.facebook.com/tiarajo>

⁷⁴Nabila Khairunnisa Alhimar, 27 Mei 2011, <http://www.facebook.com/profile.php?id=100000850673909>

komentator di FB itu ingin menunjukkan titik kemiripan antara KPK dengan seorang banci, yaitu seorang banci diidentikkan dengan ketidakberaniannya menghadapi sesuatu, apalagi kelompok yang berkuasa, dalam hal ini adalah Partai Demokrat.

Makna seperti itu juga terkandung dalam metafora *KPK adalah ayam sayur*. Ayam adalah binatang unggas yang tidak dapat terbang, dapat dijinakkan dan dipiara. Ayam sayur identik dengan ayam pedaging atau ayam potong, yang dipiara untuk disembelih dan menghasilkan daging untuk dimasak. Ayam sayur dipiara memang untuk disembelih dan dijadikan lauk; bukan untuk dijadikan petarung seperti ayam aduan atau ayam “tedung” yang memang dipiara untuk siap bertarung. Berdasarkan makna primer itu, *metafora KPK adalah ayam sayur* bermakna KPK adalah lembaga yang tidak berani bertarung, apalagi dengan orang yang memiarnya, yaitu pemerintah atau partai penguasa, dalam hal ini Partai Demokrat. Oleh sebab itu, KPK bisa dijinakkan oleh Partai Demokrat.

Tugas para pejabat negara adalah melayani rakyat, bukan menjadikan *rakyat sebagai sapi perah!*...⁷⁵

Metafora lengkap dari kalimat di atas ialah “*koruptor menjadikan rakyat sebagai sapi. Jadi, rakyat adalah sapi perahan.*” Ditinjau dari makna primernya, *sapi perah* adalah sapi yang khusus dipiara untuk menghasilkan susu. Jika dalam metafora tersebut rakyat adalah sapi perahan dari para pejabat yang menjadi koruptor, ada titik kemiripan antara sapi perah dan rakyat, yakni keduanya dapat dipekerjakan dan menghasilkan sesuatu yang bisa dinikmati oleh orang lain. Karena itu, sapi perahan bermakna kias ‘orang yang diperas tenaganya atau penghasilannya, dan sebagainya oleh orang lain; orang yang dimanfaatkan secara terus-menerus oleh orang lain.’ Metafora itu menyiratkan bahwa para pejabat pemerintah di Indonesia memeras penghasilan rakyat melalui berbagai kebijakan pajak yang dinikmati oleh para koruptor. Ada sinyalemen, seandainya 50% pajak rakyat bisa

⁷⁵Arifin Sang Petualang, <http://www.facebook.com/fjigsamklsae>. Diunduh 27 Mei 2011.

masuk ke kas negara dan digunakan secara baik, rakyat akan sejahtera dan negara tidak perlu berutang ke luar negeri. Sinyalemen itu menunjukkan bocornya pajak yang diperah dari rakyat tetapi tidak kembali ke rakyat.

Kenapa pemerintah & elit politisi kita dgn Singapura loyo, sedangkan dgn Australia berani paksa untuk bikin Perjanjian Ekstradisi ? Jawabnya cuma satu dan satu2nya, “Karena nanti mereka2 itu *para koruptor kakap* menyimpan uang hasil korupsinya di mana dong..?”⁷⁶

Bentuk asal dari metafora di atas ialah “*pemerintah dan elit politik adalah para koruptor kakap.*” Penggunaan kata *kakap* sebagai dari jenis ikan dapat ditelusuri berdasar makna primernya, yaitu *kakap* sebagai ikan laut yang buas, berbadan lebar dan pipih, berwarna merah atau hitam, panjangnya dapat mencapai satu meter.

Berdasar makna primer itu, makna metafora di atas merujuk pada koruptor kakap atau koruptor yang berukuran besar mewakili jumlah uang yang dikorupsi dan tingkat kualitas kejahatannya yang seringkali tidak tampak kasat mata.

Bagaimana membuat seratus pekerjaan yang akan
menghidupi ribuan pemuda....
Saatnya telah kritis, dan hampir2 terjadi keputusasaan
massal..
Jangan biarkan itu terjadi..
Jangan biarkan *harapan mereka dimakan hama*
Jhony Kiyosaki
15 Juni 2011
<http://www.facebook.com/putra.madiun>

Harapan mereka dimakan hama merupakan metafora tidak penuh. Titik kemiripan dan topik tidak disebutkan. Jika disebutkan secara lengkap, citra kalimat tersebut ialah *koruptor adalah hama yang memakan harapan mereka (ribuan pemuda)*. Titik kemiripan antara

⁷⁶Sabar Mangadu, <http://www.facebook.com/profile.php?id=1618900558>. Diunduh 3 Juni 2011,

koruptor dengan hama adalah keduanya dapat mengganggu dan merusak. Hama merupakan hewan yang mengganggu produksi pertanian seperti babi hutan, tupai, tikus, dan terutama serangga. Hama tanaman ini harus diberantas terus-menerus seperti halnya korupsi karena korupsi dapat merusak sendi-sendi kehidupan bernegara dan juga mengganggu system pemerintahan.

Wacana Korupsi dalam Kasus Nazaruddin

Ada sejumlah komentar yang dapat dianalisis sehubungan dengan kasus Nazaruddin. Dalam *web* yang salah satu tulisannya berjudul *Demokrat Cegah Nazaruddin "Bernyanyi"*. Maria Natalia | Inggried Selasa, 24 Mei 2011, terdapat dua komentar sebagai berikut.

"Jadi dia (Dewan Kehormatan) tidak mau bergerak terlalu jauh dengan memberikan hukuman terlalu banyak kepada Nazarudin karena takut *nyanyiannya terlalu kencang*.

Pada komentar di atas ini memperlihatkan citra metaforanya saja, yaitu *nyanyiannya terlalu kencang* yang disebutkan secara eksplisit. Berdasarkan konteksnya dapat diketahui bahwa *nyanyiannya terlalu kencang* digunakan untuk menjelaskan topiknya, yaitu *pengakuan Nazzarudin* (di depan media massa). Dalam kasus ini Nazaruddin adalah mantan bendahara Partai Demokrat, partai penguasa di Indonesia. Ketika dia tertangkap karena kasus korupsi, pengakuan Nazaruddin tentang hal ikhwal korupsi yang dia lakukan dan yang melibatkan rekan-rekannya di Partai Demokrat itulah yang dijelaskan dengan citra *nyanyiannya terlalu kencang*. Titik kemiripan antara citra, yaitu *nyanyiannya terlalu kencang* dan topik, yaitu *pengakuan Nazzarudin* (di depan media massa), juga tidak disebutkan secara eksplisit dalam metafora tersebut.

"Kita tunggu BK DPR mengusut kasus ini. Memang cara terbaik dia (Nazaruddin) mengundurkan diri dan itu *menyelamatkan muka* semua orang, tapi itu tidak terjadi.

Jika dikembalikan ke bentuk dasarnya, metafora yang terdapat dalam kalimat tersebut berbunyi: "*Pengunduran diri Nazaruddin*

menyelamatkan muka semua orang.” Muka adalah pengertian metaforis. Secara teoretis, konsep muka bersifat universal. Namun, strategi mengancam muka dan menyelamatkan muka berbeda dari satu kebudayaan dengan kebudayaan lain. Secara teoretis, konsep muka diperoleh dari Goffman (1971) dan selanjutnya dikembangkan oleh Brown-Levinson (1978; 1987). Konsep muka bertalian dengan istilah dalam masyarakat Inggris—yang juga ada dalam banyak bahasa lain—tentang “*lost face*” dalam arti ‘dipermalukan atau dihina’. Dalam bahasa Indonesia pun ada ungkapan seperti *kehilangan muka*, *menyembunyikan muka*, *menyelamatkan muka*, dan *tebal muka*. Konsep ini mengakui kesantunan sebagai ritual dan mempertahankan “muka” dalam interaksi merupakan unsur utama dalam konsep kesantunan yang berterima. Jadi, muka ialah sesuatu yang secara emosional dicurahkan, dan dapat hilang, dipertahankan, atau ditingkatkan, dan harus secara diperhatikan secara konstan dalam interaksi (1987: 61).

Brown dan Levinson (1987: 62) memperlakukan aspek muka sebagai “keinginan dasar”. Mereka juga terinspirasi pembedaan Durkheim (1915) antara “tata cara” (*rite*) negatif dan positif sehingga terjadilah pembedaan muka positif dan muka negatif. Muka negatif mengacu kepada citra diri seseorang yang berkeinginan agar ia dihormati dengan dibiarkan bebas melakukan apa yang diinginkannya (1987: 62; 129). Jadi, kesantunan negatif berkaitan dengan keinginan tiap orang untuk bebas bertindak, tidak dihalangi oleh orang lain, terbebas dari tekanan. Jika yang dikemukakan ialah tindak tutur direktif, misalnya, yang terancam ialah muka negatif petutur. Dinyatakan demikian karena dengan meminta orang untuk melakukan sesuatu, penutur sebenarnya menghalangi kebebasan dia untuk melakukan tindakannya atau bahkan kebebasan dia menikmati tindakannya. Sebuah penawaran (*offer*) pun dapat mengancam muka penutur karena itu berarti petutur harus bersedia melakukan apa pun keputusan penutur.

Sementara itu, muka positif mengacu kepada citra diri yang berkeinginan agar apa yang dilakukan dan dimilikinya, termasuk nilai nilai yang diyakini diakui atau dihargai oleh orang lain (1987: 60; 101).

Jadi, muka positif berkaitan dengan keinginan tiap orang untuk dihargai orang lain. Misalnya, orang yang telah bersusah payah belajar dan mendapatkan IP 3,50 dikatakan kepadanya “Ah, IP 3,50 itu belum ada apa-apanya” dapat dirasakan bahwa petutur tidak dihargai atas apa yang diraihnya. Dengan tuturan seperti itu, muka positif petutur terancam. Begitu pula dengan ungkapan ketidaksetujuan (*disagreement*) dapat mengancam muka positif petutur sebab ungkapan ketidaksetujuan berarti petutur berpikir bahwa ada sesuatu yang salah dengan pendapat yang diajukan petutur.

Brown-Levinson (1987: 60) menyatakan bahwa banyak tindak tutur yang secara intrinsik mengancam muka. Tindak itu diacu sebagai Tindak Pengancam Muka (*Face Threatening Acts*), yang selanjutnya disingkat TPM. Seperti ditunjukkan Goffman (1972), petutur dalam interaksi berorientasi, baik kepada mukanya sendiri maupun muka petutur. Dengan begitu, terdapat dua orientasi, yaitu orientasi defensif yang mengarah pada penyelamatan muka sendiri dan orientasi protektif yang mengarah pada penyelamatan muka petutur. Orang diharapkan mempertahankan muka sendiri jika terancam. Namun, ketika mempertahankan mukanya sendiri, mereka mengancam muka orang lain. Selanjutnya, pada umumnya hal itu akan memunculkan keinginan antarpartisipan untuk mempertahankan muka masing-masing pihak dan mereka dapat diharapkan untuk bekerja sama dalam mempertahankan muka dalam interaksi. Jadi, keterancaman muka dapat dialami oleh petutur maupun penutur, baik pada muka positif maupun positif.

Berdasar konsep yang dikembangkan Goffman itu, tindakan korupsi merupakan tindakan mengancam mukanya sendiri dan juga mengancam muka Partai Demokrat, partai tempat bernaungnya Nazaruddin. Karena itu, jika Nazaruddin *menyanyi terlalu kencang*, Partai Demokrat akan betul-betul kehilangan muka, yakni kehilangan harga diri dan citra diri di depan rakyat Indonesia. Karena itu, pengurus Partai Demokrat berusaha menyelamatkan muka pengurus dan anggotanya.

Web lain yang dikaji adalah *web* yang wacananya berjudul "Serangan Lanjutan dari Nazaruddin" dalam *Isyana Artharini Yahoo News* Selasa 19 Juli 2011. Pada dasarnya jika dikembalikan ke bentuk dasarnya, pernyataan metafora dari judul wacana tersebut ialah "Pengakuan Nazaruddin adalah Serangan (bagi Partai Demokrat dan orang-orang yang namanya disebut)." Ada titik kemiripan antara topik (pengakuan Nazaruddin) dengan citra (serangan), yaitu keduanya dapat mengancam muka. Konsep itu melahirkan ungkapan metaforis yang mengikuti pola tertentu, yaitu ada hal-hal tertentu yang dilakukan dan tidak dilakukan dalam sebuah pengakuan (korupsi), seperti *menyerang satu posisi, memenangkan, dan bertahan atau tidak dapat bertahan*. Semua unsur itu membentuk suatu sistem dalam membicarakan proses pengakuan korupsi dengan menggunakan sudut pandang sebuah pertempuran.

Wacana itu berkaitan dengan wacana yang ditulis oleh seorang *blogger*, yaitu *Nasib Nazarudin Makin Tak Jelas*.⁷⁷ Pada wacana itu dikemukakan sebagai berikut.

Strategi Anas memang menggunakan teknik total football Gus Hiddink yang menyerang terlebih dahulu sebagai pertahanan yang lebih efektif sehingga Nazaruddin tidak sempat melancarkan serangan baliknya sebagaimana ia lakukan saat berada dalam persembunyiannya.

Para politisi Demokrat sejak mendengar laporan tertangkapnya Nazarudin di Cartagena, Kolumbia itu tentu saja telah mengadakan kongkownya dengan petingginya SBY untuk mengatur suatu *strategi khusus* dalam upaya menghadapi gejolak sosial sekiranya memang Nazarudin masih bisa bernyanyi nyaring di pengadilan Indonesia, sebelum di bungkam sebagaimana halnya Susno Aji itu.

⁷⁷<http://hankam.kompasiana.com/2011/08/09/memprediksi-nasib-nazaruddin-kedepan/>—http://blog._Unitomo.ac.id/brantaskoruptor/08/16/nasib-nazarudin-makin-tak-jelas/ diunduh 15 September 2011.

Meskipun menggunakan metafora sepakbola, kedua wacana tersebut berkaitan karena oleh penulis dianggap bahwa pengakuan Nazarruddin dan pengakuan Anas merupakan pengakuan yang saling menyerang. Keduanya dimetaforakan terlibat pertempuran. Ada yang menyerang, ada yang bertahan, dan ada pula yang melakukan serangan balik. Masing-masing pihak mengatur strategi, baik strategi menyerang maupun strategi bertahan.

Pada wacana di atas juga terdapat pernyataan sebagai berikut.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat mengetahui soal *aliran dana* ke pihak-pihak yang mendukung pemilihan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Pernyataan itu mengandung konsep metaforis, yaitu *dana adalah air* sehingga terlihat kemiripan antara dana dengan air, yaitu keduanya memiliki sumber sehingga ada sumber air dan sumber pendanaan, mengalir, mengendap, dan sebagainya.

Pernyataan lainnya ialah

Dalam sebuah pertemuan di kantor DPP Partai Demokrat, Anas mengatakan, "Kalau *kasusnya meledak*, ente berangkat ke Singapura. Paling lama 3 tahun, setelah perubahan pemerintahan."

Pernyataan memiliki metafora yang memiliki citra pada predikat kalimat, yaitu *meledak*, sedangkan komponen lainnya dinyatakan secara harfiah. Kata *meledak* merupakan predikat bagi subjek, yaitu *kasusnya*. Predikat ini merupakan citra dari kalimat di atas dan hanya cocok bagi benda. Karena itu, dalam kalimat ini kata *meledak* digunakan secara metaforis untuk menjelaskan subjek *kasus*, yaitu kasus korupsi.

Pernyataan lain dibuat oleh Fajrul Falakh yang berjudul "KORUPTOR NAZARUDIN ADL JANTUNGNYA DEMOKRAT"

Menurut Pengamat politik Fajroel kepada Gatra magazine
Nazaruddin ini adalah Jantung dari keluar-masuknya uang

demokrat, mulai dari biaya pemeliharaan kekuasaan SBY sampai menjadi bendahara bagi rekening gendut para petinggi Demokrat. Bahkan, disinyalir elit-an2 seperti Anas Urbaningrum dan Mallarangeng brothers adalah 'klien tetap' dari jaringan mafia di dalam Partai Demokrat ini.

Topik dari metafora dalam judul tulisan Fajrul Falakh adalah Koruptor Nazarudin, sedangkan citranya adalah jantungnya demokrat. Makna primer dari jantung adalah bagian tubuh dari pusat peredaran darah yang letaknya di dalam rongga dada sebelah atas. Titik kemiripan antara topik dan citra dalam metafora itu adalah keduanya bagian yang sangat penting dari satu sistem. Nazarudin sebagai bendahara mengendalikan keluar masuknya uang Partai Demokrat seperti halnya jantung yang menjadi bagian dari pusat peredaran darah. Oleh karena itu, “nyanyian” Nazarudin adalah nyanyian maut yang bisa menyudutkan Partai Demokrat hingga terpuruk.

Metafora hidup *digunakan oleh Rhenald Khasali untuk mendeskripsikan Nazarudin, yaitu Nazarudin 'Sprinter' Muda Korupsi*

Pakar manajemen, Rhenald Khasali, menilai *mantan bendahara Partai Demokrat, M Nazarudin mewakili generasi muda yang menjadi 'sprinter' dalam hal korupsi*. “Saya heran, dia bisa dapat proyek ratusan miliar, sedangkan saya, guru besar dapat honor menjadi pembicara tak sampai belasan juta rupiah,” ujarnya dalam diskusi di satu radio berjaringan.

Bentuk dasar dari metafora itu adalah *Nazarudin, mantan bendahara umum Partai Demokrat, adalah sprinter dalam hal korupsi yang mewakili generasi muda*. Topik metafora itu ialah *Nazarudin, mantan bendahara umum Partai Demokrat*, sedangkan citranya ialah *sprinter*. Sprinter adalah pelari jarak pendek dengan menggunakan cara lari secepat mungkin untuk menempuh seluruh jarak. Titik kemiripan di antara keduanya ialah sama-sama bisa mencapai tujuan dalam waktu singkat. Nazarudin begitu cepat menggapai posisi puncak dalam jajaran kepemimpinan Partai Demokrat dan juga begitu cepat memperoleh harta

benda dalam usia yang masih sangat muda seperti seorang pelari jarak dekat yang secepat kilat mencapai titik akhir tujuan.

Simpulan

Dalam paparan di atas terlihat adanya keterkaitan antara dunia nyata dengan dunia maya di dalam isunya. Pada dunia nyata terlihat adanya struktur yang menunjang penggunaan dari dunia maya, dalam hal ini terlihat dari peningkatan jumlah pengguna FB. Memang harus diakui bahwa umumnya orang menggunakan FB adalah untuk sebuah hubungan sosial, atau perdagangan dengan maraknya penjualan online. Akan tetapi untuk kasus tertentu FB sebagai jejaring sosial, juga mampu berperan sebagai mekanisme untuk menggarap kepedulian dan juga untuk sebuah gerakan sosial.

Upaya menggerakkan kepedulian untuk kasus KPK ini sudah berhasil menggalang kepedulian, dan menjadi alat yang sangat efektif ketika gerakan di dunia nyata juga mendukung isu yang ada. Mereka yang di dunia nyata bergerak memobilisasi kepedulian dan bersama-sama dengan dunia maya menjangkau dan menginformasikan kepedulian ini. Hasilnya adalah kedua pimpinan KPK yang didakwa tidak jadi dimasukkan bui. Namun aktivitas ini kemudian mengendur sesuai dengan perkembangan dari kasus yang ada. Saat ini bahkan laman tersebut sudah tidak ada lagi, mengikuti kasus pimpinan KPK dan KPK sendiri yang membingungkan masyarakat.

Postingan yang dilakukan masyarakat menunjukkan kreatifitas mereka, seperti membuat kartun untuk menggambarkan kasus ini. Mereka juga membuat penjelasan yang memicu orang lain untuk berkomentar. Kreatifitas ini merupakan ungkapan dari pandangan masyarakat tentang hal ini, mereka melakukan ekspresi melalui kata-kata, ungkapan, analogi dan sebagainya.

BAB IV

INTERNET DAN KAJIAN CYBERDEMOKRASI

Pendahuluan

Bagian ini merupakan upaya untuk menyatukan informasi dan juga sebuah upaya untuk merefleksikan perkembangan dari penelitian ini. Sebagaimana telah disebutkan bahwa penelitian ini menggunakan dua data baik dari dunia nyata seperti beberapa wawancara dan masukan dari pakar; dan data dari dunia maya seperti *postingan* tentang kasus korupsi. Paparan di bawah ini memperlihatkan dua hal yaitu tentang penelitian tentang internet dan kajian tentang cyberdemokrasi. Keduanya pada kajian ini berjalan bersamaan, karena pada kenyataannya kajian ini tidak bisa dipisahkan satu dan lainnya. Salah satu hal yang diperoleh dari pengalaman melakukan penelitian seperti ini adalah, internet merupakan sebuah *field* “baru”, dalam pengertian bahwa paparan tentang hal ini belum banyak dilakukan. Yang kedua adalah kasus yang diangkat memperlihatkan dukungan dan paparan yang berbeda. Peneliti berusaha memadukan baik informasi yang diperoleh dari bacaan untuk membantu memformulasikan penelitian ini dan informasi yang diperoleh dari lapangan nyata dan lapangan maya.

Lapangan Nyata

Penelitian ini belum banyak dilakukan. Oleh sebab itu, pertanyaan tentang signifikansinya masih sering terdengar. Pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan yang logis saja, di mana *field* yang baru ini memperlihatkan kasus-kasus yang seringkali tidak saling berhubungan. Namun di dalam pembahasan tentang kepentingan perkembangan demokrasi, ternyata *field* seperti ini sangat penting untuk digarap. Dalam konsep dunia maya, cyberdemokrasi adalah sebuah laman yang diantisipasi untuk mendukung perkembangan demokrasi dan juga perubahan yang terjadi di masyarakat.

Membicarakan cyberdemokrasi sendiri paling tidak dapat dilihat dari dua hal, yang pertama adalah penggunaan struktur internet untuk mendukung partisipasi politik. Beberapa kegiatan yang dibahas dalam konteks ini adalah e-voting dan menggunakan peran interaktif yang mampu dikembangkan untuk mendekatkan antara politisi dengan konstituennya, dan atau mendekatkan masyarakat dengan perwakilannya di parlemen. Pembicaraan tentang hal ini mendominasi kajian yang dilakukan di negara yang sudah memiliki struktur TIK yang baik dan menjangkau para warganya. Yang kedua adalah melihat struktur TIK seperti ini sebagai ekspresi politik para warganya. Kajian yang kedua ini ditujukan untuk melihat perkembangan yang terjadi di masyarakat yang bisa jadi tidak diperhatikan oleh mereka yang berada di ruang politik.

Penelitian yang kedua ini menjadi menarik jika diletakkan pada konteks Negara Dunia Ketiga yang memiliki kelemahan *digital divide*, atau kesenjangan digital. Kesenjangan digital tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan struktur TIK yang menunjang, ketersediaan alat seperti komputer dan jaringan yang terjangkau, tetapi juga pemahaman dan pengetahuan tentang bagaimana cara menggunakannya dan bagaimana mencari informasi yang memadai atau yang berguna. Akan tetapi perkembangan teknologi TIK sangat pesat, sehingga *gadget* yang sederhana seperti telepon selular sekarang sudah pandai dan dapat mengakses internet. Beberapa *gadget* sudah didisain untuk langsung memiliki koneksi dengan FB dan *twitter* sebagai mekanisme jaringan sosial yang populer di Indonesia. Perang harga sudah menjadikan jaringan semakin terjangkau dan masuknya gadget yang murah membuat akses menjadi semakin baik.

Di masyarakat terdapat kesenjangan terhadap penggunaan internet dan jejaring sosial. Hal ini terlihat dari kasus-kasus yang muncul, seperti kasus Prita yang menghadirkan beberapa kontroversi. Antara lain adalah bagaimana batas sebuah komentar yang kemudian ditafsirkan sebagai sebuah pernyataan yang berbau pidana. Masalah seperti ini, adalah kasus yang memperlihatkan bahwa baik mereka yang mengatur tentang komunikasi, termasuk sesuatu yang berhubungan

dengan internet, maupun mereka yang menggunakannya masih terdapat kesenjangan. Aturan yang ada belum menggapai apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat sehingga masyarakat dalam hal ini diwakili oleh Prita tidak merasa diproteksi oleh negara. Dalam sisi lain perkembangan penggunaan ini juga kurang diteliti sehingga juga sulit mengidentifikasi arah perkembangannya dan mengantisipasi apa yang dibutuhkan untuk mendukung struktur ini.

Kajian ini melihat TIK sebagai sebuah struktur, seperti halnya jalan raya atau alat transportasi lainnya yang membutuhkan fasilitas, seperti pelabuhan atau alat pemantau trafik di angkasa. Sehingga membicarakan cyberdemokrasi dalam pengertian menggarap e-voting akan sangat berhubungan dengan kemampuan negara dan masyarakat untuk mengembangkan sebesar-besarnya dan semudah-mudahnya partisipasi masyarakat. Sedangkan kesenjangan digital merupakan efek dari proses pendidikan dan keterbukaan yang akan mempengaruhi pemahaman tentang digital dan proses-prosesnya.

Menyadari hal tersebut, kajian ini mengakui bahwa penambahan akun FB dan jejaring sosial lainnya merupakan dampak dari semakin berkembangnya teknologi bidang komunikasi. Perkembangan ini memungkinkan lebih banyak orang memiliki *gadget* dan mengakses internet dengan harga yang terjangkau. Meskipun kegiatan ini masih memperlihatkan partisipasi kelas dan pendidikan. Dalam beberapa peristiwa, kasus yang berhubungan dengan TIK sudah mulai menyeruak ke ruang publik, sehingga beberapa masalah sudah mulai timbul. Namun yang terutama diangkat oleh kajian ini adalah akses TIK ini sebagai tempat untuk mengekspresikan pandangan, pendapat dari masyarakat. Hal ini menjadi penting sebagai bentuk dari partisipasi. Internet dan jejaring sosial merupakan tempat untuk mendekatkan hubungan partisipasi politik.

Berdasarkan pernyataan dari IP, pakar komunikasi politik sekaligus politikus sebuah partai besar di Indonesia;

“Kajian yang dilakukan LIPI (PMB-LIPI) adalah langkah yang bagus meskipun agak terlambat, alasannya adalah

perkembangan sosial media sangat cepat dibandingkan sebelumnya”.

“Kajian ini juga mengisi kekurangan kita dalam menganalisis isi yang ada dibelakang sosial media. Sosial media seperti FB menghasilkan teks. Teks tersebut dapat diperoleh dari posting orang yang ingin berpartisipasi dan juga dari paparan admin yang ada di belakang laman tertentu”.

Komentar seperti ini memperlihatkan adanya kebutuhan dari kedua sisi baik dari sisi politik maupun dari sisi masyarakat. Dalam bagian sebelumnya sudah dijelaskan bahwa anggota partai dan partai itu sendiri belum memiliki sikap terhadap bentuk interaksi yang baru ini. Beberapa aktivis politik sudah mulai menggunakan mekanisme ini untuk menyampaikan pandangan, untuk berkontribusi dan juga untuk mempengaruhi opini publik yang hidup di dalam masyarakat. Meskipun kasus yang dibahas di dalam kajian ini memperlihatkan bahwa dukungan tersebut masih bersifat sporadis.

Sebagai individu IP menggunakan *gadget* TIK dan juga secara aktif berpartisipasi, menggambarkan kepiawaian karena generasinya dan aktivitasnya telah membuat yang bersangkutan turut aktif menggunakan mekanisme ini. Kecenderungan serupa juga diperlihatkan oleh GH yang merupakan akademisi bidang komunikasi. GH tidak hanya aktif menggunakan dan memantau menggunakan *gadget* TIKnya, tetapi juga aktif untuk menganalisa dan mewawancarai beberapa orang yang memiliki ketertarikan dan menggunakan internet untuk kepentingan politis.

Kajian tentang Internet

Menarik untuk diperhatikan adalah dukungan IP dalam kajian tentang internet. Berdasarkan pandangannya sebagai politikus dan juga politikus yang aktif menggunakan media sosial, dukungannya merupakan sebuah signifikansi praktis dari kajian ini. Dengan demikian, kajian yang dilakukan LIPI akan sangat membantu masyarakat memahami perkembangan baru ini. Perkembangan ini menarik untuk dilihat apakah demokrasi di Indonesia digerakkan oleh

ruang kecil ini, yaitu ruang maya, yaitu demokrasi jempol atau demokrasi jari. Signifikansi praktis yang dijelaskan oleh IP merupakan sebuah dukungan yang berarti bagi kalangan yang masih mensangsikan bahwa dunia ini layak diteliti. Jika LIPI mengkonsentrasikan diri pada kajian ini, maka akan memberikan kontribusi positif, karena belum ada institusi yang secara serius menekuni kaitan antara teknologi dengan masalah sosial.

Kebanyakan mereka yang sangsi terhadap cyberdemokrasi berawal pada pandangan bahwa mereka yang memiliki dan menggunakan akses ini jauh lebih kecil jumlahnya dibandingkan dengan jumlah masyarakat pemilih. Selain itu, pandangan ini juga memahami bahwa laman seperti ini pada umumnya menggunakannya untuk kebutuhan hubungan sosial. Tentu saja peneliti menyadari posisi seperti ini, akan tetapi sebuah perubahan sudah terjadi karena adanya perkembangan teknologi bidang TIK. Perkembangan TIK telah menghasilkan *gadget* kecil seperti telepon selular yang memiliki fungsi yang besar dan dapat mengakses internet. Perkembangan ini pada akhirnya akan sampai pada masyarakat, terlepas dari pengetahuan dan kesadaran mereka terhadap *gadget* tersebut. Terlambat menyadarinya akan merugikan masyarakat sendiri.

Dukungan IP termasuk pada pendekatan kajian teks yang memperlihatkan bahwa teks pada akhirnya berkembang terlepas dari pembuatnya. IP mengacu pada pendekatan Roland Barthes yang percaya pada pandangan bahwa pengarang telah mati. Artinya ketika sebuah teks sudah masuk ke ruang publik, maka pengarang tidak dapat mengikuti perkembangan dari teks tersebut. Setiap pengalaman akan menghasilkan makna yang berbeda, sesuai dengan pandangan orang yang membaca atau orang yang mempergunakannya, atau menginterpretasikannya. Bahkan teks yang dibaca orang yang sama dalam waktu berbeda dapat menghasilkan pemahaman yang berbeda, yang dipengaruhi oleh perbedaan persepsi. Oleh karena itu, penting untuk disadari bahwa yang menghidupkan teks bukanlah pengarangnya tapi pembacanya. Setiap orang yang membaca akan 'menyobek' hasil

bacaan tersebut dan membangun imaji sendiri tentang teks tersebut dan tentang diri kita sendiri.

Menurut IP upaya penelitian seperti ini adalah upaya antisipatif, meskipun agak terlambat dibandingkan dengan perkembangan penggunaannya. IP melihat adanya kebutuhan untuk menyadari konteks sosial politik dari laman ini, jika tidak maka akan “merugikan” masyarakat sendiri. Sebagai ilustrasi, pengetahuan seperti ini dibutuhkan untuk masukan sebuah aturan atau UU. Sehingga tentu tidak sesuai jika sebuah produk UU dihasilkan tanpa didukung oleh kajian-kajian tentang hal ini. Kajian seperti ini merupakan salah satu upaya untuk memperlihatkan pada masyarakat dan pembuat UU, tentang kenyataan sosial seperti media sosial. Keterlambatan dalam penelitian yang berhubungan dengan internet merupakan hal yang biasa karena fakta terjadi terlebih dahulu sebelum analisa bisa dikembangkan.

Hal ini merupakan salah satu dari kelemahan inheren dari penelitian yang menggunakan internet, di mana kasus dengan cepat berkembang atau hilang. Sehingga konteksnya adalah dapat dilihat dari konteks politis seperti penggunaannya untuk kepentingan politis. Namun konteks lain juga tidak kalah pentingnya yaitu bagaimana media baru ini mampu menggarap ekspresi dari masyarakat sehingga saluran aspirasi antara masyarakat dengan pemimpinnya dapat berlangsung dengan baik. Kemudian kajian ini menyumbang pada pemahaman tentang korupsi yang lebih komprehensif dalam pengertian bahwa korupsi tidak lagi semata tentang tindakan memperkaya diri sendiri, melainkan menjadi masalah yang lebih rumit lagi.

Lapangan Maya

Hubungan sosial di internet membahas tentang bagaimana mekanisme media sosial melalui FB seperti yang dipergunakan di dalam mengangkat dan mendukung isu seperti Satu Juta Tanda Tangan Dukung Bibit Chandra. Laman tersebut bisa disebut sebagai laman yang dibuat oleh pendukung isu, dia adalah aktivis yang memang didukung

oleh latar belakang pendirinya yaitu sebagai akademisi. Penggunaan FB dalam hal tersebut ditujukan sebagai upaya mengekspresikan pandangan, yang tidak diperhatikan oleh politik di ruang publik. Keinginan beberapa lembaga untuk menahan kedua pimpinan KPK ini, menghasilkan rasa jengkel yang luar biasa, sehingga laman tersebut kemudian berkembang dengan pesatnya. Tentu saja situasi di ruang publik ketika itu cukup menggambarkan sebuah tekanan yang besar. Berita tentang hal ini juga dikutip berkali-kali di media massa umum, termasuk memberitakan tentang laman ini. Berita seperti ini, memberikan akses kepada publik untuk menyalurkan ekspresinya.

Isu tentang ketidakadilan merupakan isu yang berkembang dan hidup di dalam masyarakat. Melalui serangkaian diskusi dan wawancara dengan beberapa orang muda di Yogyakarta dan Bandung memperlihatkan bahwa mereka menyadari tentang hal penggunaan media sosial sebagai cara untuk mengekspresikan pandangan mereka. Cara ini juga dinilai dapat mengatasi rintangan geografis seperti udara yang panas dan lokasi demonstrasi yang jauh. Lagipula dengan adanya mekanisme ini, mereka dapat memonitor adanya orang lain yang memiliki pandangan yang sama dengan mereka. Tanpa media sosial, perasaan ketidakadilan akan dirasa secara pribadi saja, maka dengan mekanisme ini perasaan tersebut adalah perasaan yang dirasakan juga oleh orang lain. Hanya saja, tidak semua ekspresi seperti ini dapat muncul sebagai sebuah gerakan, seperti gerakan ini mampu menghimpun orang dan melakukan demonstrasi dan mampu menekan kekuasaan untuk melepaskan kedua pimpinan KPK ini.

Kejadian seperti ini perlu disikapi sebagai bentuk dari perubahan sosial yang terjadi di Indonesia, di mana ekspresi di ruang maya menjadi nyata, dan mampu mempengaruhi proses politik. Sehingga tidak aneh bahwa ada pertanyaan tentang kemampuan media sosial untuk menumbangkan rejim seperti yang terjadi di beberapa negara Dunia Ketiga. Proses politik tidak selalu diperhatikan oleh publik, karena publik memiliki pandangan yang berbeda dibandingkan dengan mereka yang berada di ruang politik. Salah satunya adalah masyarakat memiliki isu yang bervariasi yang sesuai dengan kebutuhan

mereka. Selain itu, akses media sosial juga ditentukan oleh seberapa luwes media mainstream memberikan akses kepada masyarakat untuk menyuarakan pandangannya. Jika saluran ini tidak ada, maka kemungkinan penggunaan media sosial untuk menentang kekuasaan dapat saja terjadi.

Setiap laman selalu mendapatkan saingan dari laman lain yang diangkat oleh kelompok yang berbeda. Seperti laman Satu Juta Tanda Tangan Dukung Bibit-Chandra diikuti oleh laman lain seperti Dua Juta Tanda Tangan Dukung Susno Duaji. Bisa disebutkan bahwa hal ini adalah *bubble issue*, yang dibuat untuk menyaingi isu yang pertama, dengan menempatkan Susno Duaji pada posisi pahlawan yang lain (dibandingkan dengan kedua pimpinan KPK). Pengalaman seperti ini merupakan kasus yang perlu diangkat untuk mengamati perkembangan media sosial sebagai mekanisme “baru” mengangkut isu politik. Oleh karena itu, di media sosial masih bisa diperdebatkan apakah sebuah isu merupakan sebuah rekayasa untuk mendukung orang atau kelompok tertentu. Di dalam media sosial, yang terlihat dari kasus ini adalah mereka yang berkomentar merupakan produsen dan juga konsumen dari isu yang berkembang di media sosial. Pada satu sisi mereka merupakan konsumen yang mendapatkan isu dan penjelasan dari orang lain. Akan tetapi pada sisi lain komentar mereka merupakan proses produksi pengetahuan juga, walau menggunakan kata-kata dan analogi yang berbeda dari kata-kata yang berkembang di ruang publik. Mereka juga menghasilkan gambar untuk merepresentasikan kasus yang ada.

Kajian seperti ini dapat dikembangkan lebih jauh lagi dan dipergunakan tidak hanya untuk memperlihatkan proses-proses yang berkembang, tetapi juga mengamati perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Secara sosiologis, perkembangan yang terjadi memperlihatkan mulai tumbuhnya mekanisme baru yang memperlihatkan pola partisipasi masyarakat yang tidak terbayangkan sebelumnya. Baik insan politik maupun masyarakat pada umumnya perlu menyadari potensi ini, untuk menggarapnya menjadi mekanisme ekspresi politik. Mereka yang sudah berpartisipasi adalah *public intellectual*, orang yang sudah menyumbangkan kebiasaan mereka untuk

perbaikan masyarakat. Kemudian ruang maya ini merupakan ruang publik “baru” yang penting diperhatikan untuk menggarap masalah partisipasi politik. Insan politik dalam hal ini perlu menyadari perkembangan ini untuk membuat ruang maya ini sebagai salah satu bentuk dari partisipasi politik yang mereka kembangkan. Insan politik tidak lagi dapat mengatasnamakan masyarakat, apabila ruang ini dapat tergarap dengan baik. Sehingga tidak ada lagi kemudahan bagi insan politik untuk melakukan klaim tentang dukungan masyarakat. Perkembangan seperti ini, bagi mereka yang bergerak di media sosial, menjadi kondisi yang akan merubah wajah perpolitikan di Indonesia.

Simpulan

Kajian ini masih merupakan sumbangan awal terhadap fenomena penggunaan media sosial untuk kepentingan politik. Mereka yang bergerak di media sosial merupakan generasi muda yang memiliki kepiawaian terhadap penggunaan media, terutama media sosial. Di dalam kajian ini telah digunakan beberapa metode penelitian yang menggarap baik informasi di ruang nyata dan di ruang maya, baik wawancara maupun teks, dengan cara wacana dan metafora. Beragam metode ini dipergunakan tidak hanya untuk melihat konteks sosiologis yang lebih luas, tetapi juga sebagai cara untuk mencoba meneliti dan menganalisa perkembangan baru yang dikarenakan adanya perkembangan TIK. Masih ada saja kelemahannya, namun kajian seperti ini telah membuka kajian seperti ini untuk berkembang lebih lanjut.

BAB V

FB DALAM KONTEKS CYBERDEMOKRASI DAN SUARA MASYARAKAT SIPIL

Pendahuluan

Dalam konteks ekspresi politik kegiatan di ruang maya merupakan kegiatan yang sangat penting di dalam upaya untuk melihat partisipasi "politik" masyarakat, teknologi dan politik merupakan dua hal yang selalu berkaitan. Dengan demikian, perkembangan teknologi baru seperti TIK juga mempengaruhi politik dan sebaliknya. Dalam konteks wacana korupsi teknologi seperti HP, komputer, internet dengan mekanismenya seperti FB dipergunakan sebagai tempat untuk mengekspresikan pandangan masyarakat tentang situasi sosial politik.

Data dari lapangan dan data dari FB memperlihatkan kesamaan dan perbedaan. Data lapangan terlihat kontekstual dan pandangan mereka memperlihatkan pengetahuan yang hidup di dalam masyarakat. Namun di dalam perkembangannya, data dari FB cenderung lebih cepat *up date* dibandingkan dengan data lapangan, yang terkendala waktu wawancara berlangsung. Sedangkan data FB terkendala oleh situasi sosial yang berkembang, seperti sulitnya melacak kembali data yang ada. Selain itu, perkembangan terkini dari kasus Bibit-Chandra sekarang ini muncul kasus yang lebih berat seperti kasus Nazarudin.

Sebagai media baru, jejaring sosial memberikan ranah yang kondusif untuk mengekspresikan pandangan masyarakat, terutama ketika saluran ekspresi melalui media massa penuh dengan pandangan elit politik. Kasus Bibit-Chandra menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga, dalam kasus ini adalah KPK yang dilihat merupakan lembaga yang mampu bertahan terhadap tekanan korupsi. Lembaga ini ketika event ini terjadi, menjadi harapan bagi banyak orang untuk hidup yang lebih baik.

Jika konteks KPK ketika gerakan Satu Juta Tanda Tangan Berkembang adalah konteks kriminalisasi KPK maka sekarang ini serangan terhadap lembaga itu menjadi semakin gencar.

Jejaring Sosial dalam Konteks Perubahan Masyarakat

Penelitian tentang ruang maya merupakan sebuah ”*adventure*” sebuah petualangan. Kasus Bibit-Chandra pada awalnya merupakan sebuah peristiwa penting di mana di dalam waktu yang terbatas mampu mengumpulkan orang-orang yang terlepas, bersatu di dalam sebuah tekad. Dukungan terhadap Bibit-Chandra merupakan kekuatan penekan yang kemudian ”berhasil” mengeluarkan keduanya dari tahanan Polisi. Namun masalah berkembang dengan sangat pesatnya yang memuncak pada tuduhan korupsi yang dituduhkan pada Chandra sebagai tokoh KPK.

Tuduhan ini membuat masyarakat terpukau dan seakan terhenyak. Sehingga masalah di KPK yang diawali dengan upaya yang dibaca sebagai kriminalisasi, menjadi masalah yang secara langsung menghantam tokoh di KPK. Namun kasus terkait yang muncul seperti kasus Nazarudin kemudian menjadi lebih besar di dalam percaturan wacana.

Kajian seperti cyberdemokrasi dibutuhkan oleh masyarakat, untuk banyak hal, awalnya adalah pantauan terhadap kasus yang terjadi pada masyarakat kontemporer. Kejadian saat ini yang terjadi dengan cepat, menyesuaikan diri dengan kasus-kasus baru yang muncul. Kemudian kajian ini dibutuhkan untuk melihat apa yang terjadi di ruang maya. Dalam konteks ini, Indonesia merupakan konteks masyarakat yang penting untuk diperhatikan. Seperti telah disebutkan di atas bahwa pengguna sosial media sangat banyak dan sudah menjadi nomor tiga sedunia. Meskipun orang bisa berkilah bahwa pengguna terutama adalah mereka yang terekspos pada konsumerisme dan banjirnya pasar dengan teknologi TIK. Namun fakta ini memperlihatkan bahwa penggunaan TIK marak dan akan berimbis pada penggunaan media baru.

Sumbangan yang terbesar dari kajian ini adalah perhatian terhadap dinamika yang terjadi di masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang terekspos dengan gadget TIK. Teknologi merupakan satu elemen yang selalu mempengaruhi masyarakat. Oleh karena itu, penggunaannya dapat positif ataupun negatif sesuai dengan konteks yang ada. Dalam situasi Dunia Ketiga terdapat pertanyaan yang besar tentang efektifitas penggunaan dari media baru ini, mengingat beberapa negara terdapat perubahan rejim politik yang didukung oleh media baru. Kasus di Mesir adalah kasus yang cukup membuat orang kembali melihat pentingnya media baru ini setelah beberapa negara Dunia Ketiga berhasil menggulingkan pemimpin utamanya melalui dukungan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agger Ben. 2004. *The Virtual Self a Contemporary Sociology*. Malden: Blackwell Publishing.
- Axford, Barrie dan Huggins, Richard (ed). 2001. *'New media and Politics'*. London: Sage Publications.
- Anderson, Benedict R. O'G. 1990. *'Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia'*. Ithaca: Cornell University Press.
- Andina, E. 2010. "Studi Dampak negative *Facebook* terhadap Remaja Indonesia". Dalam *Aspirasi*, 1(1): 119-146.
- Armando, A. 2011. *Televisi Jakarta di atas Indonesia*. Jakarta: Bentang.
- Azra, A. 2009. *Democracy, Multiculturalism and Multicultural Education*. Paper presented at Orientation Seminar The Nippon Foundation Fellowship for API. Jakarta, 25 Februari.
- Baym Nancy K. 2006. "Finding the Quality in Qualitative Research". Dalam David Silver, Adrienne Massanari (eds), *Critical Cyber-Culture Studies*, New York University Press, New York
- Barker Joshua, x, University of Toronto, dalam <http://kambing.ui.ac.id/onnopurbo/library/library-ref-eng/ref-eng-3/application/policy/Barker%20Techno-Politics%20Paper.doc>
- Barret, Boyd. 1995. *Conceptualizing Public Sphere* dalam Barret, Oliver Boyd dan Newbold Christ, *Approaches to Media*, A Reader. London: Arnold.
- Boehlert, Eric. 2009. *"Bloggers on the Bus: How Internet Changed Politics and The Press"*. New York: Free Press.

- Brown Penelope, Stephen C. Levinson. 1987. *Politess: Some Universals in Languague Usage*. Cambridge: University Press.
- Byckers-Social Construction of Technology–Menyatakan Bahwa Teknologi Mempengaruhi Culture dan Sebaliknya. Di dalam Kondisi Saling Mempengaruhi Itu Perlu Kajian Socio-technology 23-5-2007.
- <http://www.umsl.edu/%7Erkeel/280/class/bijker.html>
- Bijker: Understanding Socio-Technical Change.
- Brady Anne, Weibe Bijker. "Conclusion: The Politics of Sociotechnical Change". Analysis.
- Cyber Democracy 2001. A Global Scan August 2001 For Vivendi Universal Prospective. By Alternative Futures Associates 100 North Pitt Street, Suite 235 Alexandria, VA 22314, www.altfutures.com.
- Eriyanto. 2001. *Analisis Wacana: Pengantar Teks Media*. Yogyakarta: LKiS.
- EA. Putu (editor). 2010. *Oposisi Maya*. Insist Press.
- Farrel, David M. dan Beck-Rudiger Schmitt(ed) (2002) 'Do Political Campaign Mater?: Campaign Effect in Elections and Referendums'. London: Routledge.
- Goffman E. 1971. *Relations in Public, Microstudies of The Public Order*. New York: Doubleday.
- Hall, Stuart. 1979. *Culture, Media and the Ideological Effect*. Dalam *Mass Communication and Society*, Curran James et.al (ed), Beverly Hills: Sage Publications.
- _____. 1996. *Signification, Representation, Ideology, Althusser and the Post-Structuralist Debates dalam Cultural Studies and Communications*. London: Arnold.

- Haryanto Ignatius. 2009. Para Pembangkang Mayantara (Cyber Dissident), 15 November 2009, http://mediacub-pejompongan.blogspot.com/2009_11_01_archive.html, diunduh 15 sep 2011. Diterbitkan juga di Koran Tempo Sabtu 7 November 2009.
- Heryanto Gun Gun. 2009. sudah diterbitkan di Seputar Indonesia, 7 November 2009 dan diterbitkan juga di <http://www.uinjkt.ac.id/index.php/section-blog/28-artikel/1117-ruang-publik-komunitas-virtual.html>. Diunduh 15 September 2011
- Hine Christine. 2000. *Virtual Ethnography*. London: Sage publication.
- Kellner Douglas, *Globalization and Technopolitics*, <http://www.gseis.ucla.edu/faculty/kellner/kellner.html>. Diakses 25-3-2009.
- Kristawan R. 2011. *Jerat Negara dan Pasar dalam Ruang Publik*. Dalam Prisma Vol. 30, No. 1, 2011.
- Lim Merlyna. 2003. "From Real to Virtual and Back Again, Civil Society, Public Sphere and the Internet in Indonesia", dalam K.C Ho, Randolph Kluver, Kenneth CC Yang, *Asia.Com, Asia Encounters the Internet*. New York: Routledge Curzon.
- Mills, Sara. 1997. "Discourse". London: Roudledge.
- Muhammad Roby. 2009. Gerakan Sosial Digital, dimuat di <http://www.liputan6.com>, dimuat ulang di sini untuk tujuan Pendidikan. <http://indoprogress.blogspot.com/2009/11/gerakan-sosial-digital.html>. 15 September 2011.
- Piliang Yasraf A. 2004. *Posrealitas, Realitas Kebudayaan dalam Era Posmetafisika*. Yogyakarta: Jalasutra.
- _____. 2005. *Transpolitika, Dinamika Politik di dalam Era Virtualitas*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Poster, Mark. 1997. *Cyberdemocracy: The Internet and tne Public Sphere*" dalam Holmes, David (ed): "*Virtual Politics: Indentity & Community in Cyberspace*". London: Sage Publication.

- Pawito. 2002. *Mass media and Political Change in Indonesia*. Dissertasion (tidak diterbitkan). Australia: New Castle University.
- Rushkoff Douglas. 2003. *Open Source Democracy, How Online Communication is Changing Offline politics*. <http://rushkoff.com/wp-content/downloads/opensourcedemocracy.pdf>. Diakses 22-2-2011.
- Straubhar La Rose. 2008. *Media Now, Understanding Media Culture and Technology*. Australia: Thomson.
- Trippi Joe. 2004. *The Revolution Will Not Be Televised, Democracy the Internet and the Overtrow of Everything*, Harper Colins Publishers, New York.
- Vivian, J. 1993. *The Media of Mass Communication*. Boston: Allyn and Bacon.
- <http://www.detikinet.com/read/2009/07/10/142932/1162755/455/gerakan-cicak-vs-buaya-ramai-di-facebook>. Diakses 8 November 2010.
- <http://www.pandebaik.com/2009/11/03/%E2%80%98cicak-vs-buaya%E2%80%99-merambah-facebook/>, diakses 8 November 2010
- <http://hankam.kompasiana.com/2011/08/09/memprediksi-nasib-nazaruddin-kedepan/>—
- <http://blog.Unitomo.ac.id/brantaskoruptor/08/16/nasib-nazarudin-makin-tak-jelas/> diunduh 15 September
- Eddy Os Hiariej, Staf Pengajar Hukum Pidana Fakultas Hukum UGM dalam “*Quo Vadis*” *Kasus Bibit-Chandra?*. Opini Harian Kompas, 28 April 2010.
- Laporan dan Rekomendasi Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum Atas Kasus Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto.

- Gerakan CICAk dan Sejarah Kisah Cicak Melawan Buaya (KPK vs Polri) <http://nusantaranews.wordpress.com/2009/07/13/gerakan-cicak-dan-kisah-cicak-melawan-buaya-kpk-vs-polri/>
Diunduh 14 September 2011
- Gerakan CICAk dan Sejarah Kisah Cicak Melawan Buaya (KPK vs Polri) <http://nusantaranews.wordpress.com/2009/07/13/gerakan-cicak-dan-kisah-cicak-melawan-buaya-kpk-vs-polri/>
Diunduh 14 September 2011
- Munatsir Mustaman, S.H, Direktur Executive **Indonesia Development Monitoring**, [http://m.rimanews.com/read/20110817/38271/awas-valiumisasi-pada-nazarudin-dan-case -close](http://m.rimanews.com/read/20110817/38271/awas-valiumisasi-pada-nazarudin-dan-case-close) *diunduh 15 september 2011*
- Nugroho Yanuar, Shita laksmi. 2011. *Social Media in Civil Society*. <http://www.thejakartapost.com/news/2011/04/30/social-media-civil-society%E2%80%94citizens-ction.html>. Diunduh 1 November 2011
- Rushkoff Douglas. 2003. *Open Source Democracy, How Online Communication is Changing Offline Politics*. <http://rushkoff.com/wp-content/downloads/opensourcedemocracy.pdf>. Diakses 22-2-2011.
- Turmudi Endang. 2011. *Menilik Kesempatan Kalangan Muda Memasuki Kepemimpinan Nasional*. Dalam Henny Warsilah, 2011, *Alih Kepemimpinan Generasi Muda*. Jakarta: LIPI Press.
- Widyawati Nina, Widjajanti. 2010. *Cyber-democracy Perkembangan Kontemporer Demokrasi di Indonesia, Kasus Pemilu 2009*. Jakarta: LIPI Press.
- Widyawati Nina, Widjajanti, Katubi, Sutamat Aribowo, Rusdi Muchtar. *Cyber Demokrasi Wacana Emansipatoris dalam Pemilihan Presiden 2009*. Jakarta: Penerbit PT. Gading Inti Prima.

Komentar AA Terhadap Nazaruddin Ancam Bongkar Borok PD (2), May 19, 2011–7:26 pm, Kamis, 19 Mei 2011, Aug 14, 2011

<http://asrul.blogdetik.com/perkembang-facebook-di-indonesia-semakin-mencengangkan-amerika-akankah-foursquare-berikutnya/>, diakses 8 November 2010.

Sarlito Wirawan Sarwono. 2009. *Buaya Vs Cicak*. Kompas, 26 September 2009.

Antasari Akan Jadi Tersangka. 2009. Kompas, 26 September 2009.

Kepala Polri Dibantah, Chandra dan Bibit Tidak Pernah Ditanya Tentang Penyuapan. 2009. Kompas, 27 September 2009.

Bentuk Segera Penyidik Independen KPK. 2009. Kompas, 12 Oktober 2009.

Polri: Profesioanl dan Sesuai Prosedur Hukum. 2009. Kompas, 10 Oktober 2009.

Presiden Diminta Selamatkan KPK. 2009. Kompas, 15 September 2009.

Polri: Profesional dan Sesuai Prosedur Hukum. 2009. Kompas, 10 Oktober 2009.

W. Riawan Tjandra. 2010. *Episode “Kadal” Pasca–“Cicak-Buaya”*, Kompas, 14 Mei 2010.

Wapres Minta Polri Utamakan Kejelasan Kasus Pimpinan KPK. 2009. Kompas, 27 September 2009.

Polri Tindak Lanjuti Laporan KPK. 2010. Kompas, 1 Oktober 2010.

Eddy Os Hiariej. Staf Pengajar Hukum Pidana Fakultas Hukum UGM. 2010. *“Quo Vadis” Kasus Bibit-Chandra?*. Kompas, 28 April 2010.

Skenario Menggurung Cicak. 2009. Tempo 15 November 2009.

Susno Bersaksi untuk Antasari. 2010. Republika, 8 Januari 2010.

Gerakan Cicak dan Sejarah Kisah Cicak Melawan Buaya (KPK vs Polri) <http://nusantaranews.wordpress.com/2009/07/13/gerakan-cicak-dan-kisah-cicak-melawan-buaya-kpk-vs-polri/>
Diunduh 14 September 2011

Perlawanan Cicak VS Buaya Dalam Karikatur (Sindiran dan Refleksi). <http://ruanghati.com/2009/11/02/perlawanan-cicak-vs-buaya-dalam-karikatur-sindiran-dan-refleksi/> iunduh pada 14 September 2011.

Gerakan CICAk dan Sejarah Kisah Cicak Melawan Buaya (KPK vs Polri). <http://nusantaranews.wordpress.com/2009/07/13/gerakan-cicak-dan-kisah-cicak-melawan-buaya-kpk-vs-polri/>
Diunduh 14 September 2011.

Gerakan CICAk dan Sejarah Kisah Cicak Melawan Buaya (KPK vs Polri). <http://nusantaranews.wordpress.com/2009/07/13/gerakan-cicak-dan-kisah-cicak-melawan-buaya-kpk-vs-polri/>
Diunduh 14 September 2011.

Munatsir Mustaman, S.H, Direktur Executive **IndonesiaDevelopment Monitoring**, <http://m.rimanews.com/read/20110817/>

Inilah Isi Surat Muhammad Nazarudin untuk Presiden SBY di Sabtu, Agustus 20, 2011 <http://www.google.co.id/search?q=nazarudin&hl=id&prmd=ivnsulb&ei=hatxToTYIsXxrQfOprGEBw&start=190&sa=N>, diunduh 15 September 2011

Kutipan dari wawancara dengan Umberto Eco yang disitir di <http://lenteradi atasbukit.blogspot.com/2009/11/internet-dan-perubahan-sosial-gerakan.html>. Diunduh 14 September 2011.

Ignatius Haryanto, Kelompok Studi Media Pejompompongan Para Pembangkang Mayantara (“Cyber Dissident”). http://mediacub-pejompompongan.blogspot.com/2009_11_01_archive.html. Diunduh 15 September 2011

Ikrar Nusa Bhakti, Kabinet Kleptokrasi. Dalam <http://aipi.wordpress.com/2011/09/12/kabinet-kleptokrasi/>. Diunduh 26 September 2011.

Laporan dan Rekomendasi Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum Atas Kasus Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto.

DH <http://www.facebook.com/dh>. Diakses Juni 2011.

JK, <http://www.facebook.com/putra.madiun>. Diakses Juni 2011.

RR, <http://www.facebook.com/rr>

<http://www.facebook.com/profile.php?id=1823874210>. 6 Mei 2011

Sabar Mengadu. 9 Mei 2011. <http://www.facebook.com/profile.php?id=1618900558>

<http://hankam.kompasiana.com/2011/08/09/memprediksi-nasib-azaruddin-kedepan/>

[http://blog. Unitomo.ac.id/ brantaskoruptor /08/16/nasib-nazarudin-makin-tak-jelas/](http://blog.Unitomo.ac.id/brantaskoruptor/08/16/nasib-nazarudin-makin-tak-jelas/) diunduh 15 September 2011.

Tiara Jo. 26 Mei 2011. <http://www.facebook.com/tiarajo>

Nabila Khairunnisa Alhimar. 27 Mei 2011. <http://www.facebook.com/profile.php?id=100000850673909>

Arifin Sang Petualang. <http://www.facebook.com/fgjgsamklsae>. Diunduh 27 Mei 2011.

Sabar Mangadu. <http://www.facebook.com/profile.php?id=1618900558>, Diunduh 3 Juni 2011.



